

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN



**Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

TAHUN ANGGARAN 2024



I. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah menyajikan Laporan Keuangan yang handal dan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang menyatakan Laporan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**, sedangkan Perangkat Daerah (PD) sebagai entitas akuntabilitas wajib menyusun **Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disingkat Laporan Perubahan SAL merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang memuat informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat dengan LPE adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas baik kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi



Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan. Laporan keuangan juga disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode tahun anggaran 2024 dan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan, jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai, dan perubahan posisi keuangan selama pelaksanaan APBD tahun 2024.

Kabupaten Katingan merupakan salah satu unit pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola, dan berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan tujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Pemerintah Kabupaten Katingan;
24. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
25. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
26. Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
27. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Kabupaten Katingan

II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
- 2.2 Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 3.2 Kebijakan Keuangan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Surplus/Defisit-LRA
 - 5.1.5 Pembiayaan
 - 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan – LO dari kegiatan operasional
 - 5.4.2 Beban dari kegiatan operasional
 - 5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi – LO
 - 5.4.4 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.6 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
 - 5.4.7 Pos Luar Biasa
 - 5.4.8 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
 - 5.4.9 Surplus/defisit-LO
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas
 - 5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD
 - 5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD
 - 5.5.7 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1 Ekuitas awal



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- 5.6.2 Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)
- 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- 5.6.4 Ekuitas Akhir

VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Kegiatan Majelis TP/TGR Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2019
 - 6.2.1 Aktivitas Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan
- 6.2 Barang Ekstrakomptabel (*Extracomptable*)
- 6.3 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
 - 6.3.1 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02

VII Penutup



II. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan bahwa Ibu kota Kabupaten Katingan berkedudukan di Kasongan. Kabupaten Katingan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri atas:

1. Kecamatan Katingan Hulu;
2. Kecamatan Marikit;
3. Kecamatan Sanaman Mantikei;
4. Kecamatan Katingan Tengah;
5. Kecamatan Pulau Malan;
6. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
7. Kecamatan Katingan Hilir;
8. Kecamatan Tasik Payawan;
9. Kecamatan Kamipang;
10. Kecamatan Petak Malai;
11. Kecamatan Bukit Raya
12. Kecamatan Mendawai; dan
13. Kecamatan Katingan Kuala.

Kabupaten Katingan mempunyai batas-batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, serta Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau; dan
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa, dan Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.2 Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Katingan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan terdiri atas 39 Perangkat Daerah (PD) sebagaimana berikut :

1. Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan sesuai dengan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan misi pemerintahan Kabupaten Katingan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan agar tercapai visi Pemerintahan Kabupaten Katingan yang cerdas, sehat dan terbuka.

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Permukiman serta Pertanahan.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran.

6. Dinas Perhubungan dan Perikanan.

Dinas Perhubungan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan Perikanan.

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

8. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

10. Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

12. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
 14. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.
 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 18. Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan, Aset Daerah.
 20. Badan Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Transfer.
 21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana di Daerah.
 24. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi pendukung di bidang kesekretariatan.
 25. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi pendukung di bidang kesekretariatan.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

26. Inspektorat Kabupaten

Inspektorat menyelenggarakan fungsi pengawasan.

27. 13 Kecamatan dan 4 Kelurahan

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah.

28. Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan serta serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kabupaten Katingan beribukota di Kasongan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyatakan luas wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.500 km². Namun, semenjak pembentukan wilayah tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan terus melakukan kajian penetapan tata batas administrasi. Hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan hingga saat ini adalah 20.396,76 km².

Kabupaten Katingan terletak antara 0°20'-3°38' Lintang Selatan dan 112°00'-113°45' Bujur Timur. Berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, sebelah Timur dengan Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Pulang Pisau. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kabupaten Seruyan.

Secara keseluruhan Kabupaten Katingan terdiri atas 13 kecamatan, yaitu Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya. Ketiga belas kecamatan tersebut terhambat dari Selatan ke Utara, dimana Kecamatan Bukit Raya memiliki jarak terjauh ke ibukota Kabupaten yakni sejauh 291 km. Kabupaten ini dilintasi oleh sungai Katingan yang memiliki panjang ±650 km dengan banyak anak sungainya.

Rata-rata suhu udara Kabupaten Katingan tahun 2024 berada pada kisaran 28,20°C hingga 29,37°C. Lalu, rata-rata kelembaban udara Kabupaten Katingan tahun 2024 berada pada kisaran 78,30 hingga 83,18 persen. Sementara itu, curah hujan tertinggi di Kabupaten Katingan tahun 2024 terjadi pada Bulan Oktober sebesar 721,40 mm³. Dan, jumlah hujan terbanyak terjadi pada Bulan Desember 2024 sebanyak 25 hari. Data mengenai suhu udara, kelembaban udara, curah hujan dan jumlah hujan diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai sosial ekonomi masyarakat, dan ada beberapa indikator yang menggambarkan capaian kerja pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Indikator-indikator yang digunakan sebagai parameter kesejahteraan rakyatnya adalah:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- d. Indikator Kemiskinan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- e. Gini Ratio (Koefisien Gini)
- f. Laju Inflasi
- g. Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur Panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Dan mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur Panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek (kemampuan membaca dan menulis) dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu model manusia dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Berikut tabel mengenai Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) yang diperoleh dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya yang menunjukkan bahwa IPM di Kabupaten Katingan mengalami peningkatan di setiap tahunnya jika dilihat dari tabel di bawah ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Katingan pada tahun 2024 sebesar 72,73 persen mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen dari tahun 2023 sebelumnya sebesar 73,73 persen.

Tabel 3.1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Kotawaringin Barat	73,95	74,15	74,39	74,92	74,44
Kotawaringin Timur	73,18	73,25	73,45	73,99	72,66
Kapuas	71,18	71,34	71,72	72,40	71,32
Barito Selatan	72,73	73,05	73,45	74,01	72,36
Barito Utara	71,44	71,64	72,16	72,71	72,31
Sukamara	69,04	69,28	69,86	70,35	69,85
Lamandau	72,21	72,28	72,81	73,44	72,25
Seruyan	69,22	69,31	69,81	70,24	69,05
Katingan	72,45	72,66	73,43	73,90	70,7
Pulang Pisau	70,57	70,65	71,05	71,62	70,27



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Gunung Mas	72,00	72,22	72,50	73,18	72,73
Barito Timur	73,09	73,17	73,69	74,21	73,26
Murung Raya	69,54	69,67	70,13	70,91	70,03
Kota/Municipality					
Palangka Raya	81,17	81,22	81,47	81,95	82,2
Kalimantan Tengah	72,62	72,81	73,17	73,73	72,73

Sumber/ Source : Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya/ Based On Census, Surveys, and Others Sources

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi didekati dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita yang disajikan tidak memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk Kalimantan Tengah (*Net Factor Income From Abroad*), sehingga pendapatan perkapita yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat.

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat didekati dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita yang disajikan tidak memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk Katingan (*Net Factor Income from Abroad*), sehingga pendapatan perkapita yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil. Kemudian di dilampirkan tabel PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) dalam tiga tahun terakhir, berikut tabel PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan:

Tabel 3.1.2
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2021 – 2023

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB Per Kapita ADHB	PDRB Per Kapita ADHK
(1)	(2)	(3)
2021	9.040,86	5.091,12
2022*	9.965,59	5.375,13
2023**	10.755,90	5.696,61

*)Angka Sementara

**)Angka Sangat Sementara

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Pada tahun 2024, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Katingan mencapai 10.755,90 juta rupiah meningkat 7,93 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2024 juga meningkat menjadi 5.696,61 juta rupiah, dengan laju pertumbuhan bernilai 5,98 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita Katingan tahun 2023 bernilai positif hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat pada tahun tersebut mengalami peningkatan dari tahun



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

sebelumnya. Kemudian jumlah penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Katingan pada tahun 2023 mencapai 169.360 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2023. Selain itu, jumlah KK di Kabupaten Katingan tahun 2024 yaitu 56.413 buah.

Konsep angkatan kerja menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan sebagian penduduk menjadi angkatan kerja, antara lain karena faktor ekonomi, faktor sosial maupun faktor psikologis. Dengan terdapatnya perkembangan sosial ekonomi maka kondisi angkatan kerja juga berkembang dengan berbagai variasinya, yang akhirnya akan mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Katingan tahun 2024 sebesar Rp3.230.700,00 mengalami kenaikan dibandingkan UMK Katingan tahun 2022 sebesar Rp2.980.076,00. Secara umum, semakin tinggi golongan umur, maka tingkat partisipasi angkatan kerja semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Katingan pada 2023 mencapai 80.066 orang yang menurun dibandingkan jumlah angkatan kerja pada 2022 yang mencapai 87.022 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang sangat besar. Namun masalah lain yang juga sangat penting adalah setengah pengangguran yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Setengah pengangguran ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain banyaknya orang yang terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal karena iklim usaha yang kurang kondusif, misalnya karena perusahaan terpaksa mengurangi jumlah produksi karena berkurangnya order yang masuk sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Kedua konsep ini sangat berbeda, karena pengangguran adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan sedangkan setengah pengangguran menggunakan pendekatan jam kerja. Berdasarkan data BPS jumlah pengangguran di Kabupaten Katingan 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Katingan pada tahun 2024 mencapai 4,88 persen mengalami penurunan 0,8 persen dibandingkan TPT tahun 2023 yang sebesar 4,96 persen. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 sebesar 67,63 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 64,42 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dari sebelumnya, kondisi ini disinyalir terjadinya penurunan angkatan kerja baru yang terserap oleh lapangan kerja misalnya lulusan SMA/SMK, Diploma/Sarjana yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan langsung terjun dalam bursa angkatan kerja.

Tabel 3.1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Katingan,
Tahun 2022 - 2024

Indikator	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)/ <i>rate of Labour Force Participation</i>	65,94	64,42	67,63
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ <i>Rate of Open Unemployment</i>	5,33	4,96	4,88

Sumber : Data Sakernas 2022 - 2024 (diolah)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Kesejahteraan rakyat, kesejahteraan rakyat suatu wilayah dapat diukur dari berbagai indikator, yang *pertama* tingkat kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Katingan pada tahun 2024 cenderung meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Katingan pertahunnya. Data ini diperoleh berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, BPS/ *National Socioeconomic Survey 2024, BPS-Statistics Indonesia*.

Tabel 3.1.4
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/ <i>Regency</i>					
1. Kotawaringin Barat	11,46	12,29	12,44	13,44	13,43
2. Kotawaringin Timur	26,64	27,06	27,56	26,57	26,69
3. Kapuas	18,17	19,45	20,18	19,19	19,47
4. Barito Selatan	6,12	6,42	6,83	6,66	6,87
5. Barito Utara	6,78	7,40	7,70	7,14	7,6
6. Sukamara	2,13	2,38	2,48	2,71	2,9
7. Lamandau	2,61	2,92	2,78	2,63	2,79
8. Seruyan	14,53	15,07	15,96	15,71	16,06
9. Katingan	8,23	9,15	9,71	8,95	9,55
10. Pulang Pisau	5,21	5,43	6,04	5,92	5,91
11. Gunung Mas	5,78	6,29	6,70	6,55	6,86
12. Barito Timur	7,88	8,02	8,42	8,59	8,74
13. Murung Raya	7,18	7,31	7,69	7,81	8,05
Kota/ <i>Municipality</i>					
Palangka Raya	10,23	10,86	10,62	10,31	10,7
Kalimantan tengah	132,95	140,05	145,11	142,18	145,63

Sumber/ *Source*: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, BPS/ *National Socioeconomic Survey 2024, BPS-Statistics Indonesia*

Selain tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan, permasalahan kemiskinan dapat dilihat dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedang indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 8,95 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,71 persentase tersebut mengalami penurunan sebesar 0,76 persen.

Indikator *kedua* yang mempengaruhi kesejahteraan adalah gini ratio. Gini ratio merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran antara kelompok penduduk dengan skala 0 s.d 1. Kondisi selama tahun 2024 gini ratio Kabupaten Katingan naik dari 0,230 persen menjadi 0,250 persen mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan tahun 2021. Kenaikan gini ratio ini dimungkinkan karena terjadinya kenaikan pengeluaran daya beli masyarakat terutama menengah keatas yang dipengaruhi oleh berkurangnya wabah virus corona yang mengakibatkan kenaikan daya beli masyarakat. Berikut kondisi gini ratio berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, BPS/ *National Socioeconomic Survey 2023, BPS-Statistics Indonesia*.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 3.1.5
Jumlah Gini Ratio Menurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2023

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/ Regency			
1. Kotawaringin Barat	0,317	0,315	0,335
2. Kotawaringin Timur	0,325	0,292	0,290
3. Kapuas	0,312	0,303	0,305
4. Barito Selatan	0,286	0,309	0,289
5. Barito Utara	0,308	0,301	0,323
6. Sukamara	0,290	0,322	0,287
7. Lamandau	0,321	0,318	0,333
8. Seruyan	0,262	0,292	0,261
9. Katingan	0,230	0,250	0,261
10. Pulang Pisau	0,262	0,288	0,280
11. Gunung Mas	0,278	0,262	0,309
12. Barito Timur	0,297	0,294	0,331
13. Murung Raya	0,308	0,260	0,261
Kota/ Municipality			
Palangka Raya	0,362	0,383	0,312
Kalimantan Tengah	0,362	0,383	0,298

Sumber/ Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, BPS/ National Socioeconomic Survey 2023, BPS- Statistics Indonesia

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif, inflasi Kalimantan Tengah yang merujuk dari dua kota kecamatan untuk inflasi (Kota Palangka Raya dan Kota Sampit) mulai menunjukkan peningkatan. Inflasi Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 0,30 persen, dengan nilai Indeks Harga Konsumen sebesar 118,69. Angka inflasi untuk tahun 2024 ini tercatat hanya sebesar 2,64 persen. Kenaikan realisasi inflasi pada tahun ini menunjukkan kegiatan ekonomi di Kalimantan Tengah yang berjalan menuju pemulihan ke arah normal. Inflasi tahunan atau inflasi *year-on-year* ini disebabkan oleh peningkatan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,66 persen), kelompok transportasi (0,60 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,38 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,21 persen), kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,16 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,15 persen), serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,08 persen). Sedangkan inflasi bulanan gabungan dari dua kota kecamatan, Kota Palangka Raya dan Sampit, pada Desember 2023 terjadi karena adanya peningkatan indeks kelompok transportasi (1,00 persen), kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,67 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,37 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,25 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,20 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,13 persen), serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,12 persen). Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,23 persen).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi bulan Desember 2024 mencapai (0,30 persen) untuk Kota Palangka Raya (0,31 persen), untuk Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai (0,27 persen). Dibandingkan 2020, sejak Covid-19 melanda tren inflasi bulanan di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan dua kota kecamatan, terus menurun.



Namun sejak September 2023 sampai sekarang menunjukkan tren perbaikan, yang juga menunjukkan sinyal ekonomi membaik.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan mengalami tumbuh positif dari tahun 2021-2024, yakni sebesar 2,90 persen pada tahun 2021, 5,58 persen pada tahun 2022, 5,98 persen pada tahun 2023, namun mengalami tumbuh negatif sebesar 3,25 persen pada tahun 2020. Fluktuasi volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 11,48% pada tahun 2024. Dari sisi permintaan akhir, sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT).

Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, menggunakan tiga asas pemerintahan, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang/urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang/urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan dimaksud didanai dari APBN melalui Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

Kabupaten Katingan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wujud dari pembagian penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Katingan juga wajib melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangannya. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut tentu saja harus mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, baik dalam hal dukungan anggaran ataupun pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasarannya maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, komponen desentralisasi tersebut harus diaktualisasikan secara bersama-sama dan satu dengan yang lainnya harus saling mendukung.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peraturan pelaksanaannya telah membawa banyak perubahan yang mendasar dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Hal tersebut antara lain terlihat dari perbaikan formula pengalokasian dana-dana yang didaerahkan. Perbaikan juga dilakukan dalam mekanisme penyaluran transfer ke daerah (DAU, DAK, DBH Pajak, dan DBH SDA) yang saat ini sudah dilaksanakan langsung dari Rekening Kas Umum Negara di Bendahara Umum Negara (BUN) ke Rekening Kas Umum Daerah.

3.1.1 Transfer Ke Daerah

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per daerah. Manfaat Transfer ke Daerah cukup signifikan dengan adanya penerapan mekanisme Transfer ke Daerah selain dapat mendorong percepatan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBD juga dapat meningkatkan efisiensi di semua lini dan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban Transfer ke Daerah.

Efisiensi tersebut mencakup efisiensi birokrasi yang harus dilalui, efisiensi anggaran dari biaya yang ditimbulkan, SDM yang dibutuhkan lebih minimal, efisiensi waktu lebih cepat karena langsung ditransfer dari Rekening Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), efisiensi Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan efisiensi pelaporan anggaran. Pada tahap selanjutnya, Transfer ke Daerah tersebut mendorong penggunaan satu Rekening Kas Umum Daerah untuk menampung transfer dari APBN dan APBD (*Treasury Single Account*) di daerah serta mempercepat penetapan, pelaksanaan dan penyerapan dana APBD.

Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam melaksanakan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.



2.1.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*, penyalur DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Pengaturan DBH mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang bagi hasil meliputi beberapa jenis potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat. Berjalannya sistem transfer dalam DBH mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA), dan pembagian seluruh atau sebagian hasil penerimaan pajak dari suatu tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan adanya Bagi Hasil Pajak dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan pembiayaan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah, tidak seimbang dengan besarnya pendapatan daerah itu sendiri:

1. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dana secara mandiri;
2. Adanya jenis penerimaan pajak dan atau bukan pajak yang berdasarkan pertimbangan tertentu pemungutannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun objek dan atau subjek pajaknya berada di daerah;
3. Adanya jenis penerimaan pajak dan atau bukan pajak yang berdasarkan pertimbangan tertentu pemungutannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun objek dan atau subjek pajaknya berada di daerah;
4. Memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah;
5. Memberikan insentif kepada daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Pusat;
6. Memberikan insentif kepada daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Pusat;
7. Memberikan kompensasi kepada daerah atas timbulnya beban dari kegiatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

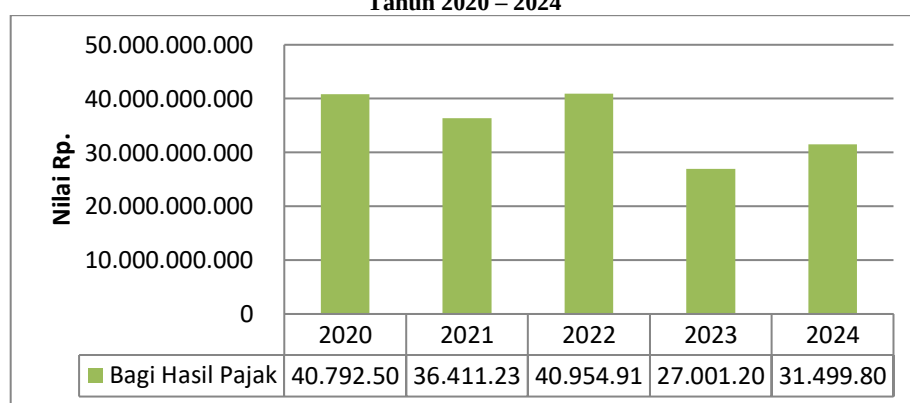
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Bagi Hasil Pajak bersumber dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh) WP Orang Pribadi Dalam Negeri;
2. PPh Pasal 21;
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk Kabupaten Katingan, Dana Bagi Hasil Pajak diperoleh dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, dan pada tahun 2023 perolehannya didominasi oleh Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah tersebut terbesar diperoleh jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 3.1.6
Bagi Hasil Pajak Kabupaten Katingan
Tahun 2020 – 2024



2.1.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam berasal dari penerimaan :

1. Pertambangan Minyak Bumi
2. Pertambangan Gas Bumi
3. Pertambangan Umum
4. Pertambangan Panas Bumi
5. Kehutanan
6. Perikanan.

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam pada Pemerintah Kabupaten Katingan bersumber dari Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*), Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dimana pada tahun 2023 perolehannya didominasi oleh Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*), Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Landrent*), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, dan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Bagi Hasil Minyak Bumi.

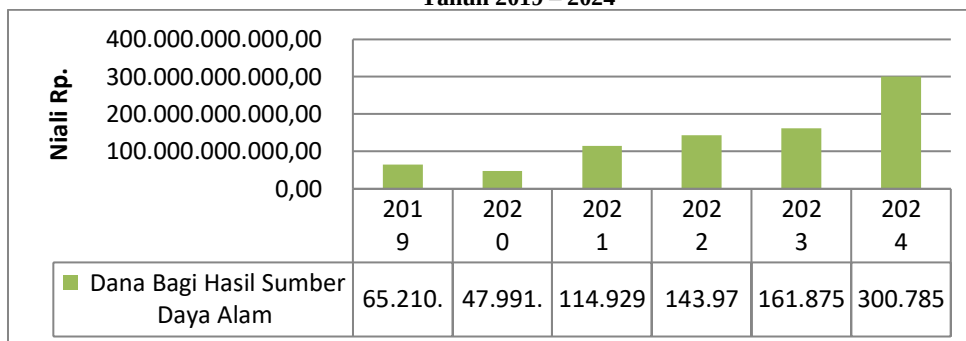


Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Gambar 3.1.7
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Katingan
Tahun 2019 – 2024

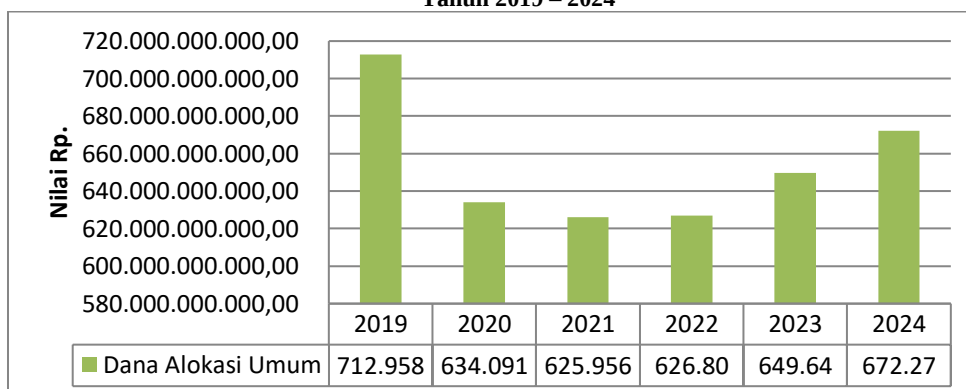


2.1.1.2 Dana Alokasi Umum

DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom Provinsi/Kabupaten/Kota di setiap tahunnya. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBD, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan DAU adalah sebagai instrumen untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Untuk itu, berhasil tidaknya alokasi DAU akan sangat ditentukan oleh tercapai tidaknya upaya perbaikan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dari tahun ke tahun. DAU untuk Kabupaten Katingan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dapat dilihat pada berikut ini.

Gambar 3.1.8
Dana Alokasi Umum Kabupaten Katingan
Tahun 2019 – 2024



2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Fisik dimana peruntukannya adalah untuk pembangunan wilayah dan Non Fisik yang diperuntukkan untuk membantu operasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Pada awalnya, DAK yang dialokasikan sejak tahun 2003 hanya



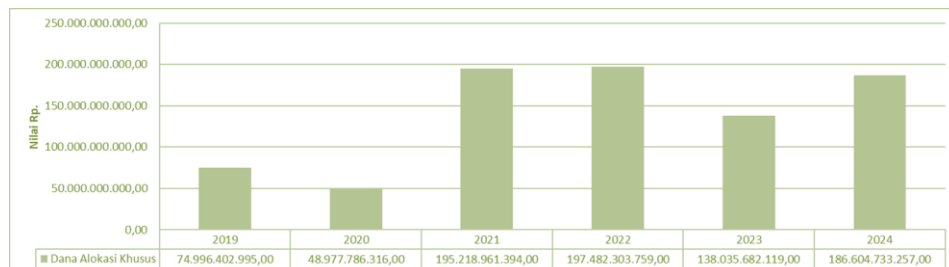
Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

dialokasikan untuk 5 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, dan prasarana pemerintah. Saat ini DAK sudah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus pada 11 bidang yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, kependudukan, dan kehutanan.

Gambar 3.1.9
Dana Alokasi Khusus Kabupaten Katingan
Tahun 2019 – 2024



Gambar 3.1.9 diatas menggambarkan tentang penerimaan DAK pada Kabupaten Katingan. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023.

3.1.2 Pinjaman, Obligasi dan Hibah Daerah

3.1.2.1 Pinjaman Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik. Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah;
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerimaan pinjaman yang di tuangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah; dan
8. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

Dengan prinsip tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah seharusnya memiliki visi yang jauh ke depan untuk dapat mengelola potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dapat melayani masyarakat dengan baik. Namun demikian, mengingat pinjaman daerah mempunyai konsekuensi pada biaya yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka pengelolaan pinjaman daerah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*).

Alternatif sumber-sumber pinjaman yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari dalam maupun luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Indonesia; dan
5. Masyarakat, yaitu berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Berdasarkan waktunya, pinjaman daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pinjaman Jangka Pendek
Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (termasuk biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Pinjaman Jangka Menengah
Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (termasuk biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
3. Pinjaman Jangka Panjang
Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (seperti biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda) harus dilunasi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pengaturan tentang pembayaran kembali pinjaman daerah diatur sebagai berikut:



1. Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan; dan
2. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut.

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak ada melakukan pinjaman daerah dalam bentuk apapun.

3.1.2.2 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah diartikan sebagai pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Terdapat dua unsur utama yang perlu diperhatikan khusus dalam kaitannya dengan Obligasi Daerah. Unsur yang pertama adalah, berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah. Untuk melindungi fiskal daerah, Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan Obligasi Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Penerbitan Obligasi ini dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat kepada publik dan menghasilkan penerimaan. Pada prinsipnya, diharapkan pendapatan yang didapat dari proyek yang dibiayai Obligasi Daerah dapat menutup pokok dan bunga yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, perlu diadakan langkah-langkah penilaian atas proyek yang akan dibiayai tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kemungkinan apakah komponen-komponen dari proyek yang dimaksud di sini telah layak sehingga benar-benar dapat menghasilkan penerimaan.

Unsur yang kedua adalah mengenai penawaran umum Obligasi Daerah di pasar modal. Dalam prakteknya Obligasi Daerah dianggap sebagai efek yang bersifat utang. Jika Obligasi Daerah telah diterbitkan dan telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), maka Obligasi Daerah telah siap untuk diperjualbelikan di pasar modal. Transaksi jual beli Obligasi Daerah mengikuti mekanisme di pasar modal. Berkaitan dengan hal ini, prosedur yang perlu diikuti telah diatur sedemikian rupa melalui berbagai Keputusan Kepala Bapepam-LK dan peraturan pasar modal lainnya. Pihak yang akan menerbitkan Obligasi Daerah harus memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal. Prinsip keterbukaan dimaksudkan untuk memberikan informasi lengkap mengenai prospek Obligasi Daerah untuk menarik minat investor.

Obligasi Daerah merupakan efek yang bersifat utang, dimana si penerbit obligasi memiliki piutang terhadap pemegang obligasi dan si berutang berkewajiban untuk membayar pokok obligasi beserta bunganya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pemberian Obligasi Daerah. Obligasi Daerah diberikan untuk waktu yang tetap selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Secara khusus, obligasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pinjaman. Obligasi juga merupakan pinjaman, tetapi diberikan dalam bentuk surat berharga. Dalam obligasi, si peminjam menjadi emiten dan pemberi pinjaman menjadi pemegang obligasi. Suku bunga biasanya sudah ditentukan. Kebanyakan obligasi adalah semi-tahunan, yang artinya bunga dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun pada pokok obligasi. Pokok obligasi itu sendiri dibayarkan dalam bentuk pembayaran tunggal pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, jumlah bunga



yang telah dibayarkan adalah sama dalam tiap tahunnya sampai pembayaran pokok obligasi lunas.

Prinsip umum mengenai penerbitan Obligasi Daerah, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah;
2. Obligasi Daerah merupakan pinjaman Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah;
3. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond);
4. Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis *index bond* yaitu Obligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan index tertentu dari nilai nominal, misalnya dengan kurs dollar atau harga emas; dan
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan Obligasi Daerah di Pasar Modal mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak ada menerbitkan obligasi daerah dalam bentuk apapun.

3.1.2.3 Hibah Daerah

Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain lain pendapatan. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.

Hibah yang bersumber dari Dalam Negeri bersumber dari:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Badan/Lembaga Organisasi Swasta dalam negeri; dan
4. Kelompok masyarakat/perorangan.

Sedangkan Hibah yang bersumber dari luar negeri diperoleh dari lembaga/institusi, negara:

1. Bilateral;
2. Multilateral; dan
3. Donor lainnya.

Prinsip dasar pelaksanaan hibah daerah di Indonesia yaitu:

1. Hibah kepada Daerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah serta merupakan urusan daerah;



Pemerintah Kabupaten Katingan

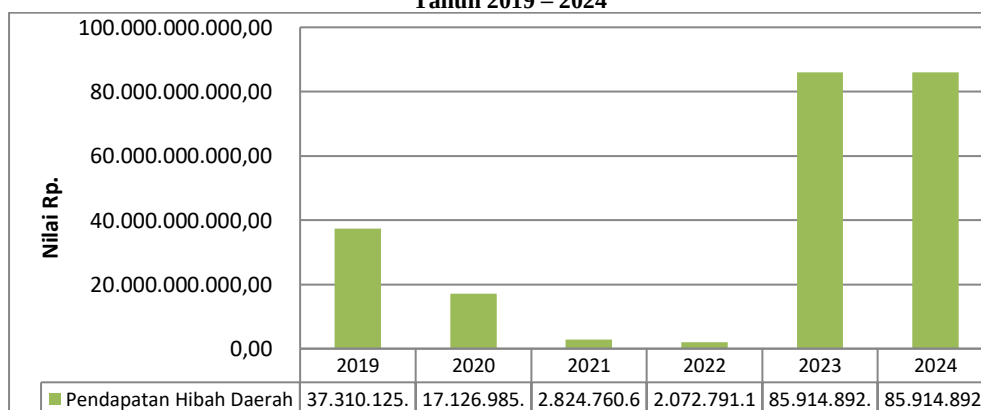
Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

2. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga;
3. Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri kegiatannya telah diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga;
4. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri, kegiatannya dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Daerah;
5. Hibah diberikan kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga terkait;
6. Hibah yang berasal dari dalam negeri dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Hibah, sementara yang berasal dari Luar Negeri dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) antara Pemerintah dan Pemberi Hibah Luar Negeri. Hibah tersebut diteruskan oleh Pemerintah kepada Daerah. Penerusannya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPPH) antara Pemerintah dengan Daerah.
Dalam pengelolaan hibah, daerah berkewajiban untuk:
 1. Menyediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran pekerjaan apabila hibah berupa jasa konsultan dan jasa lainnya. Apabila Daerah tidak mengganggu kegiatan, pencairan hibah tidak dapat dilakukan;
 2. Dana pendamping dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD).

Tahun 2023 Pendapatan Hibah yang diterima dari Badan Usaha Swasta (Pihak Ketiga) yang diperoleh Kabupaten Katingan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, menurunnya Pendapatan Hibah tahun ini disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID 19. Jika dilihat pada Gambar 3.1.10 menggambarkan naik turunnya Pendapatan Hibah yang diperoleh selama tahun tertentu. Pendapatan Hibah Daerah Kabupaten Katingan yang diterima Pemerintah untuk tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, sedangkan di tahun 2019 Pendapatan Hibah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan pada tahun 2023 Pendapatan Hibah kembali mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Gambar 3.1.10
Pendapatan Hibah Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2019 – 2024





3.1.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi.

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU.

3.1.3.1 Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah yaitu :

1. Bersifat pajak, dan bukan retribusi.
Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam UU, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah objek pajak sulit untuk dipindahkan. Contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet. Sedangkan yang dimaksud dengan hanya melayani masyarakat di wilayah tertentu adalah bahwa beban pajaknya hanya ditanggung oleh masyarakat lokal, contoh : Pajak Penerangan Jalan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau pusat.
5. Potensinya memadai.
Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
 - a. Aspek keadilan, antara lain, objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak, tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak, objek atau subjek atau dasar pengenaan pajak tidak membedakan (klasifikasi) orang pribadi atau badan tanpa alasan yang kuat.
 - b. Aspek kemampuan masyarakat, artinya pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

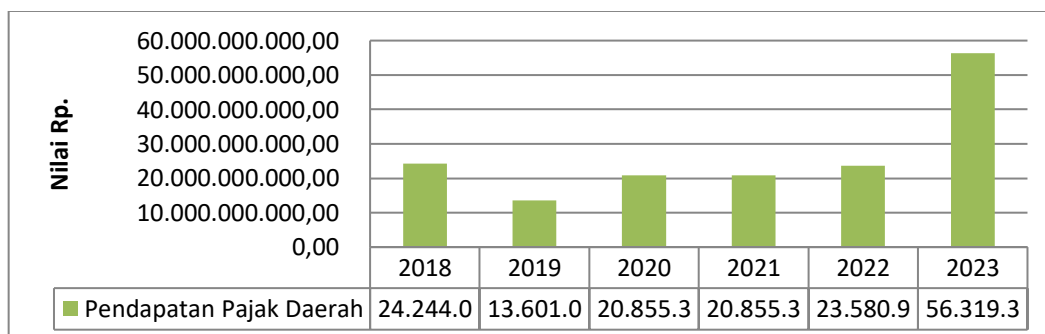
Pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Penerimaan pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dapat dilihat pada grafik 3.1.11 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Katingan diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tahun 2024 Sektor Pajak Pajak Penerangan Jalan paling besar memberikan kontribusi, kemudian diikuti oleh sektor Pajak Restoran di posisi kedua dan Pajak Penerangan Jalan di posisi ketiga. Sektor Pajak PBB-P2 dan BPHTB menempati urutan keempat dan kelima dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak daerah, diikuti Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Reklame di posisi keenam dan ketujuh serta Pajak Hotel di urutan kedelapan, sedangkan Pajak Air Tanah merupakan sektor yang memberikan kontribusi terkecil.

Secara keseluruhan Pendapatan pajak yang diterima Kabupaten Katingan mengalami penurunan pada tahun 2023 jika dibandingkan pada tahun 2018 dan 2020.

Gambar 3.1.11
Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2019 – 2024



3.1.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri atas tiga golongan, yaitu:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan Perda, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dapat menetapkan jenis retribusi lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria Retribusi Daerah yaitu:

I. Retribusi Jasa Umum

- a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

II. Retribusi Jasa Usaha

- a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemda.

III. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
- c. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi harus diatur dengan Perda, juga dimuat ketentuan atau



Pemerintah Kabupaten Katingan

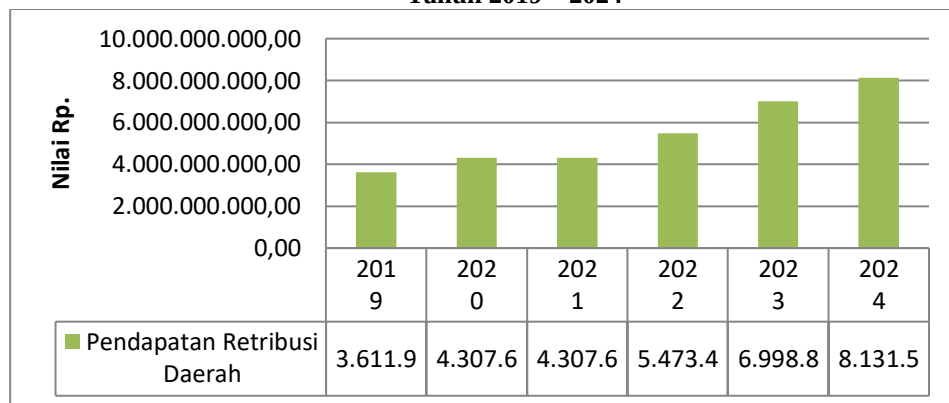
Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

materi yang harus diatur dalam Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi Bagi Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari ketiga sektor Retribusi tersebut, Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi yang sangat besar, diikuti oleh Retribusi Jasa Usaha dan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

Pada Gambar 3.1.12 menunjukkan bahwa Pendapatan retribusi daerah Kabupaten Katingan tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah untuk Pemerintah Kabupaten Katingan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024 pendapatan retribusi daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, sedangkan untuk tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah tahun 2023.

Gambar 3.1.12
Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2019 – 2024



3.1.4 Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

3.1.4.1 Pengertian Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah, sedangkan pertanggungjawabannya kepada Kementerian/Lembaga yang memberikan Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana. Dana yang diberikan untuk mendanai sebagian kewenangan yang dilimpahkan merupakan Dana Dekonsentrasi yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi Vertikal Pusat di daerah.

Demikian pula dengan Tugas Pembantuan, dimana setiap adanya penugasan dari Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah akan diikuti dengan pemberian dana. Dana yang diberikan untuk mendanai penugasan merupakan Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Hal ini berarti bahwa Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi/kabupaten/kota



dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

3.1.4.2 Penganggaran Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Penganggaran pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Untuk Dana Dekonsentrasi, Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-K/L yang telah ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) kepada Gubernur. Setelah menerima RKA-K/L, Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi yang terdiri dari Perangkat Daerah (PD), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya minggu pertama bulan Desember pada tahun berjalan. RKA-K/L tersebut juga diberitahukan oleh Gubernur kepada DPRD Provinsi pada saat pembahasan RAPBD untuk tujuan sinkronisasi program dan kegiatan yang akan didanai dari APBN dan APBD.

Untuk Dana Tugas Pembantuan, Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-K/L yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Setelah menerima RKA-K/L tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan yang terdiri dari PD selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran, dan menyampaikannya kepada Kementerian/Lembaga selambat-lambatnya minggu pertama bulan Desember pada tahun berjalan. RKA-K/L tersebut juga diberitahukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD untuk tujuan sinkronisasi program dan kegiatan yang akan didanai dari APBN dan APBD.

3.1.4.3 Penyaluran Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui Rekening Kas Umum Negara.

Apabila di dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terdapat saldo, maka saldo tersebut wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara dan apabila menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

3.1.4.4 Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Kepala PD Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi dan tugas pembantuan atas nama Kepala Daerahnya wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang kepada Menteri/Pimpinan Lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

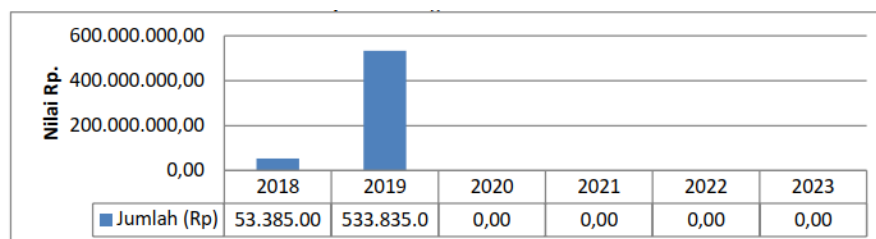
3.1.4.5 Sanksi

Dalam PP Nomor 7 Tahun 2008 menyebutkan bahwa PD yang secara sengaja atau lalai dalam menyampaikan laporan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana untuk triwulan berikutnya atau penghentian alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya. Pengenaan sanksi tersebut tidak membebaskan PD dari kewajiban menyampaikan laporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2008.

Pengenaan sanksi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat setelah menerima rekomendasi/usulan dari Menteri/Lembaga teknis terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dana Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur, untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan dan Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Pendanaan Dekon dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatan bersifat nonfisik, sedangkan pendanaan TP membiayai kegiatan yang bersifat fisik yang ditujukan kepada Gubernur/Walikota/Bupati selaku kepala daerah otonom.

Penerimaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten Katingan sangat fluktuatif, artinya dari tahun ke tahun mengalami naik turun dan Dana Tugas Pembantuan terdiri dari Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, jika dilihat dari Gambar 3.1.13 sedangkan untuk tahun 2019, 2020 dan 2023 dimana anggaran tersebut tidak ada disetiap PD.

Gambar 3.1.13
Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bagi Pemerintah
Kabupaten Katingan Tahun 2019 – 2024





3.2 Kebijakan Keuangan

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tertuang dalam RKPD 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2018 – 2023 di tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dan kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Selanjutnya untuk Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Katingan dan Kerangka Pendanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksud untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk mencapai target yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan mengarahkan kebijakan Pendapatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuh-kembangnya dunia usaha;
2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah;
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah;
4. Peningkatan dan pengembangan manajemen BUMD;



5. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia pengelola Pendapatan Daerah;
6. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah; dan
7. Memperbaiki sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun 2024, antara lain dari SiLPA tahun sebelumnya, serta diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lainnya.

Komponen penyediaan Dana di sektor Penerimaan Pembiayaan difokuskan pada dua aspek yaitu pertama, memprediksi kemampuan penerimaan yang akan dicapai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan. Kedua, estimasi efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2024 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. Dari kedua aspek ini akan menghasilkan angka-angka yang dikelompokkan menjadi komponen SiLPA tahun 2024, sebagai penunjang sektor penerimaan pembiayaan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Dalam penyusunan APBD pemanfaatan segala potensi dengan penggunaan sumber daya harus secara efisien, efektif dan optimal. Sehingga perlu didasari oleh prinsip-prinsip anggaran yang memungkinkan terjadinya surplus, namun bilamana dipandang perlu dengan mengingat kepentingan pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Katingan bisa melakukan melakukan penganggaran yang melebihi kapasitas keuangannya atau defisit.

3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran.



Kebijakan Belanja tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif melalui upaya antara lain:

1. Mengupayakan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 amandemen IV dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif;
3. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan prioritas menekan angka kemiskinan;
4. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
6. Memantapkan infrastruktur transportasi dan pengelolaan persampahan serta sarana prasarana dasar;
7. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa terpadu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat;
8. Mendorong pengembangan pariwisata yang akan mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi;
9. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet dan service mobil);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, dan perencanaan; dan
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah.
10. Untuk Belanja Tidak Terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan untuk peristiwa-peristiwa tidak terduga seperti penanganan bencana alam dan kebijakan nasional untuk penanganan pandemi COVID 19.

3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan TA 2024 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Perangkat Daerah sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

APBD Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2024 ditetapkan melalui Perda Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang APBD TA 2024 dan Perbup Nomor 43 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2024 tentang



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Penjabaran APBD TA 2024. Pada Tahun 2024 terjadi tiga kali pergeseran dan atau perubahan APBD sebagai berikut:

1. Tahap I melalui Perbup Katingan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 24 Maret 2024 yang menetapkan perubahan Anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal;
2. Tahap II melalui Perbup Katingan Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 yang menetapkan perubahan Anggaran Belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga; dan
3. Tahap III melalui Perbup Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tanggal 1 November 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024, yang menetapkan perubahan Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Daerah, Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, dan Pembiayaan Penerimaan.

Pergeseran dan atau perubahan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Daerah yaitu bersumber dari TDF sebesar Rp154.559.111.000,00, Insentif DD, sebesar Rp4.293.345.000,00, dan dari IF sebesar Rp5.890.545.000,00.
2. Penyesuaian belanja mengikat dan belanja Earmarking, pada pos Belanja Daerah, yaitu:
 - a. Kekurangan Gaji ASN di beberapa SKPD di Kabupaten Katingan,
 - b. Belanja earmarking yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya seperti belanja Insentif DD dan Insentif Fiskal;
 - c. Penambahan Belanja Prioritas Daerah yang bersifat Wajib antara lain:
 - d. Penguatan anggaran pengawasan APIP;
 - e. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor;
 - f. Penyesuaian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa;
 - g. Penyesuaian Kekurangan Iuran Kesehatan PNS Kabupaten Katingan,
 - h. Perencanaan DAK untuk TA 2025;
 - i. Penyesuaian kekurangan Gaji dan Tunjangan untuk PHL Nakes, Gaji Pegawai Tugsus (Penugasan Khusus Daerah) di 16 Puskesmas;
 - j. Penguatan SPM Kesehatan, Pemeliharaan Ambulance serta penyesuaian SiLPA BLUD dan SiLPA Kapitasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
 - k. Pelaksanaan Evaluasi Pj Bupati;
 - l. Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan sumber pendanaannya untuk Pajak Rokok Provinsi (Layanan Kesehatan dan Penegakan Hukum);
 - m. Kegiatan Penanganan Sampah dan BBM truck pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - n. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK TA 2024 pada BKPSDM Kabupaten Katingan;
 - o. Dukungan terhadap Pekerja Rentan (BPJS Tenagakerja);
 - p. Dukungan terhadap sarpras bidang pendidikan dalam rangka pencapaian indikator SPM Pendidikan;
 - q. Penyesuaian Gaji dan Tunjangan SKPD, Gaji PHL pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup.

Rincian atas pergeseran dan atau perubahan tersebut sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 3.3.1
Rincian Pergeseran dan/atau Perubahan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran		Kenaikan/ Penurunan
		Perda APBD	Perkada Pergeseran III	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = d - c</i>
A	PENDAPATAN	1.505.381.075.534,00	1.670.124.076.534,00	164.743.001.000,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.959.495.534,00	117.959.495.534,00	0,00
	Pendapatan Pajak Daerah	49.876.586.982,00	49.876.586.982,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	6.556.973.058,00	6.556.973.058,00	0,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.192.215.980,00	20.192.215.980,00	0,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	41.333.719.514,00	41.333.719.514,00	0,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.387.371.580.000,00	1.552.114.581.000,00	164.743.001.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.324.167.580.000,00	1.488.910.581.000,00	164.743.001.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.204.000.000,00	63.204.000.000,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
B	BELANJA	1.592.124.885.638,00	1.726.720.071.534,00	134.595.185.896,00
1	BELANJA OPERASI	993.847.263.922,00	1.103.509.571.207,18	109.662.307.285,18
	Belanja Pegawai	492.384.917.556,00	579.390.704.751,00	87.005.787.195,00
	Belanja Barang dan Jasa	392.605.509.720,00	412.475.281.252,78	19.869.771.532,78
	Belanja Subsidi	2.080.150.000,00	2.680.150.000,00	600.000.000,00
	Belanja Hibah	102.780.826.310,00	105.685.085.505,40	2.904.259.195,40
	Belanja Bantuan Sosial	3.995.860.336,00	3.278.349.698,00	(717.510.638,00)
2	BELANJA MODAL	369.624.738.192,00	387.781.730.490,82	18.156.992.298,82
	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.296.054.030,00	112.913.340.540,54	19.617.286.510,54
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.249.625.540,00	162.045.369.748,00	(1.204.255.792,00)
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	111.211.937.622,00	110.735.899.202,28	(476.038.419,72)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.331.000,00	236.331.000,00	220.000.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	350.790.000,00	350.790.000,00	0,00
3	BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000,00	8.232.227.250,00	(1.767.772.750,00)
	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	8.232.227.250,00	(1.767.772.750,00)
4	BELANJA TRANSFER	218.652.883.524,00	227.196.542.586,00	8.543.659.062,00
	Transfer Bagi Hasil	2.230.692.724,00	6.481.006.786,00	4.250.314.062,00
	Transfer Bantuan Keuangan	216.422.190.800,00	220.715.535.800,00	4.293.345.000,00
C	SURPLUS/DEFISIT	(86.743.810.104,00)	(56.595.995.000,00)	30.147.815.104,00
D	PEMBIAYAAN	86.743.810.104,00	56.595.995.000,00	(30.147.815.104,00)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.743.810.104,00	56.595.995.000,00	(30.147.815.104,00)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.743.810.104,00	56.595.995.000,00	(30.147.815.104,00)
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
E	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00	0,00

Atas pergeseran dan atau perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan:

1. Telah menetapkan KUPA PPAS tanggal 23 September 2024 dan ditindaklanjuti dengan menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2024 yang disampaikan kepada DPRD pada tanggal 25 September 2024;
2. Melakukan permintaan fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

3. Melalui surat Nomor 900.1.12.1/75/TAPD/ XI/2024 tanggal 7 November 2024, telah memberitahukan kepada pihak DPRD Kabupaten Katingan bahwa telah menerbitkan Perkada Penjabaran APBD Kabupaten Katingan TA 2024 Pemerintah Kabupaten Katingan.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama TA 2024 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp1.585.146.376.811,46 atau 94,91 persen dari anggaran sebesar Rp1.670.124.076.534,00. PD yang mengelola pendapatan sebanyak 33 PD dari 39 PD yang ada di Kabupaten Katingan sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

Tabel 3.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	17.000.000,00	107.700.000,00	633,53	43.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	27.852.400.000,00	33.193.626.290,00	119,18	27.364.149.099,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	839.000.000,00	1.556.121.299,00	185,47	363.938.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	500.000.000,00	-	0,00	534.306.324,00
6	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	35.000.000,00	167.450.000,00	478,43	55.400.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	575.000.000,00	513.412.000,00	89,29	441.005.500,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.000.000,00	7.700.000,00	154,00	367.120.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	690.315.600,00	581.525.000,00	84,24	751.510.000,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	378.557.000,00	437.156.000,00	115,48	422.794.000,00
13	Dinas Katahanan Pangan dan Pertanian	326.000.000,00	499.906.230,00	153,35	597.263.540,00
14	Sekretariat Daerah	3.856.000.000,00	9.009.960.161,00	233,66	5.019.516.643,85
15	Sekretariat DPRD	26.700.000,00	27.850.000,00	104,31	26.700.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	66.300.000,00	118.250.000,00	178,36	90.350.000,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.552.185.781.458,00	1.508.989.314.600,00	97,22	1.307.747.322.971,00
18	Badan Pendapatan Daerah	80.821.522.476,00	29.060.045.100,46	35,96	60.993.811.790,83
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00	17.100.000,00	114,00	15.200.000,00
20	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.674.500.000,00	606.017.841,00	36,19	1.063.730.994,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
21	Kecamatan Katingan Kuala	20.000.000,00	20.800.000,00	104,00	20.100.000,00
22	Kecamatan Mendawai	20.000.000,00	25.406.400,00	127,03	22.488.000,00
23	Kecamatan Kamipang	20.000.000,00	20.170.000,00	100,85	17.370.000,00
24	Kecamatan Tasik Payawan	20.000.000,00	22.700.000,00	113,50	20.000.000,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00	20.250.000,00
26	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	20.000.000,00	34.140.000,00	170,70	24.340.000,00
27	Kecamatan Pulau Malan	20.000.000,00	10.500.000,00	52,50	11.400.000,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	20.000.000,00	55.400.000,00	277,00	27.190.000,00
29	Kecamatan Sanaman Matikei	20.000.000,00	23.100.000,00	115,50	21.100.000,00
30	Kecamatan Marikit	20.000.000,00	22.222.000,00	111,11	20.102.000,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	20.000.000,00	20.500.000,00	102,50	27.500.000,00
32	Kecamatan Petak Malai	20.000.000,00	9.931.890,00	49,66	7.697.900,00
33	Kecamatan Bukit Raya	20.000.000,00	20.107.500,00	100,54	20.125.000,00
JUMLAH		1.670.124.076.534,00	1.585.199.112.311,46	94,92	1.406.156.781.762,68

Urusan pemerintah dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Katingan dilaksanakan oleh 39 Perangkat Daerah. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp1.726.720.071.534,00 dan terealisasi sebesar Rp1.587.136.172.743,01 atau 91,92 persen, Rincian belanja per PD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja - LRA per PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	443.128.029.132,00	381.696.278.676,95	86,1	338.661.002.083,75
2	Dinas Kesehatan	369.060.754.700,00	357.531.600.462,31	96,9	271.825.273.003,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134.565.352.446,00	127.691.397.298,91	94,9	139.349.526.096,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	35.452.272.736,00	33.530.192.411,00	94,6	56.216.170.310,00
5	Dinas Sosial	9.562.936.200,00	7.840.024.988,00	82	7.720.841.549,00
6	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12.732.317.172,00	11.348.467.025,00	89,1	9.437.722.150,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.253.965.824,00	11.486.153.820,00	86,7	11.101.946.064,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	18.542.066.160,00	17.655.044.143,00	95,2	15.402.308.286,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.420.678.759,00	11.140.130.588,00	97,5	9.654.051.350,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	9.170.435.677,00	7.945.609.589,00	86,6	8.637.850.178,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.928.313.412,00	8.914.102.264,00	89,8	9.817.494.065,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	18.179.774.442,00	17.214.604.498,00	94,7	22.358.829.606,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.285.146.792,00	14.903.530.913,00	77,3	13.196.687.467,00
14	Sekretariat Daerah	65.271.346.746,00	60.884.288.475,00	93,3	59.382.030.165,00
15	Sekretariat DPRD	56.100.469.253,00	45.239.597.556,00	80,6	43.879.360.887,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	13.056.414.962,00	11.337.510.123,00	86,8	10.237.316.777,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	290.457.249.537,00	274.516.845.980,58	94,5	254.051.621.132,00
18	Badan Pendapatan Daerah	11.365.578.409,00	10.664.567.293,25	93,8	10.526.896.193,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.044.583.079,00	9.917.219.894,00	89,8	10.056.282.890,00
20	Dinas Perhubungan dan Perikanan	13.420.942.630,00	12.835.619.220,00	95,6	15.199.165.493,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	4.769.220.183,00	4.389.805.469,00	92	4.326.514.796,00
22	Kecamatan Mendawai	2.869.084.655,00	2.684.883.318,00	93,6	2.556.737.610,00
23	Kecamatan Kamipang	3.829.449.331,00	3.802.580.656,00	99,3	3.365.489.600,00
24	Kecamatan Tasik Payawan	3.290.941.019,00	3.121.165.327,00	94,8	2.771.414.455,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	6.863.032.494,00	6.500.092.860,00	94,7	5.715.564.924,00
26	Kecamatan Tewang S. Garing	5.434.389.688,00	5.185.597.325,00	95,4	4.919.003.505,00
27	Kecamatan Pulau Malan	3.775.506.047,00	3.553.729.345,00	94,1	3.418.501.193,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	5.507.211.032,00	4.996.302.411,00	90,7	5.031.276.104,00
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	3.618.048.323,00	3.503.444.121,00	96,8	2.427.625.892,00
30	Kecamatan Marikit	2.839.558.215,00	2.660.424.321,00	93,7	2.402.327.424,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	4.233.853.693,00	4.103.094.026,50	96,9	3.947.901.660,00
32	Kecamatan Petak Malai	2.754.665.616,00	2.343.577.777,00	85,1	2.169.641.657,00
33	Kecamatan Bukit Raya	2.882.070.627,00	2.511.190.273,00	87,1	1.999.971.116,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.377.522.968,00	34.152.900.490,00	96,5	22.861.112.432,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	33.818.703.808,00	33.109.895.323,00	97,9	26.528.316.504,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
36	Badan Penanggulangan bencana Daerah	9.768.567.407,00	8.200.853.033,00	84	8.342.913.124,00
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.567.942.527,00	7.383.448.057,00	97,6	5.982.468.700,00
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.581.780.376,00	8.274.767.939,97	96,4	9.211.787.601,00
39	Inspektorat	13.939.895.457,00	12.373.797.618,00	88,8	11.401.180.244,00
Jumlah		1.726.720.071.534,00	1.587.144.334.909,47	91,92	1.446.092.124.285,78

Komposisi pendanaan APBD Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 didominasi oleh pendanaan dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.456.801.628.468,00 atau sebesar 81,86% dari total APBD, diikuti oleh pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp68.115.931.671,46 atau sebesar 6,44% dari total APBD, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah/Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp52.166.886.132,00 atau 4,17% dari total APBD, serta terakhir dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Hibah sebesar Rp8.061.930.540,00 atau sebesar 0,03% dari total APBD.

Pendanaan tersebut dialokasikan untuk belanja-belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah berdasarkan prioritas-prioritas yang ditetapkan baik itu oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Beberapa bentuk belanja yang dijadikan prioritas di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang diatur oleh undang-undang, tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun *mandatory spending* yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- Bidang Pendidikan, berdasarkan aturan perundangan alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan adalah minimal 20% dari perhitungan APBD. Di tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Katingan mengalokasikan Rp460.138.120.824 atau sebesar 26,65% untuk alokasi anggaran fungsi pendidikan, dengan realisasi belanja sebesar Rp347.238.196.637,51 atau 78,36% dari alokasi yang disediakan.
- Bidang Kesehatan, berdasarkan aturan perundangan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan adalah minimal 10% dari perhitungan APBD diluar belanja pegawai/gaji. Di tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Katingan mengalokasikan Rp362.013.710.163 atau sebesar 26,36 % untuk alokasi anggaran fungsi kesehatan, dengan realisasi belanja sebesar Rp357.531.600.462,31 atau 96,88% dari alokasi yang disediakan.
- Bidang Pengawasan, berdasarkan aturan perundangan alokasi anggaran belanja untuk bidang pengawasan adalah minimal 0.75% dari perhitungan APBD. Di tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Katingan mengalokasikan Rp7.792.832.946 atau sebesar 0,45% untuk alokasi anggaran fungsi pengawasan, dengan realisasi belanja sebesar Rp3.756.196.829,00 atau 48,20% dari alokasi yang disediakan.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- d. Bidang Infrastruktur, berdasarkan aturan perundangan alokasi anggaran belanja untuk bidang infrastruktur adalah minimal 40% dari alokasi Dana Perimbangan. Di tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Katingan mengalokasikan Rp745.786.359.404 atau sebesar 49,73% dari alokasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.317.897.063.468,00 untuk alokasi anggaran fungsi infrastruktur
2. Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh pemerintah kabupaten yang disalurkan kepada desa dengan persentase sebesar 5,6%. Pada APBD TA. 2024 besaran alokasi Dana Desa sebesar Rp87.456.515.800,00 dengan realisasi penyaluran sebesar Rp87.006.030.280 atau 99,48%.
3. Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2024
Berdasarkan PMK No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2024, pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk tahun 2024 guna mendukung program penanganan dampak inflasi. Pemerintah Kabupaten Katingan menganggarkan sebesar Rp1.767.772.750,00 untuk belanja wajib perlindungan sosial tersebut sesuai dengan formulasi dan petunjuk penggunaan dalam PMK yang antara lain digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyelenggaraan pasar murah, dan pemberian bantuan di bidang pertanian.



IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Kabupaten Katingan adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. PD bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan PD yang bertindak Perangkat Daerah (PD) adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh PD. Dan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi (34), dan seluruh kabupaten/kota.

Entitas pelaporan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan sudah mengarah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi merupakan pilihan teknik akuntansi yang berpengaruh besar terhadap informasi keuangan yang akan dihasilkan oleh setiap organisasi, termasuk instansi pemerintah. Pilihan basis akuntansi menentukan kapan dampak keuangan suatu transaksi atau kejadian lainnya diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.



Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Aset dicatat sebagai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebagai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan Yang Ada di Dalam SAP

Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan menerapkan SAP Berbasis Akrual, terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, terdiri dari:
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 01);
 - c. Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 02);
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Kebijakan Akuntansi 02);
 - e. Neraca (Kebijakan Akuntansi 03);
 - f. Laporan Operasional (Kebijakan Akuntansi 04);
 - g. Laporan Perubahan Ekuitas (Kebijakan Akuntansi 04);
 - h. Laporan Arus Kas (Kebijakan Akuntansi 05); dan
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 06).
 2. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
 - a. Akuntansi Kas dan Setara Kas (Kebijakan Akuntansi 07)

Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiahnya dan apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Penyajian saldo kas dan setara kas termuat dalam Neraca dan Laporan Arus Kas, mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena merupakan bagian dari manajemen kas.
 - b. Akuntansi Piutang (Kebijakan Akuntansi 08)

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah atau surat penagihan lainnya dan belum dilunasi, pengukurannya disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian piutang dilakukan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nominal piutang dengan penyisihan piutang yang dikelompokkan menjadi empat kategori kualitas yaitu:
- 1) Kualitas piutang lancar dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 0,5% dari nilai piutang;
 - 2) Kualitas piutang kurang lancar dengan kriteria umur piutang 1 – 2 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 10% dari nilai piutang;



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- 3) Kualitas piutang diragukan dengan kriteria umur piutang 3 – 5 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 50% dari nilai piutang; dan
 - 4) Kualitas piutang kurang lancar dengan kriteria umur piutang lebih dari 5 tahun serta tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 100% dari nilai piutang.
- c. Akuntansi Investasi (Kebijakan Akuntansi 09)
- Suatu pengeluaran pemerintah dapat diakui sebagai investasi apabila di masa mendatang terdapat kemungkinan pemerintah akan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, atau jasa potensial serta nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal. Berdasarkan tingkat likuiditasnya investasi dibagi menjadi dua kategori yaitu investasi jangka pendek (dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama maksimal 12 bulan) dan investasi jangka panjang (dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan). Pengukuran investasi dilakukan berdasarkan nilai/biaya perolehan dan apabila tidak memungkinkan akan diukur berdasarkan nilai wajar. Metode penilaian investasi didasarkan pada prosentase kepemilikan dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Kepemilikan < 20% menggunakan metode biaya;
 - 2) Kepemilikan 20 – 50% atau < 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan
 - 3) Kepemilikan > 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Akuntansi Persediaan (Kebijakan Akuntansi 10)
- Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pada umumnya metode penilaian persediaan yang dilakukan adalah metode FIFO (*First in First out*) dan metode pencatatan yang digunakan adalah metode periodik. Pengukuran persediaan dilakukan pada saat akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi. Selain persediaan berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang masih dalam proses produksi, barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat juga dicatat sebagai persediaan.
- e. Akuntansi Aset Tetap (Kebijakan Akuntansi 11)
- Aset tetap diklasifikasikan dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu berupa barang berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur dengan andal, diperoleh/dibangun dengan maksud digunakan sendiri serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain dalam operasi normal entitas, nilainya memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan. Pengukuran aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan atau apabila tidak memungkinkan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, kecuali aset tetap tanah,



konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan.

- f. **Akuntansi Aset Lainnya (Kebijakan Akuntansi 12)**
Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Secara umum aset lainnya diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, serta kepemilikan atau penguasaannya berpindah berdasarkan dokumen yang sesuai dan sah. Tagihan penjualan angsuran dan tagihan kerugian daerah dinilai berdasarkan nilai nominal dalam dokumen yang resmi dikurangi dengan nilai angsuran atau setoran yang telah dilakukan ke kas umum daerah. Kemitraan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai aset yang diserahkan yang dicatat terpisah dari aset tetap. Aset tak berwujud dinilai berdasarkan nilai perolehan dikurangi nilai amortisasi yang dihitung berdasarkan metode garis lurus. Aset Lain-Lain disajikan berdasarkan nilai buku berupa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjamkan kepada unit pemerintah lain, atau aset yang diserahkan kepada pihak lain tetapi belum ada dokumen penyerahannya.
- g. **Akuntansi Dana Cadangan (Kebijakan Akuntansi 13)**
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan berdasarkan peraturan daerah dan diakui pada saat terbitnya SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pengukuran dana cadangan berdasarkan nominal kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan tersebut. Dana cadangan disajikan dalam neraca kelompok aset non lancar, pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA – Penerimaan Pembiayaan dan Laporan Arus Kas – arus masuk kas dari aktivitas investasi, pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA – Pengeluaran Pembiayaan dan laporan arus kas – arus keluar kas dari aktivitas investasi, sedangkan pendapatan dari hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam Pendapatan LO-Lain-Lain PAD yang Sah.
- h. **Akuntansi Kewajiban (Kebijakan Akuntansi 14)**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek (diselesaikan dalam tempo kurang dari 12 bulan), dan kewajiban jangka panjang (diselesaikan dalam tempo lebih dari 12 bulan). Kewajiban diakui apabila besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas nilai kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara andal. Kewajiban diukur dan dicatat sebesar nominal kewajiban yang belum dibayar.
- i. **Akuntansi Pendapatan-Laporan Operasional dan Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 15)**



Pendapatan Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada tahun anggaran berjalan. Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan tersebut direalisasikan dengan masuknya sumber daya ekonomi yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Pengakuan pendapatan - LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas tahun berjalan atau diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Pendapatan - LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan nilai pendapatan bruto tanpa dikompensasi dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum anggaran yang menambah Saldo Anggaran Lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening kas umum daerah (RKUD) atau kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, atau kas atas pendapatan tersebut telah diterima dan langsung digunakan tanpa disetorkan ke RKUD dengan syarat telah dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Pendapatan – LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

j. Akuntansi Beban dan Belanja (Kebijakan Akuntansi 16)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, timbulnya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur sesuai dengan nilai perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi apabila nilai perolehan tidak diperoleh.

Belanja-LRA adalah semua pengeluaran dari RKUD dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran berjalan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta belanja transfer. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD, pada saat pengeluaran dari bendahara pengeluaran disahkan oleh unit perbendaharaan. Pengukuran belanja mempergunakan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

k. Akuntansi Transfer (Kebijakan Akuntansi 17)

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk pada LRA diakui pada saat tanggal transfer masuk ke RKUD, sedangkan transfer masuk-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

ketetapan/dokumen yang sah atau saat pendapatan direalisasikan dan diukur berdasarkan nilai nominal pada dokumen atau nominal yang masuk pada RKUD. Transfer keluar pada LRA diakui saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar dan diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum disana, sedangkan transfer keluar pada LO diakui pada saat terbitnya SP2D atau saat terbitnya dokumen yang menyatakan kewajiban pemda kepada entitas lainnya dan diukur berdasarkan nilai nominal dalam dokumen tersebut.

l. Akuntansi Pembiayaan (Kebijakan Akuntansi 18)

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan dari RKUD dan diukur berdasarkan azas bruto.

m. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan (Kebijakan Akuntansi 19)

Koreksi atas kesalahan dapat disebabkan antara lain oleh keterlambatan bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan atau interpretasi. Terhadap kesalahan segera dilakukan koreksi segera setelah diketahui pada akun yang bersangkutan dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi dapat berupa perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode serta estimasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan dalam Laporan perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.



V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah Pendapatan Daerah yang diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
2. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai Pendapatan Daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Pendapatan kas yang diterima PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerimaan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakui sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengukuran terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pemerintah Kabupaten Katingan menyajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tanggal 1 November 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Katingan telah melakukan perubahan/pergeseran APBD TA 2024 tanpa melalui penetapan Perda Perubahan APBD dan persetujuan DPRD Kabupaten Katingan. Hal tersebut disebabkan belum terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Katingan. Perubahan/pergeseran atas APBD Pokok sebagai berikut:

1. Pos Pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp164.743.001.000,00 yang terdiri dari Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp154.559.111.000,00, Insentif Dana Desa (DD) sebesar Rp4.293.345.000,00 dan Insentif Fiskal (IF) sebesar Rp5.890.545.000,00;
2. Pos Belanja Daerah bertambah sebesar Rp134.595.185.896,00 yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp86.003.161.062,00, Insentif Dana Desa sebesar Rp4.293.345.000,00, Insentif Fiskal sebesar Rp5.890.545.000,00, dan Belanja Wajib dan Prioritas Daerah sebesar Rp38.408.134.834,00; dan
3. Pos Pembiayaan Daerah berkurang sebesar Rp30.147.815.104,02

Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.1.1	Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.585.199.112.311,46	1.406.156.781.762,68

Jumlah anggaran Pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.670.124.076.534,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan TA 2024. Pendapatan ini terealisasi sebesar Rp1.585.199.112.311,46 atau 94,92%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.670.124.076.534,00 Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.1
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	117.959.495.534,00	68.168.667.171,46	57,79	97.945.340.251,68
Pendapatan Transfer – LRA	1.552.114.581.000,00	1.508.968.514.600,00	97,22	1.307.710.177.971,00
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	50.000.000,00	8.061.930.540,00	16123,86	501.263.540,00
Jumlah	1.670.124.076.534,00	1.585.199.112.311,46	94,92	1.406.156.781.762,68

Tabel 5.1.2
Realisasi Pendapatan berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan	17.000.000,00	107.700.000,00	633,53	43.000.000,00
Dinas Kesehatan	7.852.400.000,00	10.974.818.369,00	139,76	8.801.918.190,00
BLUD RSUD Mas Amsyar	20.000.000.000,00	22.218.807.921,00	111,09	18.562.230.909,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	839.000.000,00	1.556.121.299,00	185,47	363.938.000,00
Dinas Perumahan, Rakyat dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	500.000.000,00	0,00	0,00	534.306.324,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	35.000.000,00	167.450.000,00	478,43	55.400.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	575.000.000,00	513.412.000,00	89,29	441.005.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.000.000,00	7.700.000,00	154,00	367.120.000,00
Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	690.315.600,00	581.525.000,00	84,24	751.510.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	378.557.000,00	437.156.000,00	115,48	422.794.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	326.000.000,00	499.906.230,00	153,35	597.263.540,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Katingan Kuala	20.000.000,00	20.800.000,00	104,00	20.100.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Kecamatan Kamipang	20.000.000,00	20.170.000,00	100,85	17.370.000,00
Kecamatan Tasik Payawan	20.000.000,00	22.700.000,00	113,50	20.000.000,00
Kecamatan Katingan Hilir	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00	20.250.000,00
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	20.000.000,00	34.140.000,00	170,70	24.340.000,00
Kecamatan Pulau Malan	20.000.000,00	10.500.000,00	52,50	11.400.000,00
Kecamatan Katingan Tengah	20.000.000,00	55.400.000,00	277,00	27.190.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei	20.000.000,00	23.100.000,00	115,50	21.100.000,00
Kecamatan Marikit	20.000.000,00	22.222.000,00	111,11	20.102.000,00
Kecamatan Katingan Hulu	20.000.000,00	20.500.000,00	102,50	27.500.000,00
Kecamatan Mendawai	20.000.000,00	25.406.400,00	127,03	22.488.000,00
Kecamatan Bukit Raya	20.000.000,00	20.107.500,00	100,54	20.125.000,00
Kecamatan Petak Malai	20.000.000,00	9.931.890,00	49,66	7.697.900,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	66.300.000,00	118.250.000,00	178,36	90.350.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	1.552.185.781.458,00	1.508.989.314.600,00	97,22	1.307.747.322.971,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00	17.100.000,00	114,00	15.200.000,00
Sekretariat DPRD	26.700.000,00	27.850.000,00	104,31	26.700.000,00
Badan Pendapatan Daerah	80.821.522.476,00	29.060.045.100,46	35,96	60.993.811.790,83
Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.674.500.000,00	606.017.841,00	36,19	1.063.730.994,00
Sekretariat Daerah	3.856.000.000,00	9.009.960.161,00	233,66	5.019.516.643,85
Jumlah	1.670.124.076.534,00	1.585.199.112.311,46	94,92	1.406.156.781.762,68

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.406.156.781.762,68 realisasi pencapaian target pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp1.585.199.112.311,46 mengalami kenaikan sebesar Rp179.042.330.548,78.

Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Meningkatnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diakibatkan situasi perekonomian mulai bangkit setelah pandemi Covid-19 dan meningkatnya upaya penagihan yang dilakukan sepanjang tahun 2024; dan
2. Naiknya penerimaan dari Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	68.168.667.171,46	97.945.340.251,68

Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari:

Tabel 5.1.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	49.876.586.982,00	22.060.219.369,80	44,23	56.319.360.172,05
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	6.556.973.058,00	8.184.315.989,00	124,82	6.998.837.446,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	20.192.215.980,00	4.579.510.360,83	22,68	27.049.142,65
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	41.333.719.514,00	33.344.621.451,83	80,67	34.600.093.490,98
Jumlah	117.959.495.534,00	68.168.667.171,46	57,79	97.945.340.251,68

Tabel 5.1.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan	17.000.000,00	107.700.000,00	633,53	43.000.000,00
Dinas Kesehatan	7.852.400.000,00	3.291.169.059,00	41,91	8.801.918.190,00
BLUD RSUD Mas Amsyar	20.000.000.000,00	22.218.807.921,00	111,09	18.562.230.909,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	839.000.000,00	1.556.121.299,00	185,47	363.938.000,00
Dinas Perumahan, Rakyat dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	500.000.000,00	0,00	0,00	534.306.324,00
Dinas Sosial	0	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	35.000.000,00	167.450.000,00	478,43	55.400.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	575.000.000,00	513.412.000,00	89,29	441.005.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.000.000,00	7.700.000,00	154,00	367.120.000,00
Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	690.315.600,00	581.525.000,00	84,24	751.510.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	378.557.000,00	437.156.000,00	115,48	422.794.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	276.000.000,00	121.625.000,00	44,07	96.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0,00	0,00
Kecamatan Katingan Kuala	20.000.000,00	20.800.000,00	104,00	20.100.000,00
Kecamatan Kamipang	20.000.000,00	20.170.000,00	100,85	17.370.000,00
Kecamatan Tasik Payawan	20.000.000,00	22.700.000,00	113,50	20.000.000,00
Kecamatan Katingan Hilir	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00	20.250.000,00
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	20.000.000,00	34.140.000,00	170,70	24.340.000,00
Kecamatan Pulau Malan	20.000.000,00	10.500.000,00	52,50	11.400.000,00
Kecamatan Katingan Tengah	20.000.000,00	55.400.000,00	277,00	27.190.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei	20.000.000,00	23.100.000,00	115,50	21.100.000,00
Kecamatan Marikit	20.000.000,00	22.222.000,00	111,11	20.102.000,00
Kecamatan Katingan Hulu	20.000.000,00	20.500.000,00	102,50	27.500.000,00
Kecamatan Mendawai	20.000.000,00	25.406.400,00	127,03	22.488.000,00
Kecamatan Bukit Raya	20.000.000,00	20.107.500,00	100,54	20.125.000,00
Kecamatan Petak Malai	20.000.000,00	9.931.890,00	49,66	7.697.900,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	66.300.000,00	118.250.000,00	178,36	90.350.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	71.200.458,00	20.800.000,00	29,21	37.145.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00	17.100.000,00	114,00	15.200.000,00
Sekretariat DPRD	26.700.000,00	27.850.000,00	104,31	26.700.000,00
Badan Pendapatan Daerah	80.821.522.476,00	29.060.045.100,46	35,96	60.993.811.790,83
Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.674.500.000,00	606.017.841,00	36,19	1.063.730.994,00
Sekretariat Daerah	3.856.000.000,00	9.009.960.161,00	233,66	5.019.516.643,85
Jumlah	117.959.495.534,00	68.168.667.171,46	57,79	97.945.340.251,68



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

31 Desember 2024

22.060.219.369,80

31 Desember 2023

56.319.360.172,05

Pendapatan Pajak Daerah merupakan realisasi pendapatan dari pajak daerah dalam periode TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.5
Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Objek Pajak
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Hotel – LRA	135.000.000,00	124.991.500,00	92,59	125.650.300,00
Pajak Restoran – LRA	1.265.000.000,00	1.848.738.212,80	146,15	1.765.249.135,20
Pajak Hiburan – LRA	25.000.000,00	100.000,00	0,40	17.450.000,00
Pajak Reklame – LRA	268.000.000,00	251.540.145,00	93,86	253.848.118,00
Pajak Penerangan Jalan – LRA	15.040.000.000,00	8.617.300.989,00	57,30	9.904.431.155,00
Pajak Air Tanah – LRA	30.000.000,00	4.028.970,00	13,43	28.106.012,00
Pajak Sarang Burung Walet – LRA	600.000.000,00	345.623.880,00	57,60	486.866.880,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	3.700.000.000,00	8.673.435.396,00	234,42	4.803.604.831,85
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	1.500.000.000,00	1.303.801.439,00	86,92	830.071.098,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	27.313.586.982,00	890.658.838,00	3,26	38.104.082.642,00
Jumlah	49.876.586.982,00	22.060.219.369,80	44,23	56.319.360.172,05

Pendapatan Pajak Daerah dengan target sebesar Rp 49.876.586.982,00 terealisasi sebesar Rp22.060.219.369,80 atau terealisasi 44,23% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.876.586.982,00 Pencapaian target pajak daerah diantaranya :

1. Pajak Restoran dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melampaui target yang ditetapkan disebabkan oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak dan hasil dari sosialisasi dan penagihan yang intensif dari Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan pajak.
2. Pajak-pajak lainnya tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan antara lain disebabkan oleh data wajib pajak yang belum selesai dimutakhirkan, penetapan target yang belum menganalisis potensi riil dan kegiatan penagihan yang belum berjalan dengan optimal.

Tabel 5.1.6
Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

PD Pemungut	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Sekretariat Daerah	3.770.000.000,00	8.922.316.161,00	236,67	4.961.906.643,85
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	0	0	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	46.106.586.982,00	13.137.903.208,80	28,49	51.357.453.528,20
Jumlah	49.876.586.982,00	22.060.219.369,80	44,23	56.319.360.172,05



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Terdapat tiga Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan atas pajak daerah yaitu Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar Rp8.922.316.161,00 dari target anggaran sebesar Rp 3.770.000.000,00 atau 236,67%, Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp0,00 dari target anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan Badan Pedapatan Daerah dengan Realisasi sebesar Rp13.137.903.208,80 dari target Anggaran sebesar Rp46.106.586.982,00 atau 28,49%. Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan objek pajak selama Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1.6 di atas.

5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		8.184.315.989,00	6.998.837.446,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah Kabupaten Katingan dalam periode Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.7
Pendapatan Retribusi Daerah Berdasarkan Objek Retribusi
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Retribusi Pelayanan Kesehatan	800.000.000,00	6.742.589.175,00	401,59	2.206.576.500,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	120.000.000,00	120.292.000,00	100,24	87.424.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	140.000.000,00	94.100.000,00	67,21	73.300.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000,00	27.750.000,00	55,5	32.757.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	900.000.000,00	0	0	298.447.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0	0	0	71.660.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	0	367.120.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.370.048.458,00	2.568.064.490,00	108,35	1.990.345.122,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	331.524.000,00	602.917.000,00	181,86	422.890.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	37.000.000,00	41.355.000,00	111,77	39.532.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	250.000.000,00	43.385.000,00	17,35	230.156.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	310.933.000,00	370.809.000,00	119,26	351.322.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	360.500.000,00	208.425.000,00	57,82	96.500.000,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	386.967.600,00	0,00	0	196.500.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	894.527.299,00	178,91	534.306.324,00
Jumlah	6.556.973.058,00	8.184.315.989,00	124,82	6.998.837.446,00

Pendapatan Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp6.556.973.058,00 terealisasi sebesar Rp8.184.315.989,00 atau terealisasi 124,82% dan bila dibanding pendapatan Retribusi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp1.185.478.543,00. Pelampauan Retribusi melebihi target terdapat pada Pelayanan Kesehatan dan Tempat Rekreasi dan Olahraga. Sedangkan ada beberapa pendapatan retribusi tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD, hal ini antara lain disebabkan karena berkurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

oleh pemerintah daerah akibat terserapnya anggaran pemda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Sehingga kegiatan-kegiatan yang biasanya menyumbangkan pendapatan seperti retribusi pemaknaan kekayaan daerah menjadi berkurang. Adapun rincian berdasarkan perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1.8
Pendapatan Retribusi Daerah Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

SKPD Pemungut	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan	17.000.000,00	107.700.000,00	633,53	43.000.000,00
Dinas Kesehatan	852.400.000,00	3.291.169.059,00	386,11	2.287.914.328,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	839.000.000,00	1.556.121.299,00	185,47	363.938.000,00
Dinas Perumahan, Rakyat dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	500.000.000,00	0,00	0,00	534.306.324,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	35.000.000,00	167.450.000,00	478,43	55.400.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	575.000.000,00	513.412.000,00	89,29	441.005.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.000.000,00	7.700.000,00	154,00	367.120.000,00
Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	690.315.600,00	581.525.000,00	84,24	751.510.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	378.557.000,00	437.156.000,00	115,48	422.794.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	276.000.000,00	121.625.000,00	44,07	96.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0,00	0,00
Kecamatan Katingan Kuala	20.000.000,00	20.800.000,00	104,00	20.100.000,00
Kecamatan Kamipang	20.000.000,00	20.170.000,00	100,85	17.370.000,00
Kecamatan Tasik Payawan	20.000.000,00	22.700.000,00	113,50	20.000.000,00
Kecamatan Katingan Hilir	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00	20.250.000,00
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	20.000.000,00	34.140.000,00	170,70	24.340.000,00
Kecamatan Pulau Malan	20.000.000,00	10.500.000,00	52,50	11.400.000,00
Kecamatan Katingan Tengah	20.000.000,00	55.400.000,00	277,00	27.190.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei	20.000.000,00	23.100.000,00	115,50	21.100.000,00
Kecamatan Marikit	20.000.000,00	22.222.000,00	111,11	20.102.000,00
Kecamatan Katingan Hulu	20.000.000,00	20.500.000,00	102,50	27.500.000,00
Kecamatan Mendawai	20.000.000,00	25.406.400,00	127,03	22.488.000,00
Kecamatan Bukit Raya	20.000.000,00	20.107.500,00	100,54	20.125.000,00
Kecamatan Petak Malai	20.000.000,00	9.931.890,00	49,66	7.697.900,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	66.300.000,00	118.250.000,00	178,36	90.350.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	71.200.458,00	20.800.000,00	29,21	37.145.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00	17.100.000,00	114,00	15.200.000,00
Sekretariat DPRD	26.700.000,00	27.850.000,00	104,31	26.700.000,00
Badan Pendapatan Daerah	189.000.000,00	216.818.000,00	114,72	179.449.500,00
Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.674.500.000,00	606.017.841,00	36,19	969.731.894,00
Sekretariat Daerah	86.000.000,00	87.644.000,00	101,91	57.610.000,00
Jumlah	6.556.973.058,00	8.184.315.989,00	124,82	6.998.837.446,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Target pendapatan retribusi tersebar di 30 PD, hanya tiga PD dengan pendapatan Rp0,00 yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan objek retribusi selama Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di atas ini:

5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		4.579.510.360,83	27.049.142,65

Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.579.510.360,83 atau 22,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.192.215.980,00 Realisasi tersebut berasal dari Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

Tabel 5.1. 9
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	20.192.215.980,00	4.579.510.360,83	22,68	27.049.142,65
Jumlah	20.192.215.980,00	4.579.510.360,83	22,68	27.049.142,65

5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		33.344.621.451,83	34.600.093.490,98

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah lain-lain selama periode Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.10
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0	0	0	0
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	202.000.000,00	1.088.070.000,00	538,65	633.498.381,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.526.973.608,00	693.098.840,00	27,43	460.501.455,00
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	7.000.000.000,00	0,00	0	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.075.794.885,00	4.286.637.389,00	139,37	1.659.745.605,92
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	25.000.000,00	28.020.942,86	112,08	7.854.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.500.000.000,00	0,00	0	93.999.100,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	147.548.498,61	73,77	801.911.174,72
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000,00	57.624.046,00	384,16	72.024.827,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0	0	0	64.525.771,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	0	0	83.762.466,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	6.381.951.021,00	4.649.026.307,36	72,85	5.646.035.939,34
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	407.000.000,00	175.787.507,00	43,19	0,00
Pendapatan BLUD	0,00	0	0	18.562.230.909,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	20.000.000.000,00	22218807921	111,09	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	0	0	6.514.003.862,00
Jumlah	41.333.719.514,00	33.344.621.451,83	80,67	34.600.093.490,98

Tabel 5.1.11
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berdasar PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Kesehatan	7.000.000.000,00	0,00	0,00	6.514.003.862,00
BLUD RSUD Mas Amsyar	20.000.000.000,00	22.218.807.921,00	111,09	18.562.230.909,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	14.333.719.514,00	11.125.813.530,83	77,62	9.429.859.619,98
Dinas Perhubungan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	93.999.100,00
Jumlah	41.333.719.514,00	33.344.621.451,83	80,67	34.600.093.490,98

Berdasarkan tabel diatas, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah target sebesar Rp41.333.719.514,00 terealisasi sebesar Rp33.344.621.451,83 atau terealisasi 80,67%. Apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp1.255.472.039,15 di tahun 2024.

5.1.1.2	Pendapatan Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.508.968.514.600,00	1.307.710.177.971,00

Pendapatan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan selama Tahun Anggaran 2024 melalui Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.1.12
Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA	1.350.006.016.000,00	1.317.897.063.468,00	97,62	1.102.954.754.926,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	138.904.565.000,00	138.904.565.000,00	100,00	141.369.970.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	63.204.000.000,00	52.166.886.132,00	82,54	63.385.453.045,00
Jumlah	1.552.114.581.000,00	1.508.968.514.600,00	97,22	1.307.710.177.971,00

Berdasarkan tabel yang disajikan, realisasi pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp201.258.336.629,00 dengan angka realisasi Rp1.508.968.514.600,00. Nilai diperoleh atas meningkatnya pendapat pada transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	1.456.801.628.468,00	1.244.324.724.926,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat hanya terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan terealisasi sebesar Rp1.456.801.628.468,00 atau 97,84% dari target anggaran sebesar Rp1.488.910.581.000,00 Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp212.476.903.542,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 5.1.13
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Perimbangan	1.350.006.016.000,00	1.317.897.063.468,00	97,62	1.102.954.754.926,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	6.264.924.000,00
Dana Desa	133.014.020.000,00	133.014.020.000,00	100	135.105.046.000,00
Insentif Fiskal	5.890.545.000,00	5.890.545.000,00	100	0
Jumlah	1.494.801.126.000,00	1.456.801.628.468,00	97,84	1.244.324.724.926,00

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	1.317.897.063.468,00	1.102.954.754.926,00

Dana Perimbangan merupakan bagian pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.14
Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Bagi Hasil	332.285.337.000,00	332.285.338.000,00	100,00	188.876.497.355,00
Dana Alokasi Umum	696.838.932.000,00	672.273.960.026,00	96,47	649.641.846.105,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	187.726.478.000,00	186.604.733.257,00	99,40	138.035.682.119,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	133.155.269.000,00	126.733.032.185,00	95,18	126.400.729.347,00
Jumlah	1.350.006.016.000,00	1.317.897.063.468,00	97,62	1.102.954.754.926,00

Dana Bagi Hasil target sebesar Rp332.285.337.000,00 terealisasi sebesar Rp332.285.338.000,00 atau terealisasi 100% mengalami peningkatan Rp143.408.840.645,00 Dana Alokasi Umum dengan target anggaran Rp696.838.932.000,00, terealisasi 96,47% sebesar Rp672.273.960.026,00 mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp22.632.113.921,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik target sebesar Rp187.726.478.000,00 terealisasi Rp186.604.733.257,00 atau sebesar 99,40% mengalami kenaikan sebesar Rp48.569.051.138,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari pagu sebesar Rp133.155.269.000,00 terealisasi sebesar Rp126.733.032.185,00 atau sebesar 95,18% atau mengalami penurunan sebesar Rp332.302.838,00 dari tahun sebelumnya.

Adapun rincian sebagai berikut Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5.1.15
Rincian Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	26.034.554.000,00	26.034.554.000,00	100,00	21.981.760.270,00
DBH PPh Pasal 21	6.089.625.628,00	5.425.483.000,00	89,09	4.962.886.307,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	93.280.735,00	39.768.000,00	42,63	56.561.185,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	66,00	1.000,00	1.515,15	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	276.946.711,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	47.712.758,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	412.114.000,00	412.114.000,00	100,00	2.321.762.015,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	272.468.198.571,00	271.730.286.000,00	99,73	119.359.556.123,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.864.583.200,00	13.650.774.000,00	138,38	21.163.445.375,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	2.785.440.800,00	454.818.000,00	16,33	2.119.720.400,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.551.238.000,00	1.551.238.000,00	100,00	16.586.146.211,00
DBH Sawit	12.986.302.000,00	12.986.302.000,00	100,00	0,00
DAU	464.843.810.000,00	464.843.810.000,00	100,00	601.021.498.105,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	55.118.304.000,00	30.553.332.026,00	55,43	47.220.348.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	84.959.849.000,00	84.959.849.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	51.449.946.000,00	51.449.946.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	39.067.023.000,00	39.067.023.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	979.820.000,00	974.202.126,00	99,43	579.665.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.663.693.000,00	8.650.239.494,00	99,84	5.060.677.500,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.101.318.000,00	7.072.209.850,00	99,59	11.765.685.300,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	840.628.850,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	2.300.000.000,00	0,00	2.918.254.190,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	121.300.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.388.309.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	94.039.000,00	89.346.000,00	95,01	209.392.297,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.183.895.000,00	6.428.726.500,00	70,00	15.490.990.900,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	15.827.418.000,00	18.311.945.705,00	115,70	23.842.383.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	800.000.000,00	783.000.000,00	97,88	5.402.370.799,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	142.687.986.000,00	141.995.063.582,00	99,51	71.804.334.283,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	29.616.300.000,00	29.579.274.779,00	99,87	29.535.777.247,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	100,00	1.270.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	52.248.213.000,00	49.380.187.000,00	94,51	47.927.698.300,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.998.779.000,00	2.389.750.000,00	119,56	1.716.000.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	19.540.440.000,00	20.156.536.000,00	103,15	19.326.750.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	2.088.628.950,00	0,00	2.581.015.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.776.400.000,00	1.736.860.000,00	97,77	1.319.320.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.868.806.000,00	4.032.516.895,00	104,23	3.864.365.181,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	308.601.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	15.170.799.000,00	0,00	0,00	15.088.551.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	578.828.000,00	495.302.068,00	85,57	434.670.424,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.323.303.000,00	3.670.484.800,00	84,90	2.793.844.150,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	190.971.045,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	351.767.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.569.800.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	12.078.491.693,00	0,00	0,00
JUMLAH	1.350.006.016.000,00	1.317.897.063.468,00	97,62	1.102.954.754.926,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	6.264.924.000,00

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp0,00 dimana pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Katingan mendapat dana sebesar Rp6.264.924.000,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.2.1.3 Dana Desa	133.014.020.000,00	135.105.046.000,00

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa terealisasi 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp133.014.020.000,00 pada Tahun Anggaran 2024.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.2.1.4 Insentif Fiskal	5.890.545.000,00	0,00

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Katingan memperoleh alokasi Insentif Fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp5.890.545.000,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.166.886.132,00	63.385.453.045,00

Pendapatan yang berasal dari Transfer Antar Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditransfer di tahun 2024 sebesar Rp52.166.886.132,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil	52.166.886.132,00	63.385.453.045,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditransfer di tahun 2024 sebesar Rp52.166.886.132,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.16
Pendapatan Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.754.000.000,00	6.448.890.198,00	73,67	8.844.589.713,02
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	12.300.000.000,00	12.839.336.028,00	104,38	12.172.460.450,64
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	32.000.000.000,00	22.893.547.026,00	71,54	32.857.606.756,33
Pajak Pengembalian Dan Pemanfaatan Air Permukaan	150.000.000,00	122.889.676,00	81,93	144.172.944,01
Pajak Rokok	10.000.000.000,00	9.862.223.204,00	98,62	9.366.623.181,00
Jumlah	63.204.000.000,00	52.166.886.132,00	82,54	63.385.453.045,00

5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		8.061.930.540,00	501.263.540,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Katingan selama Tahun Anggaran 2024 berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp8.061.930.540,00 yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.17
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Hibah	50.000.000,00	378.281.230,00	756,56	501.263.540,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	7.683.649.310,00	0,00	0,00
Jumlah	50.000.000,00	8.061.930.540,00	756,56	501.263.540,00

5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		378.281.230,00	501.263.540,00

Pendapatan hibah ini berasal dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri, penyajian akun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang menyajikan pendapatan dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri atau Badan Usaha Swasta. Secara rinci pendapatan hibah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.18
Pendapatan Hibah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	50.000.000,00	378.281.230,00	756,56	501.263.540,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	50.000.000,00	378.281.230,00	756,56	501.263.540,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp378.281.230,00 terealisasi berupa hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp378.281.230,00 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.19
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)	
Uraian	Realisasi TA 2024
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	378.281.230,00
Jumlah	378.281.230,00

5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		7.683.649.310,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah Rp7.683.649.310,00.

5.1.2	Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.587.144.334.909,47	1.446.092.124.285,78

Pada TA 2024, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2024 serta Realisasi TA 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.20
Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)				
Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Operasi	1.103.509.571.207,18	984.181.752.206,53	89,19	891.213.742.652,79
Belanja Modal	387.781.730.490,82	374.195.510.225,24	96,50	332.915.153.065,99
Belanja Tak Terduga	8.232.227.250,00	1.605.409.963,00	19,50	1.062.262.800,00
Belanja Transfer	227.196.542.586,00	227.161.662.514,70	99,98	220.900.965.767,00
Jumlah	1.726.720.071.534,00	1.587.144.334.909,47	91,92	1.446.092.124.285,78

Tabel 5.1.21
Realisasi Belanja Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)					
No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	443.128.029.132,00	381.696.278.676,95	86,1	338.661.002.083,75
2	Dinas Kesehatan	369.060.754.700,00	357.531.600.462,31	96,9	271.825.273.003,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134.565.352.446,00	127.691.397.298,91	94,9	139.349.526.096,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	35.452.272.736,00	33.530.192.411,00	94,6	56.216.170.310,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.377.522.968,00	34.152.900.490,00	96,5	22.861.112.432,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	33.818.703.808,00	33.109.895.323,00	97,9	26.528.316.504,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.768.567.407,00	8.200.853.033,00	84	8.342.913.124,00
8	Dinas Sosial	9.562.936.200,00	7.840.024.988,00	82	7.720.841.549,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12.732.317.172,00	11.348.467.025,00	89,1	9.437.722.150,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.253.965.824,00	11.486.153.820,00	86,7	11.101.946.064,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	18.542.066.160,00	17.655.044.143,00	95,2	15.402.308.286,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.567.942.527,00	7.383.448.057,00	97,6	5.982.468.700,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.581.780.376,00	8.274.767.939,97	96,4	9.211.787.601,00
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	13.420.942.630,00	12.835.619.220,00	95,6	15.199.165.493,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.420.678.759,00	11.140.130.588,00	97,5	9.654.051.350,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	9.170.435.677,00	7.945.609.589,00	86,6	8.637.850.178,00
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	18.179.774.442,00	17.214.604.498,00	94,7	22.358.829.606,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.285.146.792,00	14.903.530.913,00	77,3	13.196.687.467,00
19	Sekretariat Daerah	65.271.346.746,00	60.884.288.475,00	93,3	59.382.030.165,00
20	Sekretariat DPRD	56.100.469.253,00	45.239.597.556,00	80,6	43.879.360.887,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.928.313.412,00	8.914.102.264,00	89,8	9.817.494.065,00
22	Kecamatan Katingan Kuala	4.769.220.183,00	4.389.805.469,00	92	4.326.514.796,00
23	Kecamatan Kamipang	3.829.449.331,00	3.802.580.656,00	99,3	3.365.489.600,00
24	Kecamatan Tasik Payawan	3.290.941.019,00	3.121.165.327,00	94,8	2.771.414.455,00
25	Kecamatan Katingan Hilir	6.863.032.494,00	6.500.092.860,00	94,7	5.715.564.924,00
26	Kecamatan Tewang S. Garing	5.434.389.688,00	5.185.597.325,00	95,4	4.919.003.505,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

27	Kecamatan Pulau Malan	3.775.506.047,00	3.553.729.345,00	94,1	3.418.501.193,00
28	Kecamatan Katingan Tengah	5.507.211.032,00	4.996.302.411,00	90,7	5.031.276.104,00
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	3.618.048.323,00	3.503.444.121,00	96,8	2.427.625.892,00
30	Kecamatan Marikit	2.839.558.215,00	2.660.424.321,00	93,7	2.402.327.424,00
31	Kecamatan Katingan Hulu	4.233.853.693,00	4.103.094.026,50	96,9	3.947.901.660,00
32	Kecamatan Mendawai	2.869.084.655,00	2.684.883.318,00	93,6	2.556.737.610,00
33	Kecamatan Bukit Raya	2.882.070.627,00	2.511.190.273,00	87,1	1.999.971.116,00
34	Kecamatan Petak Malai	2.754.665.616,00	2.343.577.777,00	85,1	2.169.641.657,00
35	Inspektorat	13.939.895.457,00	12.373.797.618,00	88,8	11.401.180.244,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	13.056.414.962,00	11.337.510.123,00	86,8	10.237.316.777,00
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	290.457.249.537,00	274.516.845.980,58	94,5	254.051.621.132,00
38	Badan Pendapatan Daerah	11.365.578.409,00	10.664.567.293,25	93,8	10.526.896.193,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.044.583.079,00	9.917.219.894,00	89,8	10.056.282.890,00
Jumlah		1.726.720.071.534,00	1.587.144.334.909,47	91,9	1.446.092.124.285,78

Anggaran Belanja TA 2024 sebesar Rp1.726.720.071.534,00 terealisasi Rp1.587.136.172.743,01 atau 91,92% jika dibandingkan Realisasi Belanja TA 2023 Rp1.446.092.124.285,78 mengalami kenaikan sebesar Rp141.044.048.457,23.

5.1.2.1 Belanja Operasi		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		984.181.752.206,53	891.213.742.652,79

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Katingan dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi TA 2024 dan TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1.22
Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Pegawai	579.390.704.751,00	506.232.945.775,58	87,37	441.447.210.765,96
Belanja Barang dan Jasa	412.475.281.252,78	369.606.587.482,51	89,61	360.870.851.259,08
Belanja Subsidi	2.680.150.000,00	2.536.412.800,00	94,63	1.668.543.000,00
Belanja Hibah	105.685.085.505,40	103.297.956.459,44	97,74	85.914.892.627,75
Belanja Bantuan Sosial	3.278.349.698,00	2.507.849.689,00	76,49	1.312.245.000,00
Jumlah	1.103.509.571.207,18	984.181.752.206,53	89,19	891.213.742.652,79



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.1.23
Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	385.369.915.873,00	325.057.792.877,44	84,35	290.610.488.677,75
2	Dinas Kesehatan	212.273.672.553,19	202.329.120.003,31	95,32	191.516.886.348,04
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.243.840.143,71	28.816.455.010,90	95,28	22.995.132.380,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	29.666.542.336,00	27.870.575.001,00	93,95	15.867.155.417,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.115.978.988,00	33.914.893.419,00	96,58	22.643.451.776,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	22.614.080.084,00	21.965.490.860,00	97,13	20.802.802.925,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.021.409.647,00	7.473.913.533,00	82,85	7.201.122.768,00
8	Dinas Sosial	8.560.609.843,00	6.892.482.026,00	80,51	7.434.432.666,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	11.314.923.972,00	9.974.823.962,00	88,16	8.369.428.498,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.979.883.824,00	11.223.420.820,00	86,47	10.882.532.514,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	15.298.907.840,00	14.495.476.493,00	94,75	13.791.771.957,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.213.361.659,00	6.046.845.633,00	97,32	5.562.610.700,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.480.957.530,00	7.215.136.399,00	96,45	8.344.603.817,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.119.078.634,00	10.858.068.174,00	97,65	9.336.988.780,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	7.901.545.608,40	6.680.599.589,00	84,55	6.281.485.178,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	13.251.364.697,00	12.336.140.896,00	93,09	15.891.317.006,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.130.529.047,00	13.800.850.913,00	76,12	12.581.834.855,00
18	Sekretariat Daerah	59.981.892.618,34	55.675.888.675,00	92,82	53.435.901.145,00
19	Sekretariat DPRD	54.664.541.974,00	44.756.374.456,00	81,87	42.891.189.137,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.166.926.175,00	7.180.545.054,00	87,92	6.160.419.842,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	4.109.879.090,00	3.732.500.469,00	90,82	3.193.116.796,00
22	Kecamatan Kamipang	3.379.743.628,13	3.353.541.836,00	99,22	3.103.390.600,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	3.184.816.686,00	3.016.583.627,00	94,72	2.771.414.455,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	6.299.262.643,76	5.940.129.330,00	94,3	5.044.507.115,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	4.500.677.773,00	4.291.126.168,00	95,34	4.374.493.505,00
26	Kecamatan Pulau Malan	3.639.344.145,00	3.453.569.345,00	94,9	3.401.501.193,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	5.076.894.999,00	4.577.643.431,00	90,17	4.232.315.804,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	3.138.982.642,00	3.025.689.171,00	96,39	2.407.189.282,00
29	Kecamatan Marikit	2.756.889.419,00	2.577.924.321,00	93,51	2.376.023.424,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	3.915.623.373,00	3.785.931.364,00	96,69	3.255.857.975,00
31	Kecamatan Mendawai	2.835.309.355,00	2.653.033.318,00	93,57	2.516.272.610,00
32	Kecamatan Bukit Raya	2.717.267.227,00	2.372.540.273,00	87,31	1.996.086.116,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
33	Kecamatan Petak Malai	2.716.766.799,00	2.305.792.777,00	84,87	2.099.722.757,00
34	Inspektorat Daerah	12.941.616.557,00	11.380.487.618,00	87,94	11.039.855.926,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	12.067.147.764,00	10.495.578.231,00	86,98	9.903.488.777,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	38.581.311.966,65	32.650.829.246,88	84,63	24.773.466.921,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.920.960.709,00	8.880.660.294,00	89,51	9.705.482.890,00
38	Badan Pendapatan Daerah	10.123.554.176,00	9.453.920.278,00	93,39	9.278.372.627,00
39	Dinas Perhubungan dan Perikanan	12.233.559.208,00	11.669.377.314,00	95,39	13.139.627.493,00
Jumlah		1.103.509.571.207,18	984.181.752.206,53	89,19	891.213.742.652,79

Dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp1.103.509.571.207,18 dapat terealisasi Rp984.181.752.206,53 atau 89,19%, dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp891.213.742.652,79 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp92.968.009.553,74. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	506.232.945.775,58	441.447.210.765,96

Dari Anggaran untuk Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp579.390.704.751,00 dapat terealisasi Rp506.232.945.775,58 atau 87,37%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp441.447.210.765,96 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp64.785.735.009,62. Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Daerah, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan & Anggota DPRD, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Uang Lembur, Belanja Honorarium PNS/Non PNS, dan Belanja Pegawai BLUD dengan Anggaran dan Realisasi TA 2024 serta Realisasi TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Belanja Pegawai Per Objek
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	353.129.852.959,00	304.228.869.824,00	86,15	258.340.503.119,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	126.153.186.810,00	105.190.234.411,00	83,38	92.949.495.529,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	76.752.995.540,00	74.446.577.157,00	97,00	68.760.792.500,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.721.127.989,00	11.841.294.027,00	93,08	12.079.056.756,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	31.941.453,00	0,00	0,00	131.927.065,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	530.200.000,00	88,13	601.600.000,00
Belanja Pegawai BLUD	10.000.000.000,00	9.995.770.356,58	99,96	8.583.835.796,96
JUMLAH	579.390.704.751,00	506.232.945.775,58	87,37	441.447.210.765,96



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.1.25
Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	318.198.811.440,00	263.389.872.132,00	82,78	231.381.784.843,00
2	Dinas Kesehatan	99.055.919.077,00	96.728.344.151,58	97,65	74.159.548.148,96
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.419.159.109,00	4.821.626.899,00	88,97	4.232.898.828,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	3.512.326.493,00	3.084.039.816,00	87,81	3.021.169.188,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.715.662.990,00	1.966.885.698,00	72,43	1.983.118.125,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.361.071.671,00	5.096.966.493,00	95,07	4.799.601.035,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.298.907.424,00	2.604.071.870,00	78,94	2.758.118.803,00
8	Dinas Sosial	3.818.967.764,00	2.568.956.958,00	67,27	2.674.636.461,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.143.781.133,00	3.329.881.135,00	80,36	3.302.490.327,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.779.717.053,00	4.664.331.702,00	97,59	4.018.498.605,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.171.254.558,00	3.897.250.071,00	93,43	3.801.502.587,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.599.908.331,00	2.587.293.664,00	99,51	2.548.175.638,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.387.238.716,00	3.171.573.666,00	93,63	2.764.141.538,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.062.932.035,00	3.937.926.709,00	96,92	3.024.262.587,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	3.928.411.254,00	3.012.499.067,00	76,68	2.653.024.199,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	3.400.274.597,00	3.099.860.996,00	91,17	3.439.627.618,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.834.509.234,00	7.548.340.594,00	96,35	6.792.240.851,00
18	Sekretariat Daerah	14.423.389.484,00	13.718.508.759,00	95,11	12.489.168.981,00
19	Sekretariat DPRD	16.077.096.189,00	14.934.136.864,00	92,89	14.703.115.346,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.510.949.330,00	2.923.686.534,00	83,27	2.845.102.492,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	2.484.819.875,00	2.190.925.469,00	88,17	2.224.171.796,00
22	Kecamatan Kamipang	1.860.694.859,00	1.835.680.456,00	98,66	1.768.372.200,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	2.030.876.301,00	1.949.244.314,00	95,98	1.861.851.545,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	3.469.970.962,00	3.261.608.925,00	94	3.120.846.302,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	3.060.791.392,00	2.905.361.688,00	94,92	2.887.637.244,00
26	Kecamatan Pulau Malan	2.511.925.536,00	2.417.284.776,00	96,23	2.513.799.593,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	2.927.989.048,00	2.589.652.127,00	88,44	2.454.026.733,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.717.922.994,00	1.706.278.137,00	99,32	1.561.498.181,00
29	Kecamatan Marikit	1.514.994.108,00	1.374.154.048,00	90,7	1.369.563.634,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	2.218.704.875,00	2.099.890.836,00	94,64	1.920.084.588,00
31	Kecamatan Mendawai	1.686.492.673,00	1.543.115.768,00	91,5	1.569.087.216,00
32	Kecamatan Bukit Raya	1.269.406.353,00	949.143.973,00	74,77	914.247.816,00
33	Kecamatan Petak Malai	1.164.074.827,00	765.038.262,00	65,72	848.830.043,00
34	Inspektorat Daerah	6.147.062.511,00	5.864.079.893,00	95,4	5.735.043.195,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	4.071.228.978,00	3.727.816.545,00	91,56	3.551.664.012,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.862.721.517,00	13.844.721.783,00	82,1	10.519.706.789,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.880.390.060,00	2.791.916.122,00	96,93	2.754.891.659,00
38	Badan Pendapatan Daerah	4.029.170.000,00	3.774.292.541,00	93,67	3.100.981.416,00
39	Dinas Perhubungan dan Perikanan	3.781.180.000,00	3.556.686.334,00	94,06	3.378.680.603,00
Jumlah		579.390.704.751,00	506.232.945.775,58	87,37	441.447.210.765,96

Kenaikan realisasi disebabkan ada beberapa perubahan dalam struktur penganggaran diantaranya adalah perubahan pos Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS ,Belanja Uang Lembur dimana terdapat penambahan pada Balanja Gaji PPPK dan Honorarium Non PNS.

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	369.606.587.482,51	360.870.851.259,08

Perincian belanja barang dan jasa berdasarkan per objek dan PD Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.26
Belanja Barang dan Jasa Per Objek
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Barang Pakai Habis	75.327.379.464,50	68.500.596.264,39	90,94	61.348.327.829,57
Belanja Barang Tak Habis Pakai	120.458.900,00	120.450.000,00	99,99	238.027.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	395.067.950,00	382.169.503,00	96,74	0,00
Belanja Jasa Kantor	101.768.853.000,15	90.146.079.054,00	88,58	99.473.655.199,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.619.674.519,68	26.982.540.980,83	94,28	21.929.446.010,77
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.858.446.004,00	2.417.038.129,00	84,56	3.097.680.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.304.187.800,00	2.014.374.710,00	87,42	1.331.203.766,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	62.950.000,00	62.950.000,00	100,00	10.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.892.026.033,00	23.064.006.654,00	92,66	23.681.036.943,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.515.070.000,00	1.461.550.000,00	96,47	5.784.331.091,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.797.474.600,00	7.350.697.767,00	83,55	8.431.292.012,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	75.000.000,00	74.996.000,00	99,99	49.953.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	369.197.247,00	367.499.800,00	99,54	304.650.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.505.107.519,00	12.354.967.966,00	91,48	13.409.224.223,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.158.508.274,35	6.741.539.263,90	94,18	6.000.169.795,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.600.448.518,00	3.571.217.000,00	99,19	5.068.156.400,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	71.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	175.000.000,00	173.700.000,00	99,26	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.676.714.886,10	104.648.189.326,00	86,72	95.957.795.045,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.759.755.000,00	2.713.985.000,00	98,34	1.254.205.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	504.000.000,00	143.835.219,00	28,54	1.293.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	137.693.000,00	108.395.818,00	78,72	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.852.268.537,00	16.205.809.027,39	96,16	12.136.097.944,74
Jumlah	412.475.281.252,78	369.606.587.482,51	89,61	360.870.851.259,08

Tabel 5.1.27
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	31.778.844.833,00	27.059.838.706,00	85,15	23.491.718.653,00
2	Dinas Kesehatan	112.667.753.476,19	105.050.775.851,73	93,24	116.907.338.199,08
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.625.931.034,71	18.797.528.111,90	95,78	18.271.535.015,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	12.527.715.843,00	11.342.318.737,00	90,54	12.845.986.229,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.795.495.998,00	3.343.216.521,00	88,08	2.915.447.151,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	17.253.008.413,00	16.868.524.367,00	97,77	16.003.201.890,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.722.502.223,00	4.869.841.663,00	85,1	4.443.003.965,00
8	Dinas Sosial	4.143.642.079,00	3.743.525.068,00	90,34	3.687.011.205,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.462.709.356,60	5.973.145.827,00	92,42	4.092.923.061,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.848.911.771,00	6.207.834.118,00	79,09	6.864.033.909,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	11.127.653.282,00	10.598.226.422,00	95,24	9.990.269.370,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.613.453.328,00	3.459.551.969,00	95,74	3.014.435.062,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.093.718.814,00	4.043.562.733,00	98,77	5.580.462.279,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.056.146.599,00	6.920.141.465,00	98,07	6.162.726.193,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	2.528.537.479,40	2.418.100.522,00	95,63	3.121.060.979,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	5.441.090.100,00	5.299.065.228,00	97,39	6.096.984.711,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.188.299.567,00	5.585.220.630,00	60,79	5.086.477.552,00
18	Sekretariat Daerah	30.440.003.134,34	27.835.961.916,00	91,45	22.204.544.164,00
19	Sekretariat DPRD	38.587.445.785,00	29.822.237.592,00	77,28	28.188.073.791,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.655.976.845,00	4.256.858.520,00	91,43	3.315.317.350,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	1.625.059.215,00	1.541.575.000,00	94,86	968.945.000,00
22	Kecamatan Kamipang	1.519.048.769,13	1.517.861.380,00	99,92	1.335.018.400,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	1.153.940.385,00	1.067.339.313,00	92,5	909.562.910,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	2.829.291.681,76	2.678.520.405,00	94,67	1.923.660.813,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	1.439.886.381,00	1.385.764.480,00	96,24	1.486.856.261,00
26	Kecamatan Pulau Malan	1.127.418.609,00	1.036.284.569,00	91,92	887.701.600,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	2.148.905.951,00	1.987.991.304,00	92,51	1.778.289.071,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.421.059.648,00	1.319.411.034,00	92,85	845.691.101,00
29	Kecamatan Marikit	1.241.895.311,00	1.203.770.273,00	96,93	1.006.459.790,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	1.696.918.498,00	1.686.040.528,00	99,36	1.335.773.387,00
31	Kecamatan Mendawai	1.148.816.682,00	1.109.917.550,00	96,61	947.185.394,00
32	Kecamatan Bukit Raya	1.447.860.874,00	1.423.396.300,00	98,31	1.081.838.300,00
33	Kecamatan Petak Malai	1.552.691.972,00	1.540.754.515,00	99,23	1.250.892.714,00
34	Inspektorat Daerah	6.794.554.046,00	5.516.407.725,00	81,19	5.304.812.731,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	7.995.918.786,00	6.767.761.686,00	84,64	6.351.824.765,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.214.440.449,65	17.445.774.663,88	86,3	12.905.217.132,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	7.040.570.649,00	6.088.744.172,00	86,48	6.950.591.231,00
38	Badan Pendapatan Daerah	6.094.384.176,00	5.679.627.737,00	93,19	6.177.391.211,00
39	Dinas Perhubungan dan Perikanan	5.423.779.208,00	5.114.168.880,00	94,29	5.140.588.720,00
JUMLAH		412.475.281.252,78	369.606.587.482,51	89,61	360.870.851.259,08

Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp412 475 281 252,78 dapat terealisasi atau 89,61% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp360.870.851.259,08 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp8.735.736.223,43. Termasuk realisasi yang dapat dikategorikan sebagai Belanja Barang dan Jasa yaitu Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak ketiga dan Belanja Uang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

31 Desember 2024

31 Desember 2023

2.536.412.800,00

1.668.543.000,00

Anggaran Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp2.680.150.000,00 dapat terealisasi Rp2.536.412.800,00 atau 94,64%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.668.543.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp867.869.800,00. Belanja Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Katingan yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kasongan untuk pemberian subsidi selisih tarif dari harga yang ditetapkan oleh PDAM kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian Subsidi Selisih Tarif Air Minum Kepada Masyarakat Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan dan belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta yakni sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.1.28
Belanja Subsidi
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Subsidi	2.680.150.000,00	2.536.412.800,00	94,64	1.668.543.000,00
Jumlah	2.680.150.000,00	2.536.412.800,00	94,64	1.668.543.000,00

Tabel 5.1.29
Belanja Subsidi Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	320.000.000,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.430.150.000,00	1.286.412.800,00	89,95	1.348.543.000,00
Jumlah		2.680.150.000,00	2.536.412.800,00	94,64	1.668.543.000,00

Nilai anggaran Belanja Subsidi di atas disajikan berdasarkan Perbup Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 yang tidak melalui persetujuan DPRD Kabupaten Katingan. Jika disajikan berdasarkan Perda Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 maka nilai anggaran adalah sebesar Rp2.080.150.000,00, sehingga nilai realisasi Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp2.536.412.800,00 telah melampaui pagu anggaran sebesar Rp456.262.800,00 (Rp2.080.150.000,00 - Rp2.536.412.800,00).

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
103.297.956.459,44	85.914.892.627,75

Belanja Hibah TA 2024 merupakan Belanja Hibah yang berupa uang maupun barang Pemerintah Kabupaten Katingan kepada badan/lembaga/organisasi swasta sebagaimana Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.30
Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	26.200.000.000,00	26.200.000.000,00	100,00	4.400.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.634.325.000,00	8.359.331.932,00	96,82	17.831.091.454,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23.504.964.905,40	21.697.787.940,00	92,31	27.598.318.450,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.374.916.000,00	15.064.446.448,00	97,98	4.050.925.492,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	28.322.380.000,00	28.328.391.087,98	100,02	28.485.419.692,75
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.443.679.600,00	2.443.179.051,46	99,98	2.274.242.539,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.204.820.000,00	1.204.820.000,00	100,00	1.124.895.000,00
Jumlah	105.685.085.505,40	103.297.956.459,44	97,74	85.914.892.627,75

Tabel 5.1.31
Belanja Hibah Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	35.392.259.600,00	34.608.082.039,44	97,78	35.736.985.181,75
2	Dinas Kesehatan	550.000.000,00	550.000.000,00	100	450.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.198.750.000,00	5.197.300.000,00	99,97	490.698.537,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.604.820.000,00	28.604.791.200,00	100	17.744.886.500,00
5	Dinas Sosial	0	0	0	89.900.000,00
6	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	708.433.482,40	671.797.000,00	94,83	974.015.110,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	351.255.000,00	351.255.000,00	100	0
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	0	0	150.000.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	194.596.875,00	0	0	187.400.000,00
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	4.410.000.000,00	3.937.214.672,00	89,28	6.354.704.677,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.039.870.548,00	599.440.000,00	57,65	621.256.452,00
12	Sekretariat Daerah	12.686.000.000,00	12.441.418.000,00	98,07	18.494.688.000,00
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	74.000.000,00	73.920.000,00	99,89	
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	3.028.600.000,00	2.998.522.100,00	99,01	4.620.358.170,00
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	13.446.500.000,00	13.264.216.448,00	98,64	0
Jumlah		105.685.085.505,40	103.297.956.459,44	97,74	85.914.892.627,75

Anggaran Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp105.685.085.505,40 dapat terealisasi Rp103.297.956.459,44 atau 97,74%, dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp85.914.892.627,75 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp17.383.063.831,69.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.507.849.689,00	1.312.245.000,00

Belanja Bantuan Sosial untuk periode TA 2024 sebagaimana Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan. Anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp3.278.349.698,00 dapat terealisasi Rp2.507.849.689,00 atau 76,50%, dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.312.245.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp1.195.604.689,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.32
Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.432.500.000,00	1.680.000.000,00	69,06	373.485.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	617.849.698,00	599.849.689,00	97,09	890.760.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial/Kelompok Masyarakat	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00
Jumlah	3.278.349.698,00	2.507.849.689,00	76,50	1.312.245.000,00

Tabel 5.1.33
Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Sosial	598.000.000,00	580.000.000,00	96,99	982.885.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	67.849.698,00	67.849.689,00	100,00	81.860.000,00
4	Sekretariat Daerah	2.432.500.000,00	1.680.000.000,00	69,06	247.500.000,00
	Jumlah	3.278.349.698,00	2.507.849.689,00	76,50	1.312.245.000,00

Nilai anggaran di atas disajikan berdasarkan Perbup Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 yang tidak melalui persetujuan DPRD Kabupaten Katingan. Jika disajikan berdasarkan Perda Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 maka nilai anggaran adalah sebesar Rp102.780.826.310,00, sehingga nilai realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp103.297.956.459,44 telah melampaui pagu anggaran sebesar Rp517.130.149,44 (Rp102.780.826.310,00 - Rp103.297.956.459,44).

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.1.2.2	Belanja Modal	374.195.510.225,24	332.915.153.065,99



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Katingan meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.34
Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	1.478.500.000,00	98,57	85.029.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.913.340.540,54	106.614.740.833,80	94,42	46.249.873.882,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.045.369.748,00	160.277.154.014,83	98,91	153.018.617.584,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.735.899.202,28	105.242.194.176,61	95,04	132.461.127.644,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	236.331.000,00	235.131.200,00	99,49	1.100.504.955,00
Belanja Modal Aset Lainnya	350.790.000,00	347.790.000,00	99,14	0,00
Jumlah	387.781.730.490,82	374.195.510.225,24	96,50	332.915.153.065,99

Tabel 5.1.35
Belanja Modal Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	57.758.113.259,00	56.638.485.799,51	98,06	48.050.513.406,00
2	Dinas Kesehatan	156.787.082.146,81	155.202.480.459,00	98,99	80.308.386.654,99
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.321.512.302,29	98.874.942.288,01	94,78	116.354.393.716,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	5.785.730.400,00	5.659.617.410,00	97,82	40.349.014.893,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	261.543.980,00	238.007.071,00	91	217.660.656,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.204.623.724,00	11.144.404.463,00	99,46	5.725.513.579,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	747.157.760,00	726.939.500,00	97,29	1.141.790.356,00
8	Dinas Sosial	1.002.326.357,00	947.542.962,00	94,53	286.408.883,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.417.393.200,00	1.373.643.063,00	96,91	1.068.293.652,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	274.082.000,00	262.733.000,00	95,86	219.413.550,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.243.158.320,00	3.159.567.650,00	97,42	1.610.536.329,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.354.580.868,00	1.336.602.424,00	98,67	419.858.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.100.822.846,00	1.059.631.540,97	96,26	867.183.784,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	301.600.125,00	282.062.414,00	93,52	317.062.570,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	1.268.890.068,60	1.265.010.000,00	99,69	2.356.365.000,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	4.928.409.745,00	4.878.463.602,00	98,99	6.467.512.600,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.154.617.745,00	1.102.680.000,00	95,5	614.852.612,00
18	Sekretariat Daerah	5.289.454.127,66	5.208.399.800,00	98,47	5.946.129.020,00
19	Sekretariat DPRD	1.435.927.279,00	483.223.100,00	33,65	988.171.750,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.761.387.237,00	1.733.557.210,00	98,42	3.657.074.223,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	659.341.093,00	657.305.000,00	99,69	1.133.398.000,00
22	Kecamatan Kamipang	449.705.702,87	449.038.820,00	99,85	262.099.000,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	106.124.333,00	104.581.700,00	98,55	0
24	Kecamatan Katingan Hilir	563.769.850,24	559.963.530,00	99,32	671.057.809,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	933.711.915,00	894.471.157,00	95,8	544.510.000,00
26	Kecamatan Pulau Malan	136.161.902,00	100.160.000,00	73,56	17.000.000,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	430.316.033,00	418.658.980,00	97,29	798.960.300,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	479.065.681,00	477.754.950,00	99,73	20.436.610,00
29	Kecamatan Marikit	82.668.796,00	82.500.000,00	99,8	26.304.000,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	318.230.320,00	317.162.662,50	99,66	692.043.685,00
31	Kecamatan Mendawai	33.775.300,00	31.850.000,00	94,3	40.465.000,00
32	Kecamatan Bukit Raya	164.803.400,00	138.650.000,00	84,13	3.885.000,00
33	Kecamatan Petak Malai	37.898.817,00	37.785.000,00	99,7	69.918.900,00
34	Inspektorat Daerah	998.278.900,00	993.310.000,00	99,5	361.324.318,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	989.267.198,00	841.931.892,00	85,11	333.828.000,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	16.447.167.734,35	13.098.944.256,00	79,64	7.314.925.644,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.123.622.370,00	1.036.559.600,00	92,25	350.800.000,00
38	Badan Pendapatan Daerah	1.242.024.233,00	1.210.647.015,25	97,47	1.248.523.566,00
39	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.187.383.422,00	1.166.241.906,00	98,22	2.059.538.000,00
Jumlah		387.781.730.490,82	374.195.510.225,24	96,50	332.915.153.065,99

Anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp387.781.730.490,82 terealisasi Rp374.195.510.225,24 atau 96,50% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp332.915.153.065,99 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp41.280.357.159,25.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

1.478.500.000,00

85.029.000,00

Anggaran belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi Rp1.478.500.000,00 atau 98,57%. Mengalami kenaikan Rp1.393.471.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.029.000,00.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.1.36
Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	85.029.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.500.000.000,00	1.478.500.000,00	98,57	0,00
Jumlah		1.500.000.000,00	1.478.500.000,00	98,57	85.029.000,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024 31 Desember 2023

106.614.740.833,80 46.249.873.882,99

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 ditargetkan sebesar Rp112.913.340.540,54 terealisasi Rp106.614.740.833,80 atau 94,42%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp46.249.873.882,99 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp60.364.866.950,81. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Objek
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	915.000.000,00	877.000.000,00	95,85	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	199.400.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.313.000.173,00	4.292.830.503,60	99,53	1.594.878.320,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	20.594.267.582,00	15.849.457.000,00	76,96	11.139.392.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	164.400.000,00	163.700.000,00	99,57	497.500.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tidak Bermotor	10.648.938,00	10.543.250,00	99,01	2.886.000,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	1.200.000,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	23.410.000,00	23.410.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	28.505.448,00	28.504.000,00	99,99	2.647.495.000,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	3.433.918.982,00	3.383.545.558,08	98,53	2.667.790.688,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.380.952.038,27	15.956.542.869,26	97,41	7.373.383.974,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	1.520.075.681,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.678.125.708,00	1.583.391.367,00	94,35	1.029.700.400,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	225.245.700,00	218.700.288,00	97,09	204.305.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	44.985.000,00	44.804.820,00	99,60	150.383.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	13.500.000,00	13.421.000,00	99,41	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	7.689.127.147,00	7.671.835.140,00	99,78	6.898.333.422,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	43.202.991.618,00	43.012.180.470,00	99,56	342.300.000,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	358.563.700,00	353.300.000,00	98,53	48.800.000,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.886.342.822,00	1.883.714.832,00	99,86	311.302.550,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	721.565.000,00	698.550.000,00	96,81	153.647.976,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Komputer Unit	7.219.073.584,60	7.014.271.116,54	97,16	7.363.803.729,99
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.682.092.695,67	2.473.880.461,32	92,24	196.878.288,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Sumur	0,00	0,00	0,00	86.659.000,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	253.374.800,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja SAR	199.410.304,00	189.930.640,00	95,25	26.475.554,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3.130.200,00	3.100.000,00	99,04	4.000.000,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	34.600.000,00	34.600.000,00	100,00	198.500.000,00
29	Belanja Modal Peralatan Olahraga	138.183.900,00	137.979.450,00	99,85	16.176.000,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	730.000.000,00	473.248.068,00	64,83	1.321.232.500,00
Jumlah		112.913.340.540,54	106.614.740.833,80	94,42	46.249.873.882,99



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	8.032.396.380,00	7.618.256.548,80	94,84	5.144.217.445,00
2	Dinas Kesehatan	71.862.651.646,81	71.007.063.273,00	98,81	18.730.008.752,99
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	741.413.100,01	729.674.700,00	98,42	2.998.217.490,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	440.599.781,00	410.511.576,00	93,17	235.709.908,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.783.980,00	30.440.991,00	98,89	217.660.656,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.117.275.724,00	2.077.030.396,00	98,10	2.861.098.984,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	680.557.760,00	660.739.500,00	97,09	711.140.356,00
8	Dinas Sosial	133.140.891,00	120.030.580,00	90,15	115.422.883,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	165.639.543,00	131.643.063,00	79,48	1.046.308.140,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	87.551.000,00	76.433.000,00	87,30	219.413.550,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.760.875.020,00	2.677.967.650,00	97,00	1.237.883.792,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	354.580.868,00	341.602.424,00	96,34	70.593.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	199.576.846,00	199.300.000,00	99,86	60.550.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	249.600.125,00	232.212.414,00	93,03	317.062.570,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	73.553.268,60	73.010.000,00	99,26	278.365.000,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	738.409.745,00	716.463.602,00	97,03	29.735.000,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	374.367.745,00	326.080.000,00	87,10	222.952.312,00
18	Sekretariat Daerah	1.481.799.804,66	1.417.804.800,00	95,68	645.679.020,00
19	Sekretariat DPRD	1.435.927.279,00	483.223.100,00	33,65	713.971.750,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	756.387.237,00	735.992.000,00	97,30	581.235.280,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	81.341.093,00	79.305.000,00	97,50	0,00
22	Kecamatan Kamipang	183.995.702,87	183.738.820,00	99,86	63.599.000,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	106.124.333,00	104.581.700,00	98,55	0,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	219.739.850,24	216.883.530,00	98,70	142.994.386,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	382.181.915,00	355.667.000,00	93,06	33.210.000,00
26	Kecamatan Pulau Malan	136.161.902,00	100.160.000,00	73,56	17.000.000,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	166.316.033,00	158.220.000,00	95,13	204.260.300,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	479.065.681,00	477.754.950,00	99,73	20.436.610,00
29	Kecamatan Marikit	82.668.796,00	82.500.000,00	99,80	26.304.000,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	63.230.320,00	63.025.918,00	99,68	37.929.225,00
31	Kecamatan Mendawai	33.775.300,00	31.850.000,00	94,30	40.465.000,00
32	Kecamatan Bukit Raya	99.803.400,00	98.650.000,00	98,84	3.885.000,00
33	Kecamatan Petak Malai	37.898.817,00	37.785.000,00	99,70	69.918.900,00
34	Inspektorat Daerah	370.078.900,00	366.210.000,00	98,95	169.224.318,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	524.681.198,00	444.131.892,00	84,65	113.828.000,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.132.223.550,35	11.789.118.400,00	77,91	7.008.441.644,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.024.832.370,00	937.769.600,00	91,50	164.400.000,00
38	Badan Pendapatan Daerah	498.216.713,00	467.734.000,00	93,88	854.923.611,00
39	Dinas Perhubungan dan Perikanan	573.916.922,00	554.175.406,00	96,56	841.828.000,00
Jumlah		112.913.340.540,54	106.614.740.833,80	94,42	46.249.873.882,99

Nilai anggaran di atas disajikan berdasarkan Perbup Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 yang tidak melalui persetujuan DPRD Kabupaten Katingan. Jika disajikan berdasarkan Perda Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 maka nilai anggaran adalah sebesar Rp93.296.054.030,00, sehingga nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp106.614.740.833,80 telah melampaui pagu anggaran sebesar Rp13.318.686.803,80 (Rp93.296.054.030,00 - Rp106.614.740.833,80).

5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		160.277.154.014,83	153.018.617.584,00

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp162.045.369.748,00 terealisasi Rp160.277.154.014,83 atau 98,91%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp.153.018.617.584,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.258.536.430,83.

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Objek
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	159.542.549.148,00	157.904.615.720,83	98,97	149.614.864.274,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	242.690.600,00	242.090.600,00	99,75	17.760.000,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	289.218.100,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.822.130.000,00	1.734.603.694,00	95,20	2.602.185.210,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	406.000.000,00	363.844.000,00	89,62	494.590.000,00
Jumlah		162.045.369.748,00	160.277.154.014,83	98,91	153.018.617.584,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.1.40
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	49.489.385.879,00	48.785.098.050,71	98,58	42.098.912.006,00
2	Dinas Kesehatan	83.774.430.500,00	83.050.645.685,00	99,14	61.578.377.902,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.321.000.000,00	1.299.309.909,90	98,36	4.310.277.673,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	1.940.130.619,00	1.880.520.718,00	96,93	21.181.492.317,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66.600.000,00	66.200.000,00	99,4	147.150.000,00
6	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.251.753.657,00	1.242.000.000,00	99,22	21.985.512,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186.531.000,00	186.300.000,00	99,88	0
8	Dinas Lingkungan Hidup	482.283.300,00	481.600.000,00	99,86	372.652.537,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.000.000.000,00	995.000.000,00	99,5	349.265.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	50.000.000,00	49.850.000,00	99,7	0
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	1.195.336.800,00	1.192.000.000,00	99,72	2.078.000.000,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	2.400.000.000,00	2.394.100.000,00	99,75	5.910.927.600,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	160.250.000,00	159.600.000,00	99,59	391.900.300,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	901.246.000,00	860.331.540,97	95,46	806.633.784,00
15	Sekretariat Daerah	3.807.654.323,00	3.790.595.000,00	99,55	5.166.300.000,00
16	Sekretariat DPRD	0	0	0	274.200.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	385.000.000,00	381.565.210,00	99,11	2.630.338.943,00
18	Kecamatan Kamipang	265.710.000,00	265.300.000,00	99,85	198.500.000,00
19	Kecamatan Katingan Hilir	344.030.000,00	343.080.000,00	99,72	189.950.000,00
20	Kecamatan Katingan Tengah	0	0	0	195.300.000,00
21	Kecamatan Petak Malai	0	0	0	0
22	Kecamatan Katingan Hulu	0	0	0	179.459.460,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	464.586.000,00	397.800.000,00	85,62	220.000.000,00
24	Dinas Perhubungan dan Perikanan	33.466.500,00	33.466.500,00	100	847.010.000,00
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.115.144.184,00	1.110.225.856,00	99,56	261.484.000,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	230.760.000,00	207.566.080,00	89,95	0
27	Badan Pendapatan Daerah	743.807.520,00	742.913.015,25	99,88	194.599.955,00
28	Inspektorat Daerah	128.200.000,00	128.100.000,00	99,92	192.100.000,00
29	BKPSDM	0	0	0	186.400.000,00
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.087.348.000,00	9.067.374.067,00	99,78	2.864.414.595,00
31	Dinas Sosial	869.185.466,00	827.512.382,00	95,21	170.986.000,00
32	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	351.530.000,00	339.100.000,00	96,46	0
Jumlah		162.045.369.748,00	160.277.154.014,83	98,91	153.018.617.584,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

105.242.194.176,61

132.461.127.644,00

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp110.735.899.202,28 terealisasi Rp 105.242.194.176,61 atau 95,04%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp132.461.127.644 berarti mengalami penurunan sebesar Rp27.218.933.467,39,00.

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Kesehatan	1.150.000.000,00	1.144.771.501,00	99,55	0
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	102.259.099.202,28	96.845.957.678,11	94,71	109.045.898.553,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	3.405.000.000,00	3.368.585.116,00	98,93	18.931.812.668,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	283.500.000,00
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	290.000.000,00	289.400.000,00	99,79	526.850.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	620.000.000,00	617.000.000,00	99,52	0
7	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu pintu	620.000.000,00	616.000.000,00	99,35	445.500.000,00
8	Dinas Perhubungan dan Perikanan	330.000.000,00	329.600.000,00	99,88	370.700.000,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	199.800.000,00	199.600.000,00	99,90	0
10	Inspektorat	500.000.000,00	499.000.000,00	99,8	0
11	Kecamatan Katingan Kuala	578.000.000,00	578.000.000,00	100	1.133.398.000,00
12	Kecamatan Katingan Hilir	0	0	0	338.113.423,00
13	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	200.000.000,00	199.704.157,00	99,85	511.300.000,00
14	Kecamatan Katingan Tengah	264.000.000,00	260.438.980,00	98,65	399.400.000,00
15	Kecamatan Katingan Hulu	255.000.000,00	254.136.744,50	99,66	474.655.000,00
16	Kecamatan Bukit Raya	65.000.000,00	40.000.000,00	61,54	0
Jumlah		110.735.899.202,28	105.242.194.176,61	95,04	132.461.127.644,00

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Objek
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.402.035.242,29	87.595.307.011,63	94,80	115.510.445.116,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	16.583.863.959,99	15.898.397.164,98	95,87	14.096.210.005,00
3	Belanja Modal Instalasi	350.000.000,00	349.250.000,00	99,79	0,00
4	Belanja Modal Jaringan	1.400.000.000,00	1.399.240.000,00	99,95	2.854.472.523,00
Jumlah		110.735.899.202,28	105.242.194.176,61	95,04	132.461.127.644,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		235.131.200,00	1.100.504.955,00

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 target sebesar Rp236.331.000,00 terealisasi Rp235.131.200,00 atau 99,49%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.100.504.955,00 berarti mengalami penurunan sebesar Rp865.373.755,00.

Tabel 5.1.43
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Objek
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	236.331.000,00	235.131.200,00	99,49	152.104.955,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0	0	0	704.400.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0		244.000.000,00
Jumlah		236.331.000,00	235.131.200,00	99,492	1.100.504.955,00

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan	236.331.000,00	235.131.200,00	99,49	722.354.955,00
2	Sekretariat Daerah	0	0	0	134.150.000,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	100	0
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	45.000.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	199.000.000,00
Jumlah		236.331.000,00	235.131.200,00	99,49	1.100.504.955,00

Nilai anggaran di atas disajikan berdasarkan Perbup Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 yang tidak melalui persetujuan DPRD Kabupaten Katingan. Jika disajikan berdasarkan Perda Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 maka nilai anggaran adalah sebesar Rp16.331.000,00, sehingga nilai realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp235.131.200,00 telah melampaui pagu anggaran sebesar Rp218.800.200,00 (Rp16.331.000,00 - Rp235.131.200,00).

5.1.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		347.790.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 target sebesar Rp350.790.000,00 terealisasi Rp347.790.000,00 atau 99,14%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.1.45
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per Objek
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	350.790.000,00	347.790.000,00	99,14	0,00
Jumlah		350.790.000,00	347.790.000,00	99,14	0,00

Tabel 5.1.46
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dinas Perhubungan dan Perikanan	250.000.000,00	249.000.000,00	99,60	0,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.790.000,00	98.790.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		350.790.000,00	347.790.000,00	99,14	0,00

5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.605.409.963,00	1.062.262.800,00

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD Kabupaten Katingan TA 2024 sebesar Rp8.232.227.250,00 terealisasi sebesar Rp1.605.409.963,00 sebesar 19,50%.

Tabel 5.1.47
Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Tak Terduga	8.232.227.250,00	1.605.409.963,00	19,50	1.062.262.800,00
Jumlah	8.232.227.250,00	1.605.409.963,00	19,50	1.062.262.800,00

5.1.2.4	Belanja Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2024
		227.161.662.514,70	220.900.965.767,00

Anggaran Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp227.196.542.586,00 dapat teralisasi sebesar Rp227.161.662.514,70 atau 99,98% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp220.900.965.767,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.260.696.747,70.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.1.48
Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Transfer Bagi Hasil	6.481.006.786,00	6.446.126.714,70	99,46	4.474.309.567,00
Transfer Bantuan Keuangan	220.715.535.800,00	220.715.535.800,00	100,00	216.426.656.200,00
Jumlah	227.196.542.586,00	227.161.662.514,70	99,98	220.900.965.767,00

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil

31 Desember 2024	31 Desember 2023
6.446.126.714,70	4.474.309.567,00

Anggaran Transfer TA 2024 sebesar Rp6.481.006.786,00 terealisasi Rp6.446.126.714,70 atau 99,46%, dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.474.309.567,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp1.971.817.147,00.

Tabel 5.1. 49
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.000.000.000,00	4.973.382.942,25	99,47	2.984.877.705,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.481.006.786,00	1.472.743.772,45	99,44	1.489.431.862,00
Jumlah	6.481.006.786,00	6.446.126.714,70	99,46	4.474.309.567,00

Nilai anggaran di atas disajikan berdasarkan Perbup Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 yang tidak melalui persetujuan DPRD Kabupaten Katingan. Jika disajikan berdasarkan Perda Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 maka nilai anggaran adalah sebesar Rp2.230.692.724,00, sehingga nilai realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp6.446.126.714,70 telah melampaui pagu anggaran sebesar Rp4.215.433.990,70 (Rp2.230.692.724,00 - Rp6.446.126.714,70).

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
220.715.535.800,00	216.426.656.200,00

Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 terdiri Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.1.50
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	81.076.610.200,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	220.470.535.800,00	220.470.535.800,00	100,00	135.105.046.000,00
Jumlah	220.715.535.800,00	220.715.535.800,00	100,00	216.426.656.200,00

Anggaran Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp220.715.535.800,00 terealisasi Rp220.715.535.800,00 atau 100% terdiri atas Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Insentif RT/RW, Honor DKA, Sekretaris Damang dan Mantir.

Nilai anggaran di atas disajikan berdasarkan Perbup Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 yang tidak melalui persetujuan DPRD Kabupaten Katingan. Jika disajikan berdasarkan Perda Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 maka nilai anggaran adalah sebesar Rp216.422.190.800,00, sehingga nilai realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp220.715.535.800,00 telah melampaui pagu anggaran sebesar Rp4.293.345.000,00 (Rp216.422.190.800,00 - Rp220.715.535.800,00).

5.1.3	Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran	31 Desember 2024 (1.945.222.598,00)	31 Desember 2023 (39.935.342.523,10)
--------------	---	--	---

Dari realisasi Pendapatan sebesar Rp1.585.199.112.311,46 dan Belanja sebesar Rp1.587.144.334.909,47 pada Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Katingan mengalami defisit sebesar Rp1.945.222.598,00. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp39.935.342.523,10 mengalami penurunan sebesar Rp37.990.119.925,09.

5.1.4	Pembiayaan	31 Desember 2024 56.623.488.153,98	31 Desember 2023 96.531.337.523,08
--------------	-------------------	---	---

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan ataupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi Pembiayaan (Netto) Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2024 sebesar Rp56.623.488.153,98 atau 100,05% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD-P TA 2024 sebesar Rp56.595.995.000,00 hal tersebut jika dibandingkan dengan pembiayaan Netto TA 2023 sebesar Rp96.531.337.523,08 mengalami penurunan sebesar Rp39.907.849.369,10 dapat dilihat sebagai berikut



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.1.51
Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penerimaan Pembiayaan	56.595.995.000,00	56.623.488.153,98	100,05	111.410.337.523,08
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	14.879.000.000,00
Jumlah	56.595.995.000,00	56.623.488.153,98	100,05	96.531.337.523,08

5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		56.623.488.153,98	111.410.337.523,08

Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah berasal dari penggunaan SiLPA tahun lalu sebesar Rp56.623.488.153,98 dari anggaran sebesar Rp56.595.995.000,00 atau 100,05%. Dibandingkan dengan penggunaan SiLPA Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp111.410.337.523,08 terdapat penurunan sebesar Rp54.786.849.369,10.

Tabel 5.1.52
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penerimaan Pembiayaan	56.595.995.000,00	56.623.488.153,98	100,05	111.410.337.523,08
Jumlah	56.595.995.000,00	56.623.488.153,98	100,05	111.410.337.523,08

5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	14.879.000.000,00

Merupakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan TA 2024 atas penyertaan modal daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.53
Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	14.879.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	14.879.000.000,00

Tidak ada pengeluaran pembiayaan Kabupaten Katingan TA 2024 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp14.879.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Anggaran (SiLPA)	54.678.265.555,97	56.595.994.999,98

SiLPA TA 2024 sebesar Rp54.678.265.555,97 mengalami penurunan sebesar Rp1.917.729.444,01 dari SiLPA TA 2023 sebesar Rp56.595.994.999,98. Rincian



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		56.595.994.999,98	111.394.517.123,08

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelum dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp56.595.994.999,98.

5.2.2	Penggunaan SAL	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		56.623.488.153,98	111.410.337.523,08

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2024 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp56.623.488.153,98.

5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		54.678.265.555,97	56.595.994.999,98

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 1 (satu) tahun periode pelaporan.

Sisa lebih/kurang tahun 2024 sebesar Rp56.595.994.999,98 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp56.595.994.999,98;
- Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp56.623.488.153,98;
- Selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL sebesar Rp27.493.154,00; dan
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah sebesar Rp54.678.265.555,97.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		27.493.154,00	15.820.400,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi kurang atas kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebesar Rp27.493.154,00 yaitu koreksi atas kurang saji Kas Dana BOS.

5.2.5	Lain-lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi lain-lain pada SAL.

5.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		54.678.265.555,97	111.394.517.123,08

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp54.678.265.555,97 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Anggaran Lebih
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Kas di BUD	47.601.787.155,20	43.672.033.158,46	3.929.753.996,74
2	Kas Di Bendahara Pengeluaran	900	0	900,00
3	Kas Di Bendahara Penerimaan	52.735.500,00	54.696.000,00	-1.960.500,00
4	Kas Di BLUD	3.168.405.006,63	7.988.268.537,60	-4.819.863.530,97
6	Kas Di Bendahara BOS	1.113.359.385,22	1.014.184.541,66	99.174.843,56
5	Kas Di Bendahara FKTP	75.557.741,92	774.505.455,26	-698.947.713,34
7	Lainnya	0	3.092.307.307,00	-3.092.307.307,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	2.666.419.867,00	0	2.666.419.867,00
Jumlah		54.678.265.555,97	56.595.994.999,98	-1.917.729.444,01

5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Neraca Pemerintahan Kabupaten Katingan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp3.428.072.450.255,13. Kewajiban sebesar Rp6.382.488.367,09 dan Ekuitas sebesar Rp3.422.292.560.824,10.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.3.1	Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		3.428.072.450.255,13	3.333.645.899.961,78

Total saldo Aset Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.428.072.450.255,13 atau mengalami penambahan sebesar Rp 94.426.550.293,35 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.333.645.899.961,78 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Rincian Aset
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
Aset Lancar	111.328.735.850,97	89.281.014.342,10	22.047.721.508,87
Investasi Jangka Panjang	98.462.782.165,66	98.600.455.657,66	(137.673.492,00)
Aset Tetap	3.089.410.407.772,84	2.864.128.785.577,66	225.281.622.195,18
Dana Cadangan	0	0	0,00
Aset Lainnya	128.870.524.465,66	281.635.644.384,36	(152.765.119.918,70)
Jumlah	3.428.072.450.255,13	3.333.645.899.961,78	94.426.550.293,35

5.3.1.1	Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		111.328.735.850,97	89.281.014.342,10

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp111.328.735.850,97 atau ada kenaikan sebesar Rp22.047.721.508,87 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp89.281.014.342,10 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.2
Aset Lancar
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
Kas di Kas Daerah	47.601.787.155,20	43.672.033.158,46	3.929.753.996,74
Kas di Bendahara Penerimaan	52.735.500,00	54.696.000,00	(1.960.500,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	900	0	900,00
Kas di BLUD	3.168.405.006,63	7.988.268.537,60	(4.819.863.530,97)
Kas di Bendahara BOS	1.113.359.385,22	1.014.184.541,66	99.174.843,56
Kas di Bendahara FKTP	75.557.741,92	774.505.455,26	(698.947.713,34)
Kas Lainnya		3.092.307.307,00	(3.092.307.307,00)
Setara Kas	2.666.419.867,00	0	2.666.419.867,00
Investasi Jangka Pendek	0	0	-
Piutang Pajak Daerah	9.279.720.022,00	8.303.699.273,00	976.020.749,00
Piutang Retribusi daerah	44.378.641,00	44.378.641,00	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	-
Piutang lain-lain PAD yang sah	1.989.484.094,00	915.336.473,75	1.074.147.620,25
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0	-



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
Piutang Transfer antar Daerah	12.405.915.204,00	7.840.424.712,00	4.565.490.492,00
Piutang Lainnya	4.079.368.385,31	2.439.949.142,57	1.639.419.242,74
Penyisihan Piutang	-5.626.270.107,69	-5.028.322.936,90	(597.947.170,79)
Beban Dibayar Dimuka	0	0	-
Persediaan	34.477.874.056,38	18.169.554.036,70	16.308.320.019,68
Jumlah	111.328.735.850,97	89.281.014.342,10	22.047.721.508,87

Tabel 5.3.3
Aset Lancar per PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	1.113.359.385,22	910.164.141,66	203.195.243,56
2	Dinas Kesehatan	15.972.765.397,13	12.418.951.514,13	3.553.813.883,00
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	8.809.445.497,93	13.115.213.186,09	-4.305.767.688,16
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	17.018.631.029,73	3.155.186.381,79	13.863.444.647,94
4	Dinas Lingkungan Hidup	91.033.500,00	91.033.500,00	0,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	21.511.976,00	23.261.976,00	-1.750.000,00
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	0	46.514.000,00	-46.514.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	496.481.230,00	1.039.678.709,00	-543.197.479,00
8	Sekretariat Daerah	468.186.176,20	168.804.624,55	299.381.551,65
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	47.783.897.692,04	54.139.678.564,60	-6.355.780.872,56
10	Dinas Perhubungan dan Perikanan	0	1.600.000,00	-1.600.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	19.553.423.966,72	4.170.927.744,28	15.382.496.222,44
Jumlah		111.328.735.850,97	89.281.014.342,10	22.047.721.508,87

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

47.601.787.155,20

43.672.033.158,46

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah terdiri Kas di Rekening Kas Daerah sebesar Rp47.601.787.155,20 ada kenaikan sebesar Rp3.929.753.996,74 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp43.672.033.158,46.

Tabel 5.3.4
Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian/Rekening	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%	Naik / (Turun)
Kas di Kas Daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah) No. Rek: 1050101000005	47.601.787.155,20	43.672.033.158,46	(3,93)	3.929.753.996,74
Jumlah	47.601.787.155,20	43.672.033.158,46	(8,99)	3.929.753.996,74



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel diatas saldo kas di kas daerah sebesar Rp47.601.787.155,20 berbeda dengan saldo di Rekening Kas Daerah Nomor 1050101000005 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp47.717.608.535,20 sehingga terdapat selisih sebesar Rp115.821.380,00. Adapun penjelasan selisih sebagai berikut:

Pengurangan:

- Bank kurang posting nilai SP2D No. 00717/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P9/12/2024 sebesar Rp115.621.380,00 dan No. 0000597/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P7/12/2024 sebesar Rp200.000,00 yang merupakan Dana Desa sehingga nilai bersih sebesar Rp115.821.380,00.

Saldo Kas di Kas Daerah disajikan senilai Rp47.601.787.155,20, saldo tersebut seluruhnya merupakan kas yang sudah jelas peruntukannya (Kas yang Dibatasi Penggunaannya). Kas yang Dibatasi Penggunaannya yang merupakan sisa dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.5
Penjelasan Rincian Kas Di Kas Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Kas	Saldo (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	%
		2024	2023		
A	Kas yang Ditentukan Penggunaannya				
	DAU BIDANG PENDIDIKAN	4.209.926.951,00	0,00	4.209.926.951,00	-
	DAU BIDANG KESEHATAN	1.644.466.971,00	764.544.840,07	879.922.130,93	115,09
	DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM	925.474.432,00	3.266.348.324,00	(2.340.873.892,00)	71,67
	SILPA DAU BIDANG KESEHATAN	9.013.280,00	0,00	9.013.280,00	-
	DBH PAJAK & BUKAN PAJAK	12.554.647.879,65	0,00	12.554.647.879,65	-
	DBH DR	2.933.353.934,00	8.343.047.035,00	(5.409.693.101,00)	64,84
	DBH SAWIT	3.344.003.868,00	14.701.342.000,00	(11.357.338.132,00)	77,25
	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU	1.447.557,00	1.447.557,00	-	100,00
	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	3.403.250.954,00	1.670.665.954,00	1.732.585.000,00	103,71
	DAK FISIK	15.494.063.603,55	11.540.263.935,39	3.953.799.668,16	34,26
	DAK NON FISIK	3.082.137.725,00	3.384.373.513,00	(302.235.788,00)	8,93
	Jumlah Kas yang Ditentukan Penggunaannya	47.601.787.155,20	43.672.033.158,46	3.929.753.996,74	8,99
B	Kas yang Tidak Ditentukan Penggunaannya				
	DANA ALOKASI UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00
	DBH PAJAK & BUKAN PAJAK	0,00	0,00	0,00	0,00
	DBH PAJAK PROPINSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	DBH PAJAK ROKOK	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kas yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kas di Kas Daerah	47.601.787.155,20	43.672.033.158,46	3.929.753.996,74	8,99

Selain saldo kas yang ditentukan penggunaannya senilai Rp47.601.787.155,20 sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas, terdapat sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp9.488.421.108,61 yang dipergunakan untuk Belanja selain peruntukan DAK Fisik. Nilai tersebut merupakan sisa DAK Fisik TA 2022 dan sebelumnya yang tercatat di aplikasi OMSPAN. Atas hal tersebut Bendahara



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Umum Daerah akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka untuk pemulihan Dana Alokasi Khusus Fisik yang telah digunakan.

5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		52.735.500,00	54.696.000,00

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.6
Kas di Kas Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	Dinas Kesehatan	52.735.500,00	3.000.000,00	49.735.500,00
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta pariwisata	0,00	46.514.000,00	(46.514.000,00)
3	Dinas Perhubungan dan Perikanan	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
4	Sekretariat Daerah	0,00	3.582.000,00	(3.582.000,00)
Jumlah		52.735.500,00	54.696.000,00	(1.960.500,00)

Saldo pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.735.500,00 merupakan penerimaan pada RS Pratama Tumbang Samba atas klaim rawat inap dan klaim persalinan Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin pada tanggal 16 Desember 2024 yang disetorkan ke Kas Daerah pada 27 Februari 2025 dan 12 Maret 2025.

5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		900,00	0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp900,00 yang merupakan sisa Tambah Uang atas belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi pada Bendahara Pengeluaran Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir yang telah disetorkan pada tanggal 14 Januari 2025.

5.3.1.1.4	Kas di BLUD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		3.168.405.006,63	7.988.268.537,60

Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan saldo kas BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.168.405.006,63 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.7
Kas BLUD RSUD Mas Amsyar
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
Nomor Rek. 1050102001488	3.154.753.555,63	7.960.300.053,60	(4.805.546.497,97)
Kas Bendahara Penerimaan	13.651.451,00	27.968.484,00	(14.317.033,00)
Jumlah	3.168.405.006,63	7.988.268.537,60	(4.819.863.530,97)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas terdapat penurunan saldo Kas di BLUD RSUD Mas Amsyar sebesar Rp4.819.863.530,97.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	1.113.359.385,22	1.014.184.541,66

Saldo akhir kas di bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.113.359.385,22 atau ada kenaikan sebesar Rp105.273.856,02 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp99.174.843,56 disajikan sebagai berikut:.

Tabel 5.3.8
Koreksi Kas BOS
Per 1 Januari 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir TA. 2023	Koreksi	Saldo Awal TA. 2024
Dana BOS Afirmasi			
- SDN	267.702.078,00	-	267.702.078,00
- SMPN	2.313.950,00	-	2.313.950,00
Dana BOS Kinerja			
- SDN	113.019.429,00	-	113.019.429,00
- SMPN	508.068,00	-	508.068,00
Dana BOS Reguler			
- SDN	165.833.126,96	-	165.833.126,96
- SMPN	163.102.906,04	2.063.154,00	165.166.060,04
Dana BOS SWASTA			
- SDN	360.852,31	(102.701,31)	258.151,00
- SMPN	19.951.199,15	(8.059.465,15)	11.891.734,00
BOS PAUD	281.354.050,00	25.430.000,00	306.784.050,00
BOS Pendidikan Kesetaraan	0	-	0
Bansos Pendidikan	38.882,20	-	38.882,20
Jumlah	1.014.184.541,66	19.330.987,54	1.033.515.529,20

Tabel 5.3.9
Kas BOS
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
Dana BOS Afirmasi				
- SDN	267.702.078,00	0	0	267.702.078,00
- SMPN	2.313.950,00	0	0	2.313.950,00
Dana BOS Kinerja				
- SDN	113.019.429,00	540.000.000,00	607.500.000,00	45.519.429,00
- SMPN	508.068,00	585.000.000,00	480.000.000,00	105.508.068,00
Dana BOS Reguler				
- SDN	165.833.126,96	18.128.607.747,00	18.212.795.508,72	81.645.365,24
- SMPN	165.166.060,04	9.027.800.032,00	9.028.095.579,26	164.870.512,78
Dana BOS Swasta				
- SDN	258.151,00	1.491.800.000,00	1.492.058.151,00	0,00
- SMPN	11.891.734,00	931.067.000,00	942.958.734,00	0,00
BOS PAUD	306.784.050,00	2.088.628.950,00	1.949.651.900,00	445.761.100,00
BOS Pendidikan Kesetaraan	0	1.736.860.000,00	1.736.860.000,00	0
Bansos Pendidikan	38.882,20	0	0	38.882,20
Jumlah	1.033.515.529,20	34.529.763.729,00	34.449.919.872,98	1.113.359.385,22

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	75.557.741,92	774.505.455,26



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Saldo kas di bendahara FKTP yang merupakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp75.557.741,92 mengalami penurunan sebesar Rp698.947.713,34 bila dibandingkan tahun sebelumnya Rp774.505.455,26. Adapun rincian Kas di Bendahara FKTP sebagai berikut.

Tabel 5.3.10
Kas di Bendahara FKTP
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Pendapatan dan Penerimaan	Belanja	Saldo Akhir
Kas Bendahara FKTP	774.505.455,26	7.683.649.310,00	8.382.597.023,34	75.557.741,92
Jumlah	774.505.455,26	7.683.649.310,00	8.382.597.023,34	75.557.741,92

Tabel 5.3.11
Rincian FKTP pada Puskesmas
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	PUSKESMAS	SALDO AWAL	Jumlah Penerimaan Jaspel dan OP 2024	Jumlah Pengeluaran SPJ Jaspel dan OP 2024	Saldo Akhir 2024
1	2		3	4	5
1	UPTD Kesehatan P Bahandang	33.679.684,88	283.787.314,00	317.451.371,84	15.627,04
2	UPTD Kesehatan Baun Bango	14.643.735,50	339.491.206,00	354.134.895,76	45,74
3	UPTD Kesehatan Mendawai	43.664.623,90	293.972.000,00	337.208.357,41	428.266,49
4	UPTD Kesehatan Pegatan 1	49.890.900,88	418.183.748,00	458.526.964,71	9.547.684,17
5	UPTD Kesehatan Pegatan 2	53.286.451,43	413.937.290,00	437.200.685,46	30.023.055,97
6	UPTD Kesehatan Kasongan	35.421.223,82	503.619.475,00	538.961.083,92	79.614,90
7	UPTD Kesehatan Kasongan 2	27.875.650,56	537.258.450,00	564.699.703,17	434.397,39
8	UPTD Kesehatan Kereng Pangi	71.703.576,57	781.020.320,00	852.723.641,84	254,73
9	UPTD Kesehatan Pendahara	26.038.814,60	513.528.068,00	539.555.405,18	11.477,42
10	UPTD Kesehatan Buntut Bali	52.448.610,21	393.131.704,00	445.196.832,15	383.482,06
11	UPTD Kesehatan T Samba	138.386.730,04	845.260.706,00	983.535.622,60	111.813,44
12	UPTD Kesehatan T Kaman	139.010.431,00	447.600.364,00	575.104.219,85	11.506.575,15
13	UPTD Kesehatan T Hiran	24.743.588,46	273.736.273,00	298.454.377,48	25.483,98
14	UPTD Kesehatan T Sanamang	41.462.875,51	435.012.548,00	454.804.422,61	21.671.000,90
15	UPTD Kesehatan T Kajamei	8.752.009,70	205.285.705,00	213.310.700,29	727.014,41
16	UPTD Kesehatan T Baraoi	7.699.176,20	243.983.221,00	251.091.297,95	591.099,25
17	RS Pratama Tumbang Samba	5.797.372,00	754.840.918,00	760.637.441,12	848,88
	JUMLAH	774.505.455,26	7.683.649.310,00	8.382.597.023,34	75.557.741,92

5.3.1.1.7 Kas Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	3.092.307.307,00

Saldo Kas Lainnya yang merupakan Saldo Kas Bantuan Operasional Kesehatan Akreditasi Puskemas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00.

5.3.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	2.666.419.867,00	0,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas yang merupakan Saldo Kas sebesar Rp3.092.307.307,00 yang direklas dari Kas Bantuan Operasional Kesehatan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Akreditasi Puskemas Tahun 2023 serta Realisasi Penerimaan dan Belanja Tahun 2024.

5.3.1.1.8 Setara Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Saldo setara kas per 31 Desember 2024 adalah nihil, sama dengan saldo tahun sebelumnya.

5.3.1.1.9 Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2024 adalah nihil, sama dengan saldo tahun sebelumnya.

5.3.1.1.10 Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	9.279.720.022,00	8.303.699.273,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.279.720.022,00 atau ada kenaikan sebesar Rp976.020.749,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp8.303.699.273,00. Piutang Pajak Daerah adalah tagihan pajak daerah yang menjadi hak pemerintah daerah yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.12
Piutang Pendapatan Pajak Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir
Piutang Pajak Hotel	9.085.000,00	0,00	0,00	9.085.000,00
Piutang Pajak Restoran	100.968.849,00	0,00	400.000,00	100.568.849,00
Piutang Pajak Hiburan	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Piutang Pajak reklame	6.809.073,00	0,00	0,00	6.809.073,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	867.836.347,00	928.172.414,00	867.836.347,00	928.172.414,00
Piutang PBB-P2	7.311.750.004,00	1.202.324.396,00	286.239.714,00	8.227.834.686,00
Piutang BPHTB	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
Jumlah	8.303.699.273,00	2.130.496.810,00	1.154.476.061,00	9.279.720.022,00

Rincian Piutang Pajak Daerah disajikan per Tahun sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Piutang Pendapatan Pajak Hotel
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2024
1.	2014	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.	2015	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.	2016	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2024
4.	2020	7.190.000,00	0,00	0,00	7.190.000,00
	Jumlah	9.085.000,00	0,00	0,00	9.085.000,00

Tabel 5.3.14
Piutang Pendapatan Pajak Restoran
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2024
1.	2012	1.449.200,00	0,00	0,00	1.449.200,00
2.	2013	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00
3.	2014	5.421.649,00	0,00	0,00	5.421.649,00
4.	2015	2.875.500,00	0,00	0,00	2.875.500,00
5.	2016	32.744.000,00	0,00	0,00	32.744.000,00
6.	2017	17.905.000,00	0,00	0,00	17.905.000,00
7.	2018	18.270.000,00	0,00	0,00	18.270.000,00
8.	2019	4.955.000,00	0,00	400.000,00	4.555.000,00
9.	2020	16.870.000,00	0,00	0,00	16.870.000,00
	Jumlah	100.968.849,00	0,00	400.000,00	100.568.849,00

Tabel 5.3.15
Piutang Pendapatan Pajak Hiburan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2024
1.	2015	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	2017	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Jumlah	1.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Tabel 5.3.16
Piutang Pendapatan Pajak Reklame
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2024
1.	2013	5.650.323,00	0,00	0,00	5.650.323,00
2.	2014	1.158.750,00	0,00	0,00	1.158.750,00
	Jumlah	6.809.073,00	0,00	0,00	6.809.073,00

Tabel 5.3.17
Piutang Pendapatan Pajak PBB P2
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2024
1.	2012	1.384.587.172,00	0,00	6.354.166,00	1.378.233.006,00
2.	2013	493.413.931,00	0,00	2.811.365,00	490.602.566,00
3.	2014	348.638.252,00	0,00	2.316.570,00	346.321.682,00
4.	2015	306.546.540,00	0,00	2.809.402,00	303.737.138,00
5.	2016	366.844.187,00	0,00	3.450.345,00	363.393.842,00
6.	2017	504.340.200,00	0,00	6.417.813,00	497.922.387,00
7.	2018	612.721.918,00	0,00	6.462.189,00	606.259.729,00
8.	2019	836.149.507,00	0,00	15.471.959,00	820.677.548,00
9.	2020	421.736.963,00	9.834.438,00	16.139.503,00	415.431.898,00
10.	2021	457.902.421,00	9.998.698,00	17.599.830,00	450.301.289,00
11.	2022	589.972.198,00	9.859.153,00	38.690.192,00	561.141.159,00
12.	2023	988.896.715,00	10.029.656,00	167.716.380,00	831.209.991,00
13.	2024		1.162.602.451,00		1.162.602.451,00
	Jumlah	7.311.750.004,00	1.202.324.396,00	286.239.714,00	8.227.834.686,00

5.3.1.1.11 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2024
44.378.641,00

31 Desember 2023
44.378.641,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp44.378.641,00 atau tidak ada kenaikan/penurunan dari saldo tahun sebelumnya. Piutang Retribusi Daerah adalah tagihan retribusi daerah yang menjadi hak pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.18
Piutang Pendapatan Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	4.450.001,00	0,00	0,00	4.450.001,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.206.640,00	0,00	8.216.640,00	990.000,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	30.722.000,00	0,00	0,00	30.722.000,00
Jumlah	44.378.641,00	0,00	0,00	44.378.641,00

Saldo Piutang Retribusi Tahun 2024 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya. Penambahan dan pengurangan Piutang Retribusi Tahun 2024 merupakan reklasifikasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menjadi Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan karena kesalahan pengelompokan. Rincian Piutang Retribusi sebagai berikut.

Tabel 5.3.19
Rincian Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2024
1.	2017-2019	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2.	2020	15.832.000,00	0,00	0,00	15.832.000,00
3.	2021	14.006.640,00	0,00	0,00	14.006.640,00
4.	2022	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Jumlah	38.938.640,00	0,00	0,00	38.938.640,00

Tabel 5.3.20
Piutang Pendapatan Retribusi Daerah Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	38.938.640,00	38.938.640,00	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	5.440.001,00	5.440.001,00	0,00
	Jumlah	44.378.641,00	44.378.641,00	44.378.641,00

5.3.1.1.12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 adalah Nihil.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.3.1.1.13	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.989.484.094,00	915.336.473,75

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.989.484.094,00 atau ada kenaikan sebesar Rp1.074.147.620,25 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp915.336.473,75 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah
31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir
Piutang Pendapatan BLUD	862.185.761,75	-429.491,75	3.659.060.179,00	2.584.483.067,00	1.936.333.382,00
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	53.150.712,00		-	-	53.150.712,00
Jumlah	915.336.473,75		3.659.060.179,00	2.584.483.067,00	1.989.484.094,00

Piutang Pendapatan BLUD merupakan pengakuan piutang pada RSUD Mas Amsyar kepada pihak lain di luar pemerintah daerah dan sudah terverifikasi nilainya. Pada tahun 2024 terdapat koreksi pada BPJS Ketenagakerjaan dimana Klaim pada Tahun 2023 Senilai Rp3.174.651,75 disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya senilai Rp2.745.160,00 atas hasil verifikasi yang dilakukan sehingga dilakukan koreksi pengurangan saldo awal piutang sebesar Rp429.491,75. Rincian Piutang Pendapatan BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.3.22
Piutang Pendapatan BLUD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Penambahan	Pelunasan	Saldo Akhir
I	YANKESKIN 2022	859.011.110,00		0,00	442.593.621,00	416.417.489,00
II	YANKESKIN 2023	0,00		57.349.306,00	57.349.306,00	0,00
III	YANKESKIN 2024	0,00		1.519.915.893,00	0,00	1.519.915.893,00
IV	BPJS KETENAGAKERJAAN	3.174.651,75	(429.491,75)	5.562.300,00	8.307.460,00	0,00
V	BPJS KESEHATAN	0,00		2.076.232.680,00	2.076.232.680,00	0,00
JUMLAH TOTAL		861.756.270,00		3.659.060.179,00	2.584.483.067,00	1.936.333.382,00

Selanjutnya Piutang Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp53.150.712,00 berupa pencatatan piutang kepada PT. AVIASTAR sejak tahun 2014 (berdasarkan surat Dirut AVIASTAR No. 102REV/ASM/DZ/III/2014) yang masih belum dapat terkonfirmasi karena saat ini PT. AVIASTAR sudah tidak beroperasi lagi.

Rincian Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang sah berdasarkan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.23
Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	BLUD RSUD Mas Amsyar	1.936.333.382,00	862.185.761,75	1.074.147.620,25
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	53.150.712,00	53.150.712,00	0,00
Jumlah		1.989.484.094,00	915.336.473,75	1.074.147.620,25



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.3.1.1.14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 adalah nihil, sama dengan saldo tahun sebelumnya.

5.3.1.1.15	Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		12.405.915.204,00	7.840.424.712,00

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 Rp. 12.405.915.204,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.565.490.492,00 dari tahun 2023 sebesar Rp7.840.424.712,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/100/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV (Empat) kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 yang akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.3.24
Piutang Transfer Antar Daerah
(Bagi Hasil Pajak Provinsi)
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Pengurangan Piutang	Penambahan Piutang	Saldo Akhir
Pajak Rokok	0	0	0	-
Pajak Kendaraan Bermotor	821.210.282,00	821.210.282,00	2.158.440.940,00	2.158.440.940,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	945.012.676,00	945.012.676,00	2.974.318.968,00	2.974.318.968,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.065.984.692,00	6.065.984.692,00	7.236.222.826,00	7.236.222.826,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	8.217.062,00	8.217.062,00	36.932.470,00	36.932.470,00
Jumlah	7.840.424.712,00	7.840.424.712,00	12.405.915.204,00	12.405.915.204,00

5.3.1.1.16	Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		4.079.368.385,31	2.439.949.142,57

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.079.368.385,31 atau ada kenaikan sebesar Rp1.639.419.242,74 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.439.949.142,57. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.25
Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	Pengurangan	Penambahan	31 Desember 2024
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap bendahara	2.185.834.214,00	0,00	0,00	2.185.834.214,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	Pengurangan	Penambahan	31 Desember 2024
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Non bendahara	254.114.928,57	9.163.800,00	1.648.583.042,74	1.893.534.171,31
Jumlah	2.439.949.142,57	9.163.800,00	1.639.419.242,74	4.079.368.385,31

Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.26
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun	Saldo Awal	Pengurangan Piutang	Penambahan Piutang	Koreksi	Saldo Akhir
SY	2008	129.118.851,00	0	0	0	129.118.851,00
Rt(istri alm Dana)	2006	31.547.677,00	0	0	0	31.547.677,00
Ys	2018	1.415.694.683,00	0	0	0	1.415.694.683,00
AbD	2015	609.473.003,00	0	0	0	609.473.003,00
Jumlah		2.185.834.214,00	0	0	0	2.185.834.214,00

Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Non Bendahara mengalami perubahan jika dibandingkan dengan saldo Piutang atas Tuntutan Ganti Rugi terhadap Non Bendahara tahun sebelumnya berdasarkan Laporan KNKD. Terdapat pengurangan piutang dari KG dan RSND sebesar Rp9.163.800,00 dan penambahan atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.639.419.242,74 dan telah dilakukan pengembalian pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.27
Bagian Lancar TGR terhadap Non Bendahara
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun	Saldo Awal	Pengurangan Piutang	Penambahan Piutang	Koreksi	Saldo Akhir
IKL-M3/GB	2006	224.000.000,00	-	-	-	224.000.000,00
KG	2009	800,00	800,00	-	-	0,00
Rsnd	2023	30.114.128,57	9.163.000,00	-	-	20.951.128,57
Kurang Volume Pekerjaan	2024			1.648.583.042,74		1.648.583.042,74
Jumlah		254.114.928,57	9.163.800,00	1.648.583.042,74	0,00	1.893.534.171,31

Rincian atas Kurang Volume Pekerjaan sebesar Rp1.648.583.042,74 sebagai berikut :

No.	Paket Pekerjaan	Kurang Volume Pekerjaan (Rp)
a	b	c
A	Dinas Kesehatan	
1.	Pembangunan Rumah Sakit Katingan Kuala	876.492.948,47
2.	Pembangunan Gedung Puskesmas Pendahara	233.013.529,32



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No.	Paket Pekerjaan	Kurang Volume Pekerjaan (Rp)
3.	Pembangunan Gedung Puskesmas Kereng Pangi	190.200.856,86
4.	Pembangunan Penambahan ruang CSSD Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba	70.372.958,23
5.	Pembangunan Pekerjaan Gedung Rawat Inap (KRIS)	198.169.678,15
6.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Pegatan II	8.598.133,98
7.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Mendawai	6.860.211,28
8.	Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Ruang CT Scan dan Ruang Cytotoxic Drug	29.065.261,01
Sub Total A		1.612.773.577,30
B	Satpol PP Damkar	
1	Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemadam Kebakaran	24.394.755,98
2.	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Aula Kantor Satpol PP	11.414.709,46
Sub Total B		35.809.465,44
Jumlah (A + B)		1.648.583.042,74

5.3.1.1.17	Penyisihan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(5.626.270.107,69)	(5.028.322.936,90)

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor 08 tentang piutang, penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain, adapun penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.28
Penyisihan Piutang
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)			
Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
Penyisihan Piutang Pajak	(5.501.011.402,83)	(4.867.836.984,22)	633.174.418,61
Penyisihan Piutang Retribusi	(22.866.664,50)	(21.116.664,50)	1.750.000,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(102.392.040,36)	(139.369.288,18)	(36.977.247,82)
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(5.626.270.107,69)	(5.028.322.936,90)	597.947.170,79

Tabel 5.3.29
Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualifikasi
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)					
Uraian	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Total
Penyisihan Piutang Pajak	10.453.874,33	139.235.115,00	445.271.593,50	4.906.050.820,00	5.501.011.402,83
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	1.510.664,00	11.416.000,50	9.940.000,00	22.866.664,50



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Total
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD	0,00	49.241.328,36	0,00	53.150.712,00	102.392.040,36
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.453.874,33	189.987.107,36	456.687.594,00	4.969.141.532,00	5.626.270.107,69

Penggolongan piutang Retribusi dan persentase (%) besarnya penyisihan piutang dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

- Kualitas lancar, jika umur piutang dari 0 sampai dengan 1 bulan sebesar 0,5%;
- Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan sebesar 10%;
- Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan sebesar 50%; dan
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan sebesar 100%.

Tabel 5.3.30
Penyisihan Piutang Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	BLUD RSUD Mas Amsyar	(49.241.328,36)	(86.218.576,18)	(36.977.247,82)
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	(17.426.664,00)	(15.676.664,00)	1.750.000,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(53.150.712,00)	(53.150.712,00)	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	(5.506.451.403,33)	(4.873.276.984,72)	633.174.418,61
Jumlah		(5.626.270.107,69)	(5.028.322.936,90)	597.947.170,79

5.3.1.1.18	Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Beban Dibayar Dimuka merupakan beban yang belum menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan tapi telah dibayar oleh pemerintah daerah terlebih dahulu, sehingga jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan dan kategorikan masuk kedalam pos Aset Lancar. Beban Dibayar Dimuka yang disajikan dalam laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2024 adalah Nihil.

5.3.1.1.19	Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		34.477.874.056,38	18.169.554.036,70

Saldo persediaan sebesar Rp34.477.874.056,38 merupakan saldo Persediaan 31 Desember 2024 berdasarkan hasil *stock opname* atau hasil inventarisasi fisik dengan menggunakan nilai perolehan terakhir. Persediaan per 31 Desember 2024 pada masing-masing PD dapat di lihat pada tabel sebagai berikut



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.3.31
Persediaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Bukit Raya	-	199.062.000,00	199.062.000,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	39.705.000,00	39.705.000,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	31.500.000,00	31.500.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	120.682.000,00	120.682.000,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	425.000,00	425.000,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	6.750.000,00	6.750.000,00	-
2	Kecamatan Kamipang	-	342.334.838,00	342.334.838,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	101.140.000,00	101.140.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	241.194.838,00	241.194.838,00	-
3	Kecamatan Katingan Hilir	-	879.990.136,00	879.990.136,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	155.396.300,00	155.396.300,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	6.250.000,00	6.250.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	607.867.571,00	607.867.571,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	7.492.500,00	7.492.500,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	58.350.000,00	58.350.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	44.633.765,00	44.633.765,00	-
4	Kecamatan Katingan Hulu	-	222.416.625,00	222.416.625,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	38.708.000,00	38.708.000,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-			-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	181.701.050,00	181.701.050,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	46.575,00	46.575,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-			-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	1.961.000,00	1.961.000,00	-
5	Kecamatan Katingan Kuala	-	230.246.260,00	230.246.260,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	59.294.000,00	59.294.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	170.952.260,00	170.952.260,00	-
6	Kecamatan Katingan Tengah	-	420.539.750,00	420.539.750,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	109.958.650,00	109.958.650,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	273.851.100,00	273.851.100,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	36.730.000,00	36.730.000,00	-



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Keterangan	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
7	Kecamatan Marikit	-	163.488.894,00	163.488.894,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	58.188.600,00	58.188.600,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	100.300.294,00	100.300.294,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
8	Kecamatan Mendawai	-	170.289.850,00	170.289.850,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	54.178.800,00	54.178.800,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	116.111.050,00	116.111.050,00	-
9	Kecamatan Petak Malai	-	398.996.862,00	398.996.862,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	152.531.000,00	152.531.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	246.465.862,00	246.465.862,00	-
10	Kecamatan Pulau Malan	-	200.272.400,00	200.272.400,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	31.837.000,00	31.837.000,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	706.000,00	706.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	167.729.400,00	167.729.400,00	-
11	Kecamatan Sanaman Mantikei	-	278.791.842,00	278.791.842,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	24.930.100,00	24.930.100,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	400.500,00	400.500,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	253.461.242,00	253.461.242,00	-
12	Kecamatan Tasik Payawan	-	170.965.400,00	170.965.400,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	2.223.400,00	2.223.400,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	157.666.400,00	157.666.400,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	93.800,00	93.800,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	10.981.800,00	10.981.800,00	-
13	Kecamatan Tewang Sanggalang Garing	-	188.001.900,00	188.001.900,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	21.300.000,00	21.300.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	161.611.900,00	161.611.900,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	90.000,00	90.000,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
14	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	884.672.773,00	884.672.773,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	85.142.252,00	85.142.252,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	748.264.521,00	748.264.521,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	51.266.000,00	51.266.000,00	-
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	493.825.689,00	493.825.689,00	-



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Keterangan	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
	1.1.7.01.01 Bahan	-	240.000,00	240.000,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	60.000,00	60.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	386.070.041,00	386.070.041,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	2.071.148,00	2.071.148,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	105.384.500,00	105.384.500,00	-
16	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	781.672.318,00	781.672.318,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	165.765.418,00	165.765.418,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	441.644.900,00	441.644.900,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	8.500.000,00	8.500.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	165.762.000,00	165.762.000,00	-
17	Dinas Lingkungan Hidup	91.033.500,00	2.504.773.769,00	2.504.773.769,00	91.033.500,00
	1.1.7.01.01 Bahan	3.271.000,00	1.819.880.255,00	1.819.880.255,00	3.271.000,00
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	87.762.500,00	50.710.860,00	50.710.860,00	87.762.500,00
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	548.593.810,00	548.593.810,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	25.409.112,00	25.409.112,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	28.939.000,00	28.939.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	31.240.732,00	31.240.732,00	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	662.157.975,00	662.157.975,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	100.768.463,00	100.768.463,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	561.389.512,00	561.389.512,00	-
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	1.078.088.757,00	1.078.088.757,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	40.338.807,00	40.338.807,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	631.347.850,00	631.347.850,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	40.474.100,00	40.474.100,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	354.749.000,00	354.749.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	11.179.000,00	11.179.000,00	-
20	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan	-	1.073.668.416,00	1.073.668.416,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	294.194.379,00	294.194.379,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	60.000,00	60.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	746.438.537,00	746.438.537,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	5.542.125,00	5.542.125,00	-



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Keterangan	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	10.258.000,00	10.258.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	17.175.375,00	17.175.375,00	-
21	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	1.428.856.844,00	1.428.856.844,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	7.969.000,00	7.969.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	1.420.887.844,00	1.420.887.844,00	-
22	Dinas Kesehatan (Apbd,Bok,Kapitas + Hibah)	5.769.510.945,00	15.217.133.441,38	16.792.517.401,19	4.194.126.985,19
	1.1.7.01.01 Bahan	1.998.000,00	1.330.206.997,00	1.323.372.647,00	8.832.350,00
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	47.425.000,00	47.425.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.977.100,00	7.072.070.111,00	7.072.856.711,00	2.190.500,00
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	5.582.301.345,00	6.399.240.614,38	7.812.853.324,19	4.168.688.635,19
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	1.887.000,00	1.887.000,00	-
	1.1.7.01.06 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.990.000,00	-	1.990.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	180.244.500,00	267.204.620,00	433.033.620,00	14.415.500,00
	1.1.7.02.02 P I P A	-	99.099.099,00	99.099.099,00	-
23	Dinas Perhubungan Dan Perikanan	-	4.542.062.112,00	4.542.062.112,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	471.068.400,00	471.068.400,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	571.480.612,00	571.480.612,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	2.998.522.100,00	2.998.522.100,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	418.341.000,00	418.341.000,00	-
	1.1.7.02.01 Komponen	-	78.650.000,00	78.650.000,00	-
	1.1.7.02.02 P I P A	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	490.698.537,00	7.762.461.823,00	2.144.661.823,00	6.108.498.537,00
	1.1.7.01.01 Bahan	-	1.106.304.264,28	1.106.304.264,28	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	2.490.000,00	2.490.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	961.816.329,00	961.816.329,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	490.698.537,00	5.647.794.554,72	29.994.554,72	6.108.498.537,00
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	4.920.000,00	4.920.000,00	-
	1.1.7.01.09 Persediaan Dalam Proses	-	7.567.475,00	7.567.475,00	-
	1.1.7.02.02 P I P A	-	31.569.200,00	31.569.200,00	-
25	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata	-	704.960.928,00	693.363.128,00	11.597.800,00
	1.1.7.01.01 Bahan	-	133.439.978,00	133.439.978,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	2.745.000,00	2.745.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	542.196.350,00	530.598.550,00	11.597.800,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Keterangan	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	211.600,00	211.600,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	21.576.000,00	21.576.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	1.992.000,00	1.992.000,00	-
	1.1.7.02.02 P I P A	-	2.800.000,00	2.800.000,00	-
26	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	-	2.221.805.634,00	2.081.861.534,00	139.944.100,00
	1.1.7.01.01 Bahan	-	77.612.250,00	61.145.400,00	16.466.850,00
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	1.917.685.460,00	1.794.208.210,00	123.477.250,00
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	74.560.998,00	74.560.998,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	151.946.926,00	151.946.926,00	-
27	Dinas Pendidikan	-	2.755.316.923,00	2.755.316.923,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	181.701.081,00	181.701.081,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	2.485.518.842,00	2.485.518.842,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	288.000,00	288.000,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	85.670.000,00	85.670.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	2.139.000,00	2.139.000,00	-
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	-	617.065.012,00	617.065.012,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	272.301.052,00	272.301.052,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	337.406.960,00	337.406.960,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	7.357.000,00	7.357.000,00	-
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	-	200.013.072,00	200.013.072,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	83.280.000,00	83.280.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	116.733.072,00	116.733.072,00	-
30	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	538.415.169,00	2.276.350.794,00	2.696.565.963,00	118.200.000,00
	1.1.7.01.01 Bahan	119.934.000,00	494.777.337,00	496.511.337,00	118.200.000,00
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	0,00	23.872.125,00	23.872.125,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0,00	923.169.430,00	923.169.430,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	0,00	148.848.101,00	148.848.101,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	0,00	436.862.112,00	436.862.112,00	-
	1.1.7.01.06 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	418.481.169,00	67.849.689,00	486.330.858,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	0,00	180.972.000,00	180.972.000,00	-
31	Dinas Perindustrian Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	-	1.069.988.030,00	1.069.988.030,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	44.346.616,00	44.346.616,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	590.000,00	590.000,00	-



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Keterangan	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	335.445.214,00	335.445.214,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	366.000,00	366.000,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	674.189.500,00	674.189.500,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	15.050.700,00	15.050.700,00	-
32	Inspektorat	-	420.382.700,00	420.382.700,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	5.441.000,00	5.441.000,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	305.000,00	305.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	402.357.700,00	402.357.700,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	2.020.000,00	2.020.000,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	516.000,00	516.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	9.743.000,00	9.743.000,00	-
33	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	903.862.967,00	899.106.967,00	4.756.000,00
	1.1.7.01.01 Bahan	-	30.188.936,00	30.188.936,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	21.410.000,00	21.410.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	694.530.664,00	689.774.664,00	4.756.000,00
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	153.138.367,00	153.138.367,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	4.595.000,00	4.595.000,00	-
34	Badan Pendapatan Daerah	274.564.000,00	1.399.080.247,00	1.399.080.247,00	274.564.000,00
	1.1.7.01.01 Bahan	-	215.746.248,00	215.746.248,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	274.564.000,00	1.016.509.199,00	1.016.509.199,00	274.564.000,00
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	6.249.000,00	6.249.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	160.575.800,00	160.575.800,00	-
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	690.229.250,00	690.229.250,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	405.518.350,00	405.518.350,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	1.680.000,00	1.680.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	271.801.900,00	271.801.900,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	104.000,00	104.000,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	480.000,00	480.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	10.575.000,00	10.575.000,00	-
	1.1.7.02.02 Pipa	-	70.000,00	70.000,00	-
36	Rsud Mas Amsyar	-	94.710.950,00	94.710.950,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	48.801.150,00	48.801.150,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	45.779.800,00	45.779.800,00	-



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Keterangan	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan		130.000,00	130.000,00	
37	Sekretariat DPRD	-	2.938.203.751,00	2.938.203.751,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	223.573.546,00	223.573.546,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	2.320.418.800,00	2.320.418.800,00	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	29.646.000,00	29.646.000,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	64.485.405,00	64.485.405,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	291.840.000,00	291.840.000,00	-
	1.1.7.02.02 Pipa	-	8.240.000,00	8.240.000,00	-
38	Sekretariat Daerah	165.222.624,55	5.484.398.067,00	5.181.434.515,35	468.186.176,20
	1.1.7.01.01 Bahan	-	993.133.826,00	993.133.826,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	27.810.000,00	27.810.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	165.222.624,55	4.005.695.241,00	3.702.731.689,35	468.186.176,20
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	-	36.660.000,00	36.660.000,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	166.228.000,00	166.228.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	254.871.000,00	254.871.000,00	-
39	Dinas Sosial	110.370.000,00	755.688.811,00	866.058.811,00	-
	1.1.7.01.01 Bahan	-	19.484.300,00	19.484.300,00	-
	1.1.7.01.02 Suku Cadang	-	151.465.000,00	151.465.000,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	49.530.000,00	469.178.331,00	518.708.331,00	-
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	42.315.000,00	71.739.080,00	114.054.080,00	-
	1.1.7.01.06 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	18.525.000,00	7.000.000,00	25.525.000,00	-
	1.1.7.01.07 Natura Dan Pakan	-	36.822.100,00	36.822.100,00	-
40	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	3.720.120.310,61	14.561.180.851,94	1.262.670.132,82	17.018.631.029,73
	1.1.7.01.01 Bahan	-	171.261.460,00	171.261.460,00	-
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	764.533.928,82	626.118.744,00	1.091.408.672,82	299.244.000,00
	1.1.7.01.05 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	2.955.586.381,79	13.763.800.647,94		16.719.387.029,73
41	Rsud Mas Amsyar (Blud)	4.229.991.116,67	12.567.580.618,13	13.072.688.558,14	3.724.883.176,66
	1.1.7.01.01 Bahan	8.791.200,00	1.934.323.382,39	1.769.425.008,61	173.689.573,78
	1.1.7.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	82.661.650,01	866.943.361,00	949.605.011,01	-
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	4.138.538.266,66	9.766.247.274,74	10.353.591.938,52	3.551.193.602,88
	1.1.7.02.02 P I P A	-	66.600,00	66.600,00	-
42	Dinas Kesehatan (UPT) Puskesmas DII	2.779.627.833,87	6.678.738.507,62	7.134.913.589,87	2.323.452.751,60
	1.1.7.01.04 Obat-Obatan	2.779.627.833,87	6.678.738.507,62	7.134.913.589,87	2.323.452.751,60
	Jumlah	18.169.554.036,70	96.634.327.788,07	80.326.007.768,37	34.477.874.056,38



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Persediaan yang diserahkan ke pihak ketiga/masyarakat per 31 Desember 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai Rp6.108.498.541,00 dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) senilai Rp16.719.387.029,73. Atas hal tersebut, terdapat persediaan yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga/masyarakat namun belum dilakukan proses administrasi pemindahtanganan berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas 6 (enam) paket pekerjaan pada Dinas PUPR senilai Rp2.479.862.314,50 dan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Perkimtan senilai Rp7.460.911.830,36.

5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		98.462.782.165,66	98.600.455.657,66

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp98.462.782.165,66 terdiri dari investasi non permanen sebesar Rp402.109.620,00 dan investasi permanen sebesar Rp98.060.672.545,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.32
Investasi Jangka Panjang
31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(dalam rupiah)	
			Naik / (Turun)	
			%	(Rp)
Investasi Non Permanen	402.109.620,00	402.109.620,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	98.060.672.545,66	98.198.346.037,66	99,86	(137.673.492,00)
Jumlah	98.462.782.165,66	98.600.455.657,66	99,86	(137.673.492,00)

5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		402.109.620,00	402.109.620,00

Saldo Investasi Non Permanen sebesar Rp402.109.620,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.33
Investasi Non Permanen
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)								
No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyer-taan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyer-taan Modal Tahun 2024	Hasil Penyer-taan Modal (Inves-tasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7
1	2006	KSU LEPP-M3, Kelompok Nelayan & Pembudidayaan Ikan	M o U	-	402.109.620,00	0,00	0,00	402.109.620,00
J U M L A H					402.109.620,00	0,00	0,00	402.109.620,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Pada laporan keuangan tahun 2023 pada Catatan atas Laporan Keuangan telah di jelaskan bahwa potensi tidak tertagih atas penyertaan modal kelompok pembudidaya ikan dan nelayan adalah sangat tinggi sehingga dipertimbangkan untuk dilakukan lelang jaminan atas sebuah bidang tanah (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dengan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 593.1/031/BAPT-KPHu-I/PEM, dan melalui Surat Tugas Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan pada Tahun 2018 telah dilakukan survey terhadap bidang tanah yang menjadi jaminan tersebut dan atas hasil survey tersebut diperoleh informasi bahwa jaminan berupa bidang tanah tersebut siap untuk diproses lelang. Saat ini masih dikonsultasikan kepada KPKNL terkait proses lelang yang akan dilakukan.

5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2024 98.060.672.545,66	31 Desember 2023 98.198.346.037,66

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Katingan berupa penyertaan modal pada :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 44;
2. PT. Katingan Mandiri Persada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada Tahun 2014-2018 Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 18;
3. PT. Jaminan Kredit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 45;
4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Katingan mengalami kerugian sebesar Rp137.673.492,00 pada Tahun 2024; dan
5. PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Tabel 5.3.34
Investasi Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Nama Badan Usaha	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penambahan Penyertaan Modal Tahun Berjalan	Akumulasi Kerugian s/d Tahun Lalu	Labai/Rugi Tahun berjalan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Modal Hibah	Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng	Perda No. 13 Tahun 2006, Perda No. 7 Tahun 2011 & Perda	90.850.000.000,00	0,00	0	0	0	0	90.850.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Nama Badan Usaha	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penambahan Penyertaan Modal Tahun Berjalan	Akumulasi Kerugian s/d Tahun Lalu	Labai/Rugi Tahun berjalan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Modal Hibah	Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
	No. 6 Tahun 2014							
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Katingan	Perda No. 17 Tahun 2004 & Perda No. 10 Tahun 2008	14.061.448.703,74	0	(12.801.846.896,00)	(137.673.492,00)	(10.000.000,00)	2.207.681.000,00	3.319.609.315,74
PD. Katingan Jaya Mandiri	Perda No. 23 Tahun 2004 & Perda No. 9 Tahun 2008	11.950.000.000,00	0	(11.261.637.282,81)	0	0	0	688.362.717,19
PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)	Perda No. 7 Tahun 2014	1.000.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000.000,00
PT. Katingan Mandiri Persada (PT. KMP)	Perda No. 8 Tahun 2014	7.000.000.000,00	0	(4.377.590.357,34)	(419.709.129,93)	0	0	2.202.700.512,73
Jumlah		124.861.448.703,74	0,00	(28.441.074.536,15)	(557.382.621,93)	(10.000.000,00)	2.207.681.000,00	98.060.672.554,66

Penjelasan penyajian Investasi Permanen disajikan dengan metode ekuitas dan biaya, adapun penjelasan sebagai berikut:

1) Metode biaya

- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
Dilakukan tambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp14.879.000.000,00, sehingga saldo penyertaan modal tercatat sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp90.850.000.000,00.
- PT. Jaminan Kredit Daerah
Saldo penyertaan modal sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00. Tidak ada perubahan karena Pemerintah Kabupaten Katingan tidak memberikan Penyertaan Modal kembali kepada PT Jamkrida.

2) Metode ekuitas

- PD Katingan Jaya Mandiri
Saldo Investasi Permanen pada PD Katingan Jaya Mandiri tidak mengalami perubahan sejak Tahun 2014 karena perusahaan ini pada dasarnya telah berubah status dan berganti nama menjadi PT Katingan Mandiri Persada berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Katingan Mandiri dan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada Tahun 2014-2018. Pemkab Katingan belum melakukan rekonsiliasi antara nilai ekuitas PD Katingan Jaya Mandiri per 31 Desember 2014 sebesar Rp688.362.717,19 dengan Aset PT Katingan Mandiri Persada.
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Katingan
Penyajian penyertaan modal pada PDAM *audited* sebesar Rp3.319.609.315,74. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Rp3.457.282.807,74, terdapat penurunan penyertaan modal sebesar Rp137.673.492,00. Adapun penjelasan penurunan penyertaan modal disebabkan mengalami kerugian tahun 2024.

- PT. Katingan Mandiri Persada
PT Katingan Mandiri Persada tidak mengalami perubahan atas jumlah investasi yang disertakan sampai dengan tahun 2024, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan keuangan yang disampaikan untuk tahun 2024.

5.3.1.3	Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		3.089.410.407.772,84	2.864.128.785.577,66

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.089.410.407.772,84 mengalami kenaikan sebesar Rp225.281.622.195,18 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.35
Aset Tetap
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	Tanah	666.694.858.459,50	5.804.530.906,50	993.368.500,00	671.506.020.866,00
2	Peralatan Dan Mesin	563.250.723.754,68	112.237.460.523,88	15.300.574.552,56	660.187.609.726,00
3	Gedung Dan Bangunan	1.236.795.903.641,65	182.799.733.194,12	13.225.558.321,49	1.406.370.078.514,28
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	2.820.598.414.916,02	135.202.546.865,01	11.645.367.827,44	2.944.155.593.953,59
5	Aset Tetap Lainnya	216.806.431.280,21	2.873.390.362,00	51.858.000,00	219.627.963.642,21
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.700.406.070,46	21.521.520.469,53	10.490.404.468,00	43.731.522.071,99
	Jumlah Nilai Perolehan	5.536.846.738.122,52	460.439.182.321,04	51.707.131.669,49	5.945.578.788.774,07
7	Akumulasi Penyusutan	(2.672.717.952.544,86)	(189.573.503.895,43)	(6.123.075.439,06)	(2.856.168.381.001,23)
	Jumlah Aset Tetap	2.864.128.785.577,66	270.865.678.425,61	45.584.056.230,43	3.089.410.407.772,84

5.3.1.3.1	Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		671.506.020.866,00	666.694.858.459,50

Saldo Aset Tetap Tanah pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 671.506.020.866,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.811.162.406,50 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.36
Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2024	Naik/ (Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Tanah	666.694.858.459,50	0	5.804.530.906,50	993.368.500,00	671.506.020.866,00	4.811.162.406,50
	Jumlah Nilai Perolehan	666.694.858.459,50	0,00	5.804.530.906,50	993.368.500,00	671.506.020.866,00	4.811.162.406,50

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah dijelaskan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Saldo Awal	666.694.858.459,50
Koreksi Saldo Awal	0,00
Perbedaan Belanja Modal dan Penambahan Aset Tetap	666.694.858.459,50
Penambahan	
BM	1.478.500.000,00
Penambahan bukan pengadaan / hibah	4.291.030.906,50
Mutasi masuk antar SKPD	35.000,000
Jumlah Penambahan	5.804.530.906,50
Pengurangan	
Penghapusan	958.368.500,00
Mutasi Keluar antar SKPD	35.000.000,00
Jumlah Pengurangan	993.368.500,00
Saldo Akhir	671.506.020.866,00

Tabel 5.3.37
Aset Tetap Tanah berdasarkan PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	Dinas Pendidikan	28.057.737.169,00	28.057.737.169,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	3.642.084.213,00	3.678.620.213,00	(36.536.000,00)
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	10.161.511.000,00	10.161.511.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.388.664.459,00	146.823.073.902,50	1.565.590.556,50
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	4.503.786.090,00	5.460.618.590,00	(956.832.500,00)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	898.386.000,00	898.386.000,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.564.000,00	129.564.000,00	0,00
9	Dinas Sosial	3.545.000.000,00	3.545.000.000,00	0,00
10	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.285.100.500,00	2.285.100.500,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.276.681.075,00	5.276.681.075,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	344.300.000,00	344.300.000,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	1.886.648.810,00	1.886.648.810,00	0,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	2.854.568.500,00	1.376.068.500,00	1.478.500.000,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.871.045.310,00	3.145.604.960,00	2.725.440.350,00
18	Sekretariat Daerah	431.837.179.600,00	431.837.179.600,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00
20	Kecamatan Katingan Kuala	784.110.400,00	784.110.400,00	0,00
21	Kecamatan Kamipang	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00
22	Kecamatan Tasik Payawan	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00
23	Kecamatan Katingan Hilir	421.288.000,00	421.288.000,00	0,00
24	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	1.210.874.000,00	1.210.874.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
25	Kecamatan Pulau Malan	303.720.000,00	303.720.000,00	0,00
26	Kecamatan Katingan Tengah	135.814.000,00	135.814.000,00	0,00
27	Kecamatan Sanaman Mantikei	329.875.000,00	329.875.000,00	0,00
28	Kecamatan Marikit	148.996.000,00	148.996.000,00	0,00
29	Kecamatan Katingan Hulu	120.106.000,00	120.106.000,00	0,00
30	Kecamatan Mendawai	150.975.000,00	150.975.000,00	0,00
31	Kecamatan Bukit Raya	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
32	Kecamatan Petak Malai	25.189.000,00	25.189.000,00	0,00
33	Inspektorat	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	510.048.000,00	510.048.000,00	0,00
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.136.372.412,00	1.136.372.412,00	0,00
37	Dinas Perhubungan dan Perikanan	13.166.636.328,00	13.166.636.328,00	0,00
38	Badan Pendapatan Daerah	1.155.000.000,00	1.120.000.000,00	35.000.000,00
Jumlah		671.506.020.866,00	666.694.858.459,50	4.811.162.406,50

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024

31 Desember 2023

660.187.609.726,00

563.250.723.754,68

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp660.187.609.726,00 mengalami kenaikan sebesar Rp96.936.885.971,32 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.38
Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi Perubahan Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Peralatan Dan Mesin	563.250.723.754,68	0,00	112.237.460.523,88	15.300.574.552,56	660.187.609.726,00	96.936.885.971,32
Jumlah Nilai Perolehan		563.250.723.754,68	0,00	112.237.460.523,88	15.300.574.552,56	660.187.609.726,00	96.936.885.971,32

Adapun ringkasan mutasi aset tetap peralatan dan mesin dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Saldo Awal	563.250.723.754,68
Koreksi Saldo Awal	0
Saldo Awal setelah koreksi	563.250.723.754,68
Penambahan	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.614.740.833,80
Reklasifikasi Belanja Barang Jasa	997.500.096,00
Reklasifikasi Belanja BOS	3.093.601.743,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.531.617.851,08
Jumlah Penambahan	112.237.460.523,88



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Pengurangan	Penghapusan	7.435.241.290,00	
	Extracomtable	1.689.671.545,56	
	Reklas	1.190.844.300,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.983.317.417,00	
	Reklas Belanja barang dan jasa	1.500.000,00	
Jumlah Pengurangan			15.300.574.552,56
Saldo Akhir			660.187.609.726,00

Tabel 5.3.39
Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Berdasarkan PD Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	96.096.492.977,29	85.213.611.622,97	10.882.881.354,32
2	Dinas Kesehatan	240.442.243.954,82	172.067.130.049,82	68.375.113.905,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.997.963.619,00	20.172.198.519,00	-2.174.234.900,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	8.620.259.572,90	8.195.322.996,90	424.936.576,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.488.227.933,08	3.000.916.942,08	487.310.991,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25.061.674.579,15	23.434.210.483,15	1.627.464.096,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.453.447.494,00	16.753.332.994,00	700.114.500,00
8	Dinas Sosial	3.081.685.147,38	2.961.654.567,38	120.030.580,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8.292.560.398,02	8.160.917.335,02	131.643.063,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.816.812.946,00	6.992.535.496,00	-175.722.550,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	29.601.296.219,12	27.638.602.919,12	1.962.693.300,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.077.222.940,18	4.735.620.516,18	341.602.424,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.729.940.016,68	3.530.640.016,68	199.300.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.933.438.958,35	5.671.526.544,35	261.912.414,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	4.379.309.703,44	4.563.479.703,44	-184.170.000,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	6.920.544.775,30	6.204.081.173,30	716.463.602,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.671.668.782,64	13.437.387.782,64	234.281.000,00
18	Sekretariat Daerah	44.033.278.061,88	43.875.580.361,88	157.697.700,00
19	Sekretariat DPRD	12.262.640.492,61	11.304.226.192,61	958.414.300,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.058.475.740,13	4.462.633.740,13	595.842.000,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	1.916.071.333,34	1.352.086.333,34	563.985.000,00
22	Kecamatan Kamipang	2.014.709.380,00	1.944.000.560,00	70.708.820,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	746.509.450,00	674.927.750,00	71.581.700,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	2.489.987.962,00	2.262.076.432,00	227.911.530,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	1.432.249.512,00	1.016.782.512,00	415.467.000,00
26	Kecamatan Pulau Malan	1.275.176.066,66	1.125.224.066,66	149.952.000,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	1.888.894.700,00	1.710.998.700,00	177.896.000,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	819.281.060,00	720.226.110,00	99.054.950,00
29	Kecamatan Marikit	960.386.402,94	986.826.402,94	-26.440.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(turun)
30	Kecamatan Katingan Hulu	1.317.922.770,00	1.254.896.852,00	63.025.918,00
31	Kecamatan Mendawai	835.874.758,34	813.724.758,34	22.150.000,00
32	Kecamatan Bukit Raya	1.104.981.200,00	1.006.331.200,00	98.650.000,00
33	Kecamatan Petak Malai	1.233.598.150,00	1.197.313.150,00	36.285.000,00
34	Inspektorat	3.893.835.321,44	3.919.585.321,44	-25.750.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12.463.775.921,30	12.060.682.029,30	403.093.892,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	29.141.159.682,25	22.165.320.282,25	6.975.839.400,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.286.497.580,44	7.348.727.980,44	937.769.600,00
38	Dinas Perhubungan dan Perikanan	22.263.846.675,00	21.852.441.269,00	411.405.406,00
39	Badan Pendapatan Daerah	8.083.667.488,32	7.462.942.088,32	620.725.400,00
Jumlah		660.187.609.726,00	563.250.723.754,68	96.936.885.971,32

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024

1.406.370.078.514,28

31 Desember 2023

1.236.795.903.641,65

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.406.370.078.514,28 mengalami kenaikan sebesar Rp169.574.174.872,63 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.40
Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Perubahan Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2024	Naik/ (Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Gedung Dan Bangunan	1.236.795.903.641,65	0,00	182.799.733.194,12	13.225.558.321,49	1.406.370.078.514,28	169.574.174.872,63
Jumlah Nilai Perolehan		1.236.795.903.641,65	0,00	182.799.733.194,12	13.225.558.321,49	1.406.370.078.514,28	169.574.174.872,63

Adapun ringkasan mutasi aset tetap gedung dan bangunan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Saldo Awal			1.236.795.903.641,65
Koreksi Saldo Awal			0
Saldo Awal setelah koreksi			1.236.795.903.641,65
Penambahan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.277.154.014,83	
	Reklasifikasi Belanja Barang Jasa	1.026.685.650,00	
	Reklasifikasi Belanja jaskon	10.381.939.061,29	
	Mutasi Masuk antar OPD	86.000.000,00	
	Reklas Barang antar KIB	10.305.604.468,00	
	Belanja Modal JIJ	722.350.000,00	
	Jumlah Penambahan		182.799.733.194,12
Pengurangan	Penghapusan	1.778.692.720,95	
	Hibah	1.536.000,00	
	Mutasi Keluar antar OPD	86.000.000,00	
	KDP	5.048.570.768,00	
	Reklasifikasi	1.641.722.831,46	



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	3.137.418.150,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.531.617.851,08	
Jumlah Pengurangan		13.225.558.321,49
Saldo Akhir		1.406.370.078.514,28

Tabel 5.3.41
Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	429.334.504.611,31	378.285.728.625,04	51.048.775.986,27
2	Dinas Kesehatan	302.172.848.123,08	216.812.198.140,78	85.360.649.982,30
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.462.403.689,90	18.616.449.623,00	845.954.066,90
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	119.793.553.230,89	117.273.763.379,51	2.519.789.851,38
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.946.247.392,05	2.715.881.312,05	230.366.080,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.947.321.558,53	8.502.921.956,97	9.444.399.601,56
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.114.727.050,00	3.719.031.500,00	395.695.550,00
8	Dinas Sosial	9.216.511.176,00	8.291.796.794,00	924.714.382,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	39.830.016.021,63	38.338.816.021,63	1.491.200.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.392.915.200,00	8.193.810.200,00	199.105.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	26.079.207.542,81	25.241.353.992,81	837.853.550,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.368.731.480,00	3.177.564.080,00	1.191.167.400,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.210.688.524,97	4.254.756.984,00	955.931.540,97
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.304.790.320,00	7.076.240.320,00	-771.450.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	41.032.914.563,79	38.712.774.763,79	2.320.139.800,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	52.689.299.743,18	49.962.229.743,18	2.727.070.000,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.353.474.823,00	28.103.574.823,00	249.900.000,00
18	Sekretariat Daerah	106.423.703.548,90	102.382.079.298,90	4.041.624.250,00
19	Sekretariat DPRD	26.652.826.411,00	26.652.826.411,00	0,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.145.161.391,60	7.624.080.481,60	521.080.910,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	5.428.803.950,00	5.428.803.950,00	0,00
22	Kecamatan Kamipang	3.598.976.500,00	3.308.926.500,00	290.050.000,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	1.054.825.000,00	1.054.825.000,00	0,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	5.004.708.650,00	4.629.748.650,00	374.960.000,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	2.832.542.650,00	2.433.707.000,00	398.835.650,00
26	Kecamatan Pulau Malan	1.054.960.979,00	1.054.960.979,00	0,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	2.393.245.500,00	2.393.245.500,00	0,00
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	986.690.900,00	986.690.900,00	0,00
29	Kecamatan Marikit	722.098.200,00	722.098.200,00	0,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	1.054.569.860,00	1.054.569.860,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	naik/(turun)
31	Kecamatan Mendawai	1.714.511.500,00	1.714.511.500,00	0,00
32	Kecamatan Bukit Raya	922.676.200,00	922.676.200,00	0,00
33	Kecamatan Petak Malai	3.747.502.711,00	3.747.502.711,00	0,00
34	Inspektorat Daerah	7.174.332.300,00	7.041.243.400,00	133.088.900,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	14.445.064.690,00	13.981.176.690,00	463.888.000,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14.780.800.536,00	12.540.724.680,00	2.240.075.856,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.917.197.441,00	6.917.197.441,00	0,00
38	Dinas Perhubungan dan Perikanan	54.303.479.372,18	54.070.323.872,18	233.155.500,00
39	Badan Pendapatan Daerah	19.761.245.172,46	18.855.092.157,21	906.153.015,25
Jumlah		1.406.370.078.514,28	1.236.795.903.641,65	169.574.174.872,63

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.944.155.593.953,59	2.820.598.414.916,02

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.944.155.593.953,59 mengalami kenaikan sebesar Rp123.557.179.037,57 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.42
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Perubahan Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2024	Naik/ (Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	2.820.598.414.916,02	0,00	135.202.546.865,01	11.645.367.827,44	2.944.155.593.956,59	123.557.179.040,57
Jumlah Nilai Perolehan		2.820.598.414.916,02	0,00	135.202.546.865,01	11.645.367.827,44	2.944.155.593.956,59	123.557.179.040,57

Adapun ringkasan mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Saldo Awal	2.820.598.414.916,02
Koreksi Saldo Awal	0
Saldo Awal setelah koreksi	2.820.598.414.916,02
Penambahan	
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	111.728.201.426,61
Kapitalisasi	1.507.465.650,00
	21.782.079.788,40
Reklas	184.800.000,00
Jumlah Penambahan	135.202.546.865,01
Pengurangan	
Reklas Aset Lain-lain	217.759.425,91
Reklasifikasi ke KDP	11.427.608.401,53
Jumlah Pengurangan	11.645.367.827,44
Saldo Akhir	2.944.155.593.953,59



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.3.43
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(turun)
1	Dinas Pendidikan	2.400.499.625,56	2.386.449.625,56	14.050.000,00
2	Dinas Kesehatan	14.386.786.482,40	5.695.299.196,00	8.691.487.286,40
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.575.313.510.342,24	2.470.057.637.388,57	105.255.872.953,67
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	194.950.383.647,17	189.528.515.531,17	5.421.868.116,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	449.003.750,00	449.003.750,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	836.207.500,00	836.207.500,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	316.386.250,00	316.386.250,00	0,00
8	Dinas Sosial	1.110.103.000,00	1.110.103.000,00	0,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	45.198.177.325,00	45.198.177.325,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	904.601.600,00	904.601.600,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	8.174.667.095,00	8.174.667.095,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	939.171.588,00	939.171.588,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	332.345.415,25	332.345.415,25	0,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	775.341.700,00	775.341.700,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	852.409.767,00	852.409.767,00	0,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	3.259.502.184,00	2.945.252.184,00	314.250.000,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.359.850.116,00	8.718.050.116,00	641.800.000,00
18	Sekretariat Daerah	7.807.115.311,00	7.807.115.311,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	2.795.958.815,00	2.795.958.815,00	0,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.602.154.639,00	1.906.356.739,00	695.797.900,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	3.895.709.750,00	3.317.709.750,00	578.000.000,00
22	Kecamatan Kamipang	32.458.700,00	32.458.700,00	0,00
23	Kecamatan Katingan Hilir	1.408.784.223,00	1.231.934.223,00	176.850.000,00
24	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	1.756.568.107,00	1.546.998.300,00	209.569.807,00
25	Kecamatan Katingan Tengah	2.286.970.855,00	1.991.674.625,00	295.296.230,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

26	Kecamatan Marikit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
27	Kecamatan Katingan Hulu	2.364.343.444,50	2.065.456.700,00	298.886.744,50
28	Kecamatan Bukit Raya	230.534.500,00	190.534.500,00	40.000.000,00
29	Kecamatan Mendawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
30	Kecamatan Petak Malai	68.264.000,00	68.264.000,00	0,00
31	Inspektorat Daerah	1.512.170.441,28	963.320.441,28	548.850.000,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.986.703.725,00	1.986.703.725,00	0,00
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.118.774.598,69	44.893.924.598,69	224.850.000,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.540.213.992,00	1.540.213.992,00	0,00
35	Dinas Perhubungan dan Perikanan	7.709.412.596,00	7.559.662.596,00	149.750.000,00
36	Badan Pendapatan Daerah	1.449.508.868,50	1.449.508.868,50	0,00
Jumlah		2.944.155.593.953,59	2.820.598.414.916,02	123.557.179.037,57

5.3.1.3.5 Aset tetap Lainnya

31 Desember 2024

31 Desember 2023

219.627.963.642,21

216.806.431.280,21

Saldo Aset Tetap Lainnya pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp219.627.963.642,21 mengalami kenaikan sebesar Rp2.821.532.362,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp216.806.431.280,21.

Tabel 5.3.44
Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Perubahan Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2024	Naik/ (Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Aset Tetap Lainnya	216.806.431.280,21	0,00	2.873.390.362,00	51.858.000,00	219.627.963.642,21	2.821.532.362,00
	Jumlah Nilai Perolehan	216.806.431.280,21	0,00	2.873.390.362,00	51.858.000,00	219.627.963.642,21	2.821.532.362,00

Adapun ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	216.806.431.280,21
Koreksi Saldo Awal	0
Saldo Awal setelah koreksi	216.806.431.280,21
Penambahan	
Belanja Modal	235.131.200,00
Reklasifikasi Belanja Barang	2.638.259.162,00
Jasa	
Jumlah Penambahan	2.873.390.362,00
Pengurangan	
Penghapusan	51.858.000,00
Jumlah Pengurangan	51.858.000,00
Saldo Akhir	219.627.963.642,21



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.3.45
Aset Tetap Lainnya Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	34.505.125.272,15	32.468.734.910,15	2.036.390.362,00
2	Dinas Kesehatan	306.750.000,00	306.750.000,00	0,00
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	34.965.000,00	34.965.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.838.408.300,00	157.838.408.300,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	18.349.440.676,06	17.612.040.676,06	737.400.000,00
6	Dinas Sosial	0	0,00	0,00
7	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	410.193.844,00	410.193.844,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101.225.900,00	101.225.900,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	224.396.450,00	124.796.450,00	99.600.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.393.700,00	25.393.700,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	140.338.030,00	140.338.030,00	0,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	29.999.400,00	29.999.400,00	0,00
13	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	2.017.989.500,00	2.017.989.500,00	0,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	998.899.000,00	998.899.000,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	2.762.469.220,00	2.814.327.220,00	(51.858.000,00)
16	Sekretariat DPRD	334.831.250,00	334.831.250,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
18	Inspektorat Daerah	22.966.000,00	22.966.000,00	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	44.530.000,00	44.530.000,00	0,00
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.429.300,00	40.429.300,00	0,00
22	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.333.270.800,00	1.333.270.800,00	0,00
23	Badan Pendapatan Daerah	98.692.000,00	98.692.000,00	0,00
Jumlah		219.627.963.642,21	216.806.431.280,21	2.821.532.362,00

5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		43.731.522.071,99	32.700.406.070,46

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.731.522.071,99 mengalami kenaikan sebesar Rp11.031.116.001,53 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp32.700.406.070,46.

Tabel 5.3.46
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi Perubahan Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.700.406.070,46	0,00	21.521.520.469,53	10.490.404.468,00	43.731.522.071,99	11.031.116.001,53
Jumlah Nilai Perolehan		32.700.406.070,46	0,00	21.521.520.469,53	10.490.404.468,00	43.731.522.071,99	11.031.116.001,53



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Adapun ringkasan mutasi Kontruksi Dalam Pekerjaan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Saldo Awal		32.700.406.070,46
Koreksi Saldo Awal		0
Saldo Awal setelah koreksi		32.700.406.070,46
Penambahan	Belanja Modal Kontruksi	5.163.774.068,00
	Kapitalisasi	4.930.138.000,00
	Reklasifikasi	11.427.608.401,53
Jumlah Penambahan		21.521.520.469,53
Pengurangan	Reklasifikasi	10.490.404.468,00
Jumlah Pengurangan		10.490.404.468,00
Saldo Akhir		43.731.522.071,99

Tabel 5.3.47
Kontruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	44.442.142,67	44.442.142,67	0,00
2	Dinas Kesehatan	3.397.792.460,00	4.908.225.160,00	(1.510.432.700,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.423.229.568,99	8.934.642.667,46	2.060.978.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	2.292.264.306,23	2.158.864.306,23	133.400.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	675.422.000,00	675.422.000,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	218.469.000,00	539.578.500,00	(321.109.500,00)
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	106.842.900,00	1.115.382.700,00	(1.008.539.800,00)
8	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	13.191.300.694,10	13.191.300.694,10	0,00
9	Sekretariat Daerah	511.101.000,00	371.501.000,00	139.600.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	717.370.000,00	717.370.000,00	0,00
11	Kecamatan Petak Malai	13.838.000,00	13.838.000,00	0,00
12	Kecamatan Tewang Sanggalang Garing	14.850.000,00	14.950.000,00	(100.000,00)
13	Inspektorat	0,00	4.988.900,00	(4.988.900,00)
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	109.700.000,00	9.900.000,00	99.800.000,00
15	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00
Jumlah		43.731.522.071,99	32.700.406.070,46	11.031.116.001,53

5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(2.856.168.381.001,23)	(2.672.717.952.544,86)

Saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp2.856.168.381.001,23) mengalami kenaikan sebesar (Rp183.450.428.456,37) dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.3.48
Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Perubahan Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2024	Naik/ (Turun)
		Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
Akumulasi Penyusutan	(2.672.717.952.544,86)	(1.813.150.636,43)	(3.656.031.879,84)	(23.743.628.235,02)	(2.856.168.381.001,23)	(183.450.428.456,37)
Jumlah Nilai Perolehan	(2.672.717.952.544,86)	(1.813.150.636,43)	(3.656.031.879,84)	(23.743.628.235,02)	(2.856.168.381.001,23)	(183.450.428.456,37)

Tabel 5.3.49
Akumulasi Penyusutan per Objek
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024	Naik/(turun)
Penyusutan Peralatan dan Mesin	(443.900.342.640,43)	(596.843.673,93)	(66.353.095.365,37)	(11.685.857.463,22)	(499.164.424.216,51)	(55.264.081.576,08)
Penyusutan Gedung dan Bangunan	(221.450.965.086,43)	(61.203.883,99)	(27.432.052.486,95)	(379.467.432,87)	(248.564.754.024,50)	(27.113.788.938,07)
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.965.507.720.913,94)		(101.674.864.790,45)	(602.306.848,23)	(2.066.580.278.856,16)	(101.072.557.942,22)
Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(41.858.923.904,06)				(41.858.923.904,06)	-
J u m l a h	(2.672.717.952.544,86)	(1.813.150.636,43)	(3.656.031.879,84)	(23.743.628.235,02)	(2.856.168.381.001,23)	(183.450.428.456,37)

Tabel 5.3.50
Akumulasi Penyusutan
Berdasarkan PD Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	(154.158.080.986,19)	(134.321.856.705,23)	(19.836.224.280,96)
2	Dinas Kesehatan	(194.941.479.071,40)	(159.286.225.072,30)	(35.655.253.999,10)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.978.111.799.496,89)	(1.899.848.599.232,55)	(78.263.200.264,34)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(102.120.161.953,60)	(86.544.834.539,41)	(15.575.327.414,19)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.934.959.915,62)	(3.615.406.333,84)	(319.553.581,78)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(19.647.749.839,04)	(17.500.351.429,46)	(2.147.398.409,58)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(15.309.871.360,97)	(13.195.702.610,77)	(2.114.168.750,20)
8	Dinas Sosial	(5.055.535.885,76)	(4.609.721.469,95)	(445.814.415,81)
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(31.627.006.556,71)	(26.427.856.105,50)	(5.199.150.451,21)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(8.347.952.716,33)	(8.140.963.938,54)	(206.988.777,79)
11	Dinas Lingkungan Hidup	(35.074.113.141,40)	(33.216.942.967,31)	(1.857.170.174,09)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.928.237.374,04)	(5.650.507.177,32)	(277.730.196,72)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(4.680.264.387,90)	(4.378.176.394,81)	(302.087.993,09)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(7.133.584.004,08)	(6.823.236.078,70)	(310.347.925,38)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	(12.305.566.233,58)	(11.231.970.047,42)	(1.073.596.186,16)
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	(18.726.060.686,88)	(17.160.371.281,66)	(1.565.689.405,22)
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(26.880.038.955,51)	(25.716.350.435,67)	(1.163.688.519,84)
18	Sekretariat Daerah	(69.028.401.149,79)	(66.120.145.080,77)	(2.908.256.069,02)
19	Sekretariat DPRD	(19.839.960.187,31)	(18.216.714.309,23)	(1.623.245.878,08)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(5.780.059.248,11)	(4.997.700.198,27)	(782.359.049,84)
21	Kecamatan Katingan Kuala	(3.561.155.520,21)	(2.658.838.326,39)	(902.317.193,82)
22	Kecamatan Kamipang	(2.500.628.345,95)	(2.420.096.462,29)	(80.531.883,66)
23	Kecamatan Tasik Payawan	(953.393.629,27)	(917.266.608,57)	(36.127.020,70)
24	Kecamatan Katingan Hilir	(3.123.827.602,86)	(2.708.289.204,55)	(415.538.398,31)
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	(2.074.195.463,66)	(1.669.561.436,65)	(404.634.027,01)
26	Kecamatan Pulau Malan	(1.308.194.230,61)	(1.207.650.115,85)	(100.544.114,76)
27	Kecamatan Katingan Tengah	(3.092.075.277,22)	(2.760.373.561,67)	(331.701.715,55)
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	(704.520.479,71)	(934.028.064,00)	229.507.584,29
29	Kecamatan Marikit	(1.070.038.261,23)	(1.100.209.475,80)	30.171.214,57
30	Kecamatan Katingan Hulu	(2.232.663.904,71)	(1.894.581.100,80)	(338.082.803,91)
31	Kecamatan Mendawai	(1.155.104.347,99)	(1.077.571.656,03)	(77.532.691,96)
32	Kecamatan Bukit Raya	(1.363.491.969,89)	(1.273.210.333,98)	(90.281.635,91)
33	Kecamatan Petak Malai	(1.775.249.882,22)	(1.627.562.677,57)	(147.687.204,65)
34	Inspektorat	(5.256.075.950,36)	(5.108.133.969,32)	(147.941.981,04)
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(15.707.663.750,83)	(15.376.008.891,39)	(331.654.859,44)
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(32.589.899.536,75)	(28.773.513.789,92)	(3.816.385.746,83)
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(10.025.576.954,13)	(9.231.309.023,23)	(794.267.930,90)
38	Dinas Perhubungan dan Perikanan	(35.390.501.481,50)	(32.753.241.458,49)	(2.637.260.023,01)
39	Badan Pendapatan Daerah	(13.653.241.261,02)	(12.222.874.979,65)	(1.430.366.281,37)
Jumlah		(2.856.168.381.001,23)	(2.672.717.952.544,86)	(183.450.428.456,37)

5.3.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

0,00

0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Nihil sama dengan saldo di tahun sebelumnya.

5.3.1.5	Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		128.870.524.465,66	281.635.644.384,36

Nilai Saldo Aset Lainnya Rp128.870.524.465,66 dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya tahun sebelumnya sebesar Rp281.635.644.384,36 terdapat penurunan sebesar Rp152.765.119.918,70 yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.51
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(turun)
Tagihan Jangka Panjang	707.380.077,00	707.380.077,00	0,00
Kemitraan Pihak Ketiga	0	0	0,00
Aset Tak Berwujud	8.487.044.130,00	9.222.334.130,00	(735.290.000,00)
Aset Lain-Lain	127.391.201.556,16	124.877.692.512,36	2.513.509.043,80
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.963.677.297,50)	(7.730.873.335,00)	767.196.037,50
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.262.933.000,00)	-	(3.262.933.000,00)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	2.511.509.000,00	154.559.111.000,00	(152.047.602.000,00)
J u m l a h	128.870.524.465,66	281.635.644.384,36	(152.765.119.918,70)

Berdasarkan tabel di atas terdapat penurunan nilai aset lainnya, antara lain dikarenakan oleh penurunan Aset Tak Berwujud dan TDF serta kenaikan akumulasi aset lainnya pada TA 2024.

5.3.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2021
		707.380.077,00	707.380.077,00

Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp707.380.077,00 terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Tabel 5.3.52
Tagihan Jangka Panjang
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	580.127.577,00	0,00	0,00	580.127.577,00
Tagihan Penjualan Angsuran	127.252.500,00	0,00	0,00	127.252.500,00
J u m l a h	707.380.077,00	0,00	0,00	707.380.077,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan bagian tidak lancar dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa tagihan dan tagihan kelebihan pembayaran gaji atas pensiunan pegawai sebesar Rp580.127.577,00 terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp127.252.500,00 yang jumlahnya sama dengan saldo tahun sebelumnya, merupakan saldo tagihan atas Penjualan Angsuran berupa Kredit Ternak (Sapi) dan Kredit Kendaraan (Traktor) yang tidak ada diperoleh angsuran pembayarannya selama tahun 2024 terdapat pada dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. (tahun kejadian beserta OPD).

5.3.1.5.2	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		8.487.044.130,00	9.222.334.130,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.487.044.130 mengalami penurunan sebesar Rp735.290.000,00 dari saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.53
Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Perubahan Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2024	Naik/(Turun)
			Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
1	Aset Tak Berwujud	9.222.334.130,00	0	1.429.590.000,00	2.164.880.000,00	8.487.044.130,00	-735.290.000,00
	Jumlah	9.222.334.130,00	0	1.429.590.000,00	2.164.880.000,00	8.487.044.130,00	-735.290.000,00

Adapun ringkasan mutasi Aset Tidak Berwujud dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud

Saldo Awal	9.222.334.130,00
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal setelah koreksi	9.222.334.130,00
Penambahan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.429.590.000,00
Jumlah Penambahan	1.429.590.000,00
Pengurangan	Reklas Ke Aset Lain-lain 2.164.880.000,00
Jumlah Pengurangan	2.164.880.000,00
Saldo Akhir	8.487.044.130,00

Tabel 5.3.54
Aset Tak Berwujud
Berdasarkan PD Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	626.415.800,00	626.415.800,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.213.685.000,00	1.628.685.000,00	-415.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.910.000,00	118.910.000,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	2.482.874.500,00	2.482.874.500,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.388.000,00	64.388.000,00	0,00
7	Dinas Sosial	0	0	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	37.570.000,00	37.570.000,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	286.620.000,00	286.620.000,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94.455.000,00	94.455.000,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	107.675.000,00	107.675.000,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	31.093.500,00	31.093.500,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	101.166.000,00	413.951.000,00	-312.785.000,00
16	Sekretariat DPRD	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.170.000,00	370.470.000,00	(266.300.000,00)
18	Kecamatan Katingan Kuala	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00
19	Inspektorat Daerah	229.040.000,00	229.040.000,00	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	527.750.000,00	45.750.000,00	482.000.000,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.000.000,00	934.595.000,00	(889.595.000,00)
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	379.816.330,00	281.026.330,00	98.790.000,00
23	Dinas Perhubungan dan Perikanan	304.350.000,00	55.350.000,00	249.000.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.027.700.000,00	1.308.900.000,00	(281.200.000,00)
25	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata	599.800.000,00	0	599.800.000,00
Jumlah		8.487.044.130,00	9.222.334.130,00	(735.290.000,00)

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

31 Desember 2024

127.391.201.556,16

31 Desember 2023

124.877.692.512,36

Akun ini berisi hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnya masuk kedalam kelompok aset tetap akibat hasil pendataan dan penilaian kembali yang dilakukan pada periode sebelumnya harus dikeluarkan karena berbagai alasan, seperti kondisi barang rusak berat, barang tidak diketemukan, atau barang tersebut tidak cocok diklasifikasikan sebagai aset tetap. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Rp127.391.201.556,16 mengalami kenaikan sebesar Rp2.513.509.043,80 dari saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.55
Aset Lain lain
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Koreksi	Mutasi Perubahan Tahun 2024		Saldo Per 31 Desember 2024	Naik/(Turun)
				Penambahan	Pengurangan		
1	Aset Lain-Lain Nilai Perolehan	147.589.210.428,10	0	3.573.483.725,91	3.298.730.100,23	147.863.964.053,78	274.753.625,68
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-22.711.517.915,74	0	-39.383.228,58	-2.278.138.646,70	-20.472.762.497,62	2.238.755.418,12
Nilai Buku		124.877.692.512,36	0	3.534.100.497,33	1.020.591.453,53	127.391.201.556,16	2.513.509.043,80

Adapun ringkasan mutasi Aset Lain-lain dapat disajikan dalam tabel berikut:

a. Nilai Perolehan Aset Lain-lain

Saldo Awal			147.589.210.428,10
Koreksi Saldo Awal			0,00
Saldo Awal setelah koreksi			147.589.210.428,10
Penambahan	Reklas aset tetap rusak berat	1.190.844.300,00	
	Reklas Aset Tak Berwujud	2.164.880.000,00	
	Kurang Volume pekerjaan	217.759.425,91	
	Jumlah Penambahan		3.573.483.725,91
Pengurangan	Penghapusan Aset Tetap	3.298.730.100,23	
	Jumlah Pengurangan		3.298.730.100,23
Saldo Akhir			147.863.964.053,78

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Awal			(22.711.517.915,74)
Koreksi Saldo Awal			0,00
Saldo Awal setelah koreksi			(22.711.517.915,74)
Penambahan	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(39.383.228,58)	
	Jumlah Penambahan		(39.383.228,58)
Pengurangan	Reklas Dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.278.138.646,70)	
	Jumlah Pengurangan		(2.278.138.646,70)
Saldo Akhir			(20.472.762.497,62)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.3.56
Nilai Perolehan Aset Lain-lain Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	15.828.954.406,80	15.849.658.406,80	(20.704.000,00)
2	Dinas Kesehatan	15.550.687.395,36	16.152.259.895,36	(601.572.500,00)
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	15.774.696.731,73	15.359.696.731,73	415.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.530.724.525,91	15.781.465.100,00	(1.250.740.574,09)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	2.432.407.084,36	2.432.407.084,36	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.101.667.659,08	2.137.919.659,08	(36.252.000,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	318.434.871,43	225.643.571,43	92.791.300,00
8	Dinas Sosial	68.682.000,00	68.682.000,00	0,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.530.124.550,00	1.530.124.550,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	182.100.000,00	182.100.000,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.330.828.500,00	560.248.500,00	770.580.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.607.810.939,97	1.991.108.939,97	(383.298.000,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.326.506.958,31	1.326.506.958,31	0,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.954.049.134,65	4.954.049.134,65	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	2.979.362.300,00	2.979.362.300,00	0,00
16	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	628.952.000,00	628.952.000,00	0,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	23.693.581.299,82	23.693.581.299,82	0,00
18	Sekretariat Daerah	12.011.832.989,36	11.771.047.989,36	240.785.000,00
19	Sekretariat DPRD	8.575.118.330,68	8.575.118.330,68	0,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	632.887.645,00	366.587.645,00	266.300.000,00
21	Kecamatan Katingan Kuala	980.301.666,67	980.301.666,67	0,00
22	Kecamatan Kamipang	245.672.500,00	245.672.500,00	0,00
23	Kecamatan Tasik Payawan	224.393.000,00	224.393.000,00	0,00
24	Kecamatan Katingan Hilir	461.999.250,00	461.999.250,00	0,00
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	206.382.733,34	322.469.400,00	(116.086.666,66)
26	Kecamatan Pulau Malan	526.843.326,79	526.843.326,79	0,00
27	Kecamatan Katingan Tengah	176.354.000,00	385.816.700,00	(209.462.700,00)
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	435.024.550,00	435.024.550,00	0,00
29	Kecamatan Marikit	549.753.000,00	549.753.000,00	0,00
30	Kecamatan Katingan Hulu	162.834.120,48	162.834.120,48	0,00
31	Kecamatan Mendawai	388.032.141,66	388.032.141,66	0,00
32	Kecamatan Bukit Raya	449.919.700,00	449.919.700,00	0,00
33	Kecamatan Petak Malai	289.840.000,00	289.840.000,00	0,00
34	Inspektorat	314.275.375,01	478.811.375,01	(164.536.000,00)
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.814.324.000,00	1.781.351.000,00	32.973.000,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.063.556.517,37	11.400.279.750,94	663.276.766,43
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	665.817.850,00	665.817.850,00	0,00
38	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.254.400.000,00	1.103.000.000,00	151.400.000,00
39	Badan Pendapatan Daerah	594.831.000,00	170.531.000,00	424.300.000,00
Jumlah		144.383.271.627,87	147.863.964.053,78	274.753.625,68



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.3.57
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
Berdasarkan PD Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	(2.743.411.001,16)	(2.763.011.001,16)	19.600.000,00
2	Dinas Kesehatan	(819.021.262,48)	(1.420.593.762,48)	601.572.500,00
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	(233.201.965,86)	(233.201.965,86)	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(662.819.036,50)	(2.131.319.036,50)	1.468.500.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(1.007.946.235,28)	(1.007.946.235,28)	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(328.790.578,46)	(365.042.578,46)	36.252.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(97.533.438,99)	(58.150.210,41)	(39.383.228,58)
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(237.383.650,00)	(237.383.650,00)	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(100.340.144,09)	(100.340.144,09)	0,00
10	Dinas Sosial	(59.950.000,00)	(59.950.000,00)	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(430.509.499,97)	(430.509.499,97)	0,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(1.409.220.603,77)	(1.409.220.603,77)	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	(1.001.882,27)	(1.001.882,27)	0,00
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	(888.368,91)	(888.368,91)	0,00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(332.297.361,39)	(332.297.361,39)	0,00
17	Sekretariat Daerah	(618.408.700,18)	(618.408.700,18)	0,00
18	Sekretariat DPRD	(3.094.920.393,46)	(3.094.920.393,46)	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(259.121.021,02)	(259.121.021,02)	0,00
20	Kecamatan Katingan Kuala	(61.775.666,67)	(61.775.666,67)	0,00
21	Kecamatan Tasik Payawan	(120.124.000,00)	(120.124.000,00)	0,00
22	Kecamatan Katingan Hilir	(82.812.750,00)	(82.812.750,00)	0,00
23	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	(151.424.275,00)	(201.340.941,66)	49.916.666,66
24	Kecamatan Katingan Tengah	(71.928.571,43)	(91.279.199,31)	19.350.627,88
25	Kecamatan Sanaman Mantikei	(281.274.150,00)	(281.274.150,00)	0,00
26	Kecamatan Marikit	(35.779.000,00)	(35.779.000,00)	0,00
27	Kecamatan Mendawai	(190.807.474,99)	(190.807.474,99)	0,00
28	Kecamatan Bukit Raya	(330.536.556,43)	(330.536.556,43)	0,00
29	Kecamatan Petak Malai	(139.995.998,56)	(139.995.998,56)	0,00
30	Inspektorat	(172.212.710,10)	(217.489.562,26)	45.276.852,16
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(636.126.968,75)	(636.126.968,75)	0,00
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(4.178.437.959,37)	(4.216.107.959,37)	(37.670.000,00)
33	Dinas Perhubungan dan Perikanan	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)	0,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(413.230.272,53)	(413.230.272,53)	0,00
35	Badan Pendapatan Daerah	(169.531.000,00)	(169.531.000,00)	0,00
Jumlah		(20.472.762.497,62)	(22.711.517.915,74)	2.238.755.418,12

5.3.1.5.4	Akumulasi Amortisasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Aset Tak Berwujud	(6.963.677.297,50)	(7.730.873.335,00)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.963.677.297,50 mengalami penurunan sebesar Rp767.196.037,50 dari saldo tahun sebelumnya. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Katingan Nomor 27 Tahun 2024, perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset tak berwujud atau sesuai dengan ketentuan perundangan yang mendasarinya

Tabel 5.3.58
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Perubahan Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2024	Naik/(Turun)
		Koreksi	Penambahan	Pengurangan		
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(7.730.873.335,00)	0,00	767.196.037,50	0,00	(6.963.677.297,50)	(767.196.037,50)
Jumlah	(7.730.873.335,00)	0,00	767.196.037,50	0,00	(6.963.677.297,50)	(767.196.037,50)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Awal	(7.730.873.335,00)
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal setelah koreksi	(7.730.873.335,00)
Penambahan Reklas	767.196.037,50
Jumlah Penambahan	767.196.037,50
Pengurangan	0,00
Jumlah Pengurangan	0,00
Saldo Akhir	(6.963.677.297,50)

Tabel 5.3.59
Amortisasi Aset Tak Berwujud Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
1	Dinas Pendidikan	(626.139.300,00)	(402.986.520,00)	(223.152.780,00)
2	Dinas Kesehatan	(1.213.685.000,00)	(1.001.342.500,00)	(212.342.500,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(118.910.000,00)	(96.497.500,00)	(22.412.500,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(2.482.874.500,00)	(2.471.649.500,00)	(11.225.000,00)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(64.388.000,00)	(58.407.400,00)	(5.980.600,00)
7	Dinas Sosial	-	-	-
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(37.570.000,00)	(26.899.000,00)	(10.671.000,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(35.000.000,00)	(35.000.000,00)	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	(261.695.000,00)	(230.786.000,00)	(30.909.000,00)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(94.455.000,00)	(94.455.000,00)	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(35.000.000,00)	(35.000.000,00)	-
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(107.675.000,00)	(98.525.000,00)	(9.150.000,00)
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	(31.093.500,00)	(29.293.500,00)	(1.800.000,00)
15	Sekretariat Daerah	(101.166.000,00)	(396.451.000,00)	295.285.000,00
16	Sekretariat DPRD	(11.238.750,00)	(7.492.500,00)	(3.746.250,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(104.170.000,00)	(324.253.500,00)	220.083.500,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/(Turun)
18	Kecamatan Katingan Kuala	(19.580.000,00)	(19.580.000,00)	-
19	Inspektorat Daerah	(229.040.000,00)	(229.040.000,00)	-
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(43.550.000,00)	(43.550.000,00)	-
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(22.500.000,00)	(857.151.250,00)	834.651.250,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(285.104.747,50)	(239.788.165,00)	(45.316.582,50)
23	Dinas Perhubungan dan Perikanan	(103.762.500,00)	(27.675.000,00)	(76.087.500,00)
24	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata	(59.980.000,00)	-	(59.980.000,00)
25	Badan Pendapatan Daerah	(875.100.000,00)	(1.005.050.000,00)	129.950.000,00
Jumlah		(6.963.677.297,50)	(7.730.873.335,00)	767.196.037,50

5.3.1.5.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(3.262.933.000,00)	0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan pencatatan terhadap Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang tahun 2024 sebesar Rp3.262.933.000,00.

5.3.1.5.6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		2.511.509.000,00	154.559.111.000,00

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah dengan menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Saldo TDF per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.511.509.000,00 yang disalurkan kepada Kabupaten Katingan pada tahun 2025.

Tabel 5.3.60
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

	Saldo Awal 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024	Naik/ Turun
TDF	154.559.111.000,00	2.511.509.000,00	154.559.111.000,00	2.511.509.000,00	(152.047.602.000,00)
Jumlah	154.559.111.000,00	2.511.509.000,00	154.559.111.000,00	2.511.509.000,00	(152.047.602.000,00)

5.3.2	Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		19.812.253.125,90	8.705.955.749,09



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.812.253.125,90 mengalami penurunan sebesar Rp11.106.297.376,81 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.61
Kewajiban
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Jenis kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Kewajiban jangka pendek	19.812.253.125,90	8.705.955.749,09	(11.106.297.376,81)
Kewajiban jangka panjang	0	0	0,00
Jumlah	19.812.253.125,90	8.705.955.749,09	(11.106.297.376,81)

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	19.812.253.125,90	8.705.955.749,09

Saldo kewajiban jangka pendek yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.812.253.125,90 mengalami kenaikan sebesar Rp11.106.297.376,81 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya sebesar Rp8.705.955.749,09. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.62
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Jenis kewajiban /Utang Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00
Utang belanja	19.812.253.125,90	8.705.955.749,09	11.106.297.376,81
Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	19.812.253.125,90	8.705.955.749,09	11.106.297.376,81

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Terdapat pemotongan dan penyetoran atas PFK sebesar Rp104.690.378.022,00 yang terdiri dari Pajak Negara, Iuran BPJS dan Iuran Wajib Pegawai (IWP) selama tahun 2024.

5.3.2.1.2 Utang Bunga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.3.2.1.3 Utang Pinjam Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Saldo Utang Pinjam Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.3.2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.3.2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.3.2.1.6	Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		19.812.253.125,90	8.705.955.749,09

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 adalah Rp19.812.253.125,90 atau bertambah sebesar Rp11.106.297.376,81.

Tabel 5.3.63
Utang Belanja
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Utang Belanja Pegawai	6.278.044.932,29	(386.424.980,53)	5.891.619.951,76	5.195.046.885,24	5.401.657.394,60	5.685.009.442,40
2	Utang Belanja Barang Jasa	2.421.451.199,80	0	2.421.451.199,32	670.884.643,90	2.421.451.199,32	670.884.643,90
3	Utang Belanja Bagi Hasil	6.459.617,00	0	6.459.617,00	0	0	6.459.617,00
4	Utang Belanja Bantuan Keuangan		0	13.449.899.422,60	0	0	13.449.899.422,60
Jumlah		8.705.955.749,09	(386.424.980,53)	21.769.430.190,68	5.865.931.529,14	7.823.108.593,92	19.812.253.125,90

1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai terdiri atas Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp5.685.009.442,40 berupa jasa medik dan pembayaran lain yang masih belum dibayarkan kepada para pegawai BLUD RSUD Mas Amsyar sampai dengan 31 Desember 2024 dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal			6.278.044.932,29
Koreksi Saldo Awal Utang			(386.424.980,53)
Saldo Awal setelah koreksi			5.891.619.951,76
Penambahan	Pengakuan Utang Pegawai BLUD	5.195.046.885,24	
Jumlah Penambahan			5.195.046.885,24
Pengurangan	Pengakuan Pembayaran hutang Pegawai BLUD	5.401.657.394,60	
Jumlah Pengurangan			5.401.657.394,60
Saldo Akhir			5.685.009.442,40

2. Utang Belanja Barang Jasa



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Utang belanja barang jasa sebesar Rp670.884.643,90 merupakan pengakuan saldo Utang Barang dan Jasa BLUD dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal		2.421.451.199,80
Koreksi Saldo Awal		0,00
Saldo Awal setelah koreksi		2.421.451.199,80
Penambahan	Pengakuan Utang Barang dan Jasa BLUD	670.884.643,90
Jumlah Penambahan		670.884.643,90
Pengurangan	Pembayaran Utang Barang dan Jasa BLUD	2.421.451.199,80
Jumlah Pengurangan		2.421.451.199,80
Saldo Akhir		670.884.643,90

3. Utang Bagi Hasil

Utang belanja bagi hasil sebesar Rp6.459.617,00 merupakan pengakuan atas Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2024 yang tidak ada permintaan pengajuan pembayaran.

Saldo Awal		6.459.617,00
Koreksi Saldo Awal		0,00
Saldo Awal setelah koreksi		6.459.617,00
Penambahan	0,00	
Jumlah Penambahan		0,00
Pengurangan	0,00	
Jumlah Pengurangan		0,00
Saldo Akhir		6.459.617,00

4. Utang Belanja Bantuan Keuangan.

Utang Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas kekurangan perhitungan anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2024 berdasarkan nilai realisasi Dana Transfer Umum dari Pemerintah Pusat sebesar Rp13.449.899.422,60.

5.3.2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00

5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.3.2.2.1	Utang Dalam Negeri	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Saldo Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.3.2.2.2	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LBK)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LBK) per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.3.2.2.3	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.3.2.2.4	Utang Kepada Masyarakat	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Saldo Utang Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.3.3	Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		3.408.260.197.129,23	3.324.939.944.212,69

Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.408.260.197.129,23 mengalami kenaikan sebesar Rp83.320.252.916,54 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya Rp.3.324.939.944.212,69.

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional digunakan dalam mengevaluasi pendapatan – LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut :

1. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan – LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; pendapatan -LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan; beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyajian Laporan Operasional tahun 2024 mengalami perubahan format dengan laporan tahun sebelumnya akibat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

5.4.1	Pendapatan – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.326.397.471.963,32	1.410.904.706.403,98

Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor 15 tentang Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA, Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan dalam pengakuannya Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau pada saat pendapatan dapat direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pendapatan – LO Kabupaten Katingan adalah pendapatan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.326.344.736.463,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1
Pendapatan – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)			
Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah – LO	69.122.031.232,46	96.992.268.198,99	(27.870.236.966,53)
Pendapatan Transfer – LO	1.228.472.383.092,00	1.310.060.281.825,37	(81.587.898.733,37)
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	28.803.057.638,86	3.852.156.379,62	24.950.901.259,24
Jumlah	1.326.397.471.963,32	1.410.904.706.403,98	(84.507.234.440,66)

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		69.122.031.232,46	96.992.268.198,99

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Katingan adalah Pendapatan Operasional untuk Periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp69.122.031.232,46. Adapun komponen dari penyusun Pendapatan Asli Daerah yang tersaji dalam Laporan Operasional adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Pajak Daerah - LO	23.036.240.118,80	57.204.483.472,05	(34.168.243.353,25)
Retribusi Daerah - LO	11.714.213.964,00	6.978.737.446,00	4.735.476.518,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO	4.579.510.360,83	479.328.630,65	4.100.181.730,18
Lain- Lain Pendapatan Daerah yang sah - LO	29.792.066.788,83	32.329.718.650,29	(2.537.651.861,46)
Jumlah	69.122.031.232,46	96.992.268.198,99	(27.870.236.966,53)

5.4.1.1.1 Pajak Daerah – LO

31 Desember 2024

31 Desember 2023

23.036.240.118,80

57.204.483.472,05

Pendapatan Pajak Daerah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari pajak daerah dalam periode TA 2023. Adapun Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Pendapatan Pajak Daerah – LO Per PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Sekretariat Daerah	8.922.316.161,00	4.961.906.643,85	3.960.409.517,15
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	14.113.923.957,80	52.242.576.828,20	(38.128.652.870,40)
Jumlah	23.036.240.118,80	57.204.483.472,05	(34.168.243.353,25)

Tabel 5.4.4
Pendapatan Pajak Daerah – LO Per Objek
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Pajak Hotel - LO	124.991.500,00	125.650.300,00	(658.800,00)
Pajak restoran- LO	1.848.338.212,80	1.765.249.135,20	83.089.077,60
Pajak Hiburan - LO	100.000,00	17.450.000,00	(17.350.000,00)
Pajak Reklame - LO	251.540.145,00	253.848.118,00	(2.307.973,00)
Pajak penerangan Jalan - LO	8.677.637.056,00	9.982.814.217,00	(1.305.177.161,00)
Pajak Air Tanah - LO	4.028.970,00	28.106.012,00	(24.077.042,00)
Pajak Sarang Burung Walet - LO	345.623.880,00	486.866.880,00	(141.243.000,00)
Pajak mineral bukan logam dan batuan - LO	8.673.435.396,00	4.803.604.831,85	3.869.830.564,15
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan - LO	2.219.886.121,00	1.636.811.336,00	583.074.785,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)- LO	890.658.838,00	38.104.082.642,00	(37.213.423.804,00)
Jumlah	23.036.240.118,80	57.204.483.472,05	(34.168.243.353,25)

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp976.020.749,00.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Penyebab selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Pendapatan Pajak Daerah – LO	23.036.240.118,80
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	22.060.219.369,80
Selisih LO – LRA	976.020.749,00
Penjelasan Selisih:	
Pengakuan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024	60.336.067,00
Pengakuan Pendapatan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024	916.084.682,00
Pembayaran Piutang Pajak Tahun Sebelumnya	(400.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	976.020.749,00

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2024

31 Desember 2023

11.714.213.964,00

6.978.737.446,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari retribusi daerah dalam periode Tahun Anggaran 2024. Adapun Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.5
Pendapatan Retribusi Daerah – LO Per Objek
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	6.742.589.175,00	2.206.576.500,00	953.379.200,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	120.292.000,00	87.424.500,00	32.867.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	94.100.000,00	73.300.000,00	20.800.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	27.750.000,00	32.757.500,00	(5.007.500,00)
Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang - LO	0,00	71.660.000,00	(71.660.000,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	367.120.000,00	(367.120.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.568.064.490,00	1.990.345.122,00	577.719.368,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	602.917.000,00	402.790.000,00	200.127.000,00
Retribusi tempat khusus parkir	41.355.000,00	39.532.000,00	1.823.000,00
Retribusi pelayanan kepelabuhan - LO	43.385.000,00	230.156.500,00	(186.771.500,00)
Retribusi tempat rekreasi dan olahraga- LO	370.809.000,00	351.322.000,00	19.487.000,00
Retribusi penjualan produksi usaha daerah - LO	208.425.000,00	96.500.000,00	111.925.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol - LO	0,00	196.500.000,00	(196.500.000,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	894.527.299,00	534.306.324,00	360.220.975,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	298.447.000,00	(298.447.000,00)
Retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi sewa alat berat - LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah	11.714.213.964,00	6.978.737.446,00	1.152.843.043,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.4.6
Pendapatan Retribusi Daerah – LO Per PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Dinas Pendidikan	107.700.000,00	43.000.000,00	64.700.000,00
Dinas Kesehatan	6.821.067.034,00	2.287.914.328,00	4.533.152.706,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.556.121.299,00	363.938.000,00	1.192.183.299,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	534.306.324,00	(534.306.324,00)
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	167.450.000,00	55.400.000,00	112.050.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	513.412.000,00	441.005.500,00	72.406.500,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	581.525.000,00	731.410.000,00	(149.885.000,00)
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	437.156.000,00	422.794.000,00	14.362.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	121.625.000,00	96.000.000,00	25.625.000,00
Sekretariat Daerah	87.644.000,00	57.610.000,00	30.034.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Katingan Kuala	20.800.000,00	20.100.000,00	700.000,00
Kecamatan Kamipang	20.170.000,00	17.370.000,00	2.800.000,00
Kecamatan Tasik Payawan	22.700.000,00	20.000.000,00	2.700.000,00
Kecamatan Katingan Hilir	21.000.000,00	20.250.000,00	750.000,00
Kecamatan Tewang Sangalang Garing	34.140.000,00	24.340.000,00	9.800.000,00
Kecamatan Pulau Malan	10.500.000,00	11.400.000,00	(900.000,00)
Kecamatan Katingan Tengah	55.400.000,00	27.190.000,00	28.210.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei	23.100.000,00	21.100.000,00	2.000.000,00
Kecamatan Marikit	22.222.000,00	20.102.000,00	2.120.000,00
Kecamatan Katingan Hulu	20.500.000,00	27.500.000,00	(7.000.000,00)
Kecamatan Mendawai	25.406.400,00	22.488.000,00	2.918.400,00
Kecamatan Bukit Raya	20.107.500,00	20.125.000,00	(17.500,00)
Kecamatan Petak Malai	9.931.890,00	7.697.900,00	2.233.990,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	118.250.000,00	90.350.000,00	27.900.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.800.000,00	37.145.000,00	(16.345.000,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	17.100.000,00	15.200.000,00	1.900.000,00
Sekretariat DPRD	27.850.000,00	26.700.000,00	1.150.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	7.700.000,00	367.120.000,00	(359.420.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	216.818.000,00	179.449.500,00	37.368.500,00
Dinas Perhubungan dan Perikanan	606.017.841,00	969.731.894,00	(363.714.053,00)
Jumlah	11.714.213.964,00	6.978.737.446,00	4.735.476.518,00

Terdapat kenaikan secara signifikan dari TA 2024 yang pada pos Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp4.536.012.675,00 yang sebelumnya sebesar Rp2.206.576.500,00 menjadi Rp6.742.589.175,00.

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp3.529.897.975,00. Penyebab selisih Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	11.714.213.964,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	8.184.315.989,00
Selisih LO – LRA	3.529.897.975,00
Penjelasan Selisih:	
Koreksi Pendapatan BLUD Jasa Pelayanan ke Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.529.897.975,00
Jumlah Penjelasan Selisih	3.529.897.975,00

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	4.579.510.360,83	479.328.630,65

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO merupakan pengakuan pendapatan dari penyertaan modal/investasi daerah dalam periode TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	4.579.510.360,83	479.328.630,65	4.100.181.730,18
Jumlah	4.579.510.360,83	479.328.630,65	4.100.181.730,18

(dalam rupiah)

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	29.792.066.788,83	32.329.718.650,29

Lain-Lain PAD Yang Sah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah dalam periode Tahun Anggaran 2024. Lain-Lain PAD Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.8
Lain-Lain PAD Yang Sah – LO
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	693.098.840,00	460.501.455,00	232.597.385,00
Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	0,00	-3166020,44	3.166.020,44
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	4.286.637.389,00	1.659.745.605,92	2.626.891.783,08
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	18.857.142,86	7.854.000,00	11.003.142,86
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	93.999.100,00	(93.999.100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	147.548.498,61	801.911.174,72	(654.362.676,11)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	57.624.046,00	72.024.827,00	(14.400.781,00)

(dalam rupiah)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO	0,00	64.525.771,00	(64.525.771,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	175.787.507,00	83.762.466,00	92.025.041,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	4.649.026.307,36	5.646.035.939,34	(997.009.631,98)
Pendapatan dari BLUD-LO	19.763.487.058,00	16.928.520.469,75	2.834.966.588,25
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	6.514.003.862,00	(6.514.003.862,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah	29.792.066.788,83	32.329.718.650,29	(2.537.651.861,46)

Tabel 5.4.9
Lain-Lain PAD Yang Sah – LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Kesehatan	0,00	6.514.003.862,00	(6.514.003.862,00)
2	BLUD RSUD Mas Amsyar	19.763.487.058,00	16.928.520.469,75	2.834.966.588,25
3	Dinas Perhubungan dan Perikanan	0,00	93.999.100,00	(93.999.100,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(9.163.800,00)	(3.166.020,44)	(5.997.779,56)
5	Badan Pendapatan Daerah	10.037.743.530,83	8.796.361.238,98	1.241.382.291,85
	Jumlah	29.792.066.788,83	32.329.718.650,29	(2.537.651.861,46)

Pengakuan Lain-Lain PAD Yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Lain-Lain PAD Yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp3.552.554.663,00. Penyebab selisih Lain-Lain PAD Yang Sah LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Lain-Lain PAD yang Sah – LO	29.792.066.788,83
Lain-Lain PAD yang Sah – LRA	33.344.621.451,83
Selisih LO – LRA	(3.552.554.663,00)
Penjelasan Selisih:	
Pengurangan atas Piutang BLUD Tahun 2023	(445.338.781,00)
Penambahan atas Piutang BLUD Tahun 2024	1.519.915.893,00
Koreksi atas Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO Menjadi Surplus Penjualan Aset LO	(1.088.070.000,00)
Koreksi Pendapatan BLUD Jasa Pelayanan ke Retribusi Pelayanan Kesehatan	(3.529.897.975,00)
Pelunasan TGR terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara	(9.163.800,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(3.552.554.663,00)

5.4.1.2	Pendapatan Transfer –	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	LO	1.228.472.383.092,00	1.310.060.281.825,37

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor 17 tentang Transfer, pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, realisasi



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

pendapatan transfer pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp81.587.898.733,37 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2023. Pendapatan transfer dalam laporan operasional terdiri atas:

Tabel 5.4.10
Lain-Lain PAD Yang Sah – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.171.740.006.468,00	1.250.724.672.571,00	(78.984.666.103,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.732.376.624,00	59.335.609.254,37	(2.603.232.630,37)
Jumlah	1.228.472.383.092,00	1.310.060.281.825,37	(81.587.898.733,37)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.165.849.461.468,00	1.250.724.672.571,00

Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan Dana Desa, pada TA 2024 pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp84.875.211.103,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.250.724.672.571,00.

Tabel 5.4.11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana Perimbangan	1.165.849.461.468,00	1.244.459.748.571,00	(78.610.287.103,00)
Dana Insentif Daerah	0,00	6.264.924.000,00	(6.264.924.000,00)
Dana Desa-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.165.849.461.468,00	1.250.724.672.571,00	(84.875.211.103,00)

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.165.849.461.468,00	1.224.459.748.571,00

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik terealisasi sebesar Rp1.165.849.461.468,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp78.610.287.103,00.

Tabel 5.4.12
Dana Perimbangan – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana Bagi Hasil (DBH)	180.237.736.000,00	330.381.491.000,00	(150.143.755.000,00)
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	672.273.960.026,00	649.641.846.105,00	22.632.113.921,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	186.604.733.257,00	138.035.682.119,00	48.569.051.138,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO	126.733.032.185,00	126.400.729.347,00	332.302.838,00
JUMLAH	1.165.849.461.468,00	1.244.459.748.571,00	(78.610.287.103,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – Sumber Daya Alam (SDA) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Dana Bagi Hasil – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	22.464.445.000,00	22.632.270.400,00	(167.825.400,00)
DBH Pajak Penghasilan	4.593.895.000,00	5.360.770.000,00	(766.875.000,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau	1.000,00	(123,00)	1.123,00
DBH SDA Minyak Bumi	0,00	274.838.600,00	(274.838.600,00)
DBH SDA Landrent	(42.704.000,00)	2.569.950.462,00	(2.612.654.462,00)
DBH SDA Kehutanan	10.817.689.000,00	22.657.600.300,00	(11.839.911.300,00)
DBH SDA Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IIUPH)	454.820.000,00	1.574.320.700,00	(1.119.500.700,00)
DBH-SDA Perikanan	1.551.238.000,00	16.374.393.000,00	(14.823.155.000,00)
DBH SDA - Royalti	127.412.050.000,00	258.909.588.661,00	(131.497.538.661,00)
DBH Sawit	12.986.302.000,00	0,00	12.986.302.000,00
DBH SDA Gas Bumi	0,00	27.759.000,00	(27.759.000,00)
JUMLAH	180.237.736.000,00	330.381.491.000,00	(150.143.755.000,00)

Pengakuan Dana Bagi Hasil dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Dana Bagi Hasil dalam LRA TA 2024 sebesar Rp152.047.602.000,00. Penyebab selisih Dana Bagi Hasil LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Dana Bagi Hasil – LO		180.237.736.000,00
Dana Bagi Hasil – LRA		332.285.338.000,00
Selisih LO – LRA		(152.047.602.000,00)
Penjelasan Selisih:		
Pendapatan atas piutang TDF 2023	(154.559.111.000,00)	
Pengakuan atas Piutang TDF 2024	2.511.509.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		(152.047.602.000,00)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi DAU Tahun 2024 sebesar Rp672.273.960.026,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.632.113.921,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp649.641.846.105,00.

Tabel 5.4.14
Dana Alokasi Umum – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
DAU-LO	464.843.810.000,00	601.021.498.105,00	(136.177.688.105,00)
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
DAU Yang Ditentukan Penggunaan Bidang Pendidikan-LO	84.959.849.000,00	0,00	84.959.849.000,00
DAU Yang Ditentukan Penggunaan Bidang Kesehatan-LO	51.449.946.000,00	0,00	51.449.946.000,00
DAU Yang Ditentukan Penggunaan Bidang Pekerjaan Umum-LO	39.067.023.000,00	0,00	39.067.023.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	30.553.332.026,00	47.220.348.000,00	(16.667.015.974,00)
JUMLAH	672.273.960.026,00	649.641.846.105,00	22.632.113.921,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dikategorikan ke dalam Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang realisasinya pada tahun 2024 sebesar Rp313.337.765.442,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.901.353.976,00 dari realisasi tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.15
Dana Alokasi Khusus – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	974.202.126,00	579.665.000,00	394.537.126,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	8.650.239.494,00	5.060.677.500,00	3.589.561.994,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	7.072.209.850,00	11.765.685.300,00	(4.693.475.450,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	840.628.850,00	-840.628.850,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	2.300.000.000,00	2.918.254.190,00	-618.254.190,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	121.300.000,00	-121.300.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	89.346.000,00	209.392.297,00	-120.046.297,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	6.428.726.500,00	15.490.990.900,00	-9.062.264.400,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	18.311.945.705,00	23.842.383.000,00	-5.530.437.295,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	783.000.000,00	5.402.370.799,00	-4.619.370.799,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	141.995.063.582,00	71.804.334.283,00	70.190.729.299,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	29.579.274.779,00	29.535.777.247,00	43.497.532,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.125.000.000,00	1.270.000.000,00	-145.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	49.380.187.000,00	47.927.698.300,00	1.452.488.700,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.389.750.000,00	1.716.000.000,00	673.750.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	20.156.536.000,00	19.326.750.000,00	829.786.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.088.628.950,00	2.581.015.000,00	-492.386.050,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.736.860.000,00	1.319.320.000,00	417.540.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	4.032.516.895,00	386.436.518,00	168.151.714,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	0,00	15.088.551.000,00	-15.088.551.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	495.302.068,00	434670424	60.631.644,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	3.670.484.800,00	2.793.844.150,00	876.640.650,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	190.971.045,00	-190.971.045,00
DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	0	351767000	-351.767.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	12.078.491.693,00	0,00	12.078.491.693,00
JUMLAH	313.337.765.442,00	264.436.411.466,00	48.901.353.976,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	6.264.924.000,00

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penerimaan Dana Insentif Daerah – LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp6.264.924.000,00 pada Dana Insentif Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

5.4.1.2.1.3 Dana Desa	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00

Penerimaan Dana Desa – LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0.00.

5.4.1.2.1.4 Insentif Fiskal	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	5.890.545.000,00	0,00

Penerimaan Insentif Fiskal – LO tahun 2024 adalah sebesar Rp5.890.545.000,00.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	56.732.376.624,00	59.335.609.254,37

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi untuk Tahun 2024 sebesar Rp56.732.376.624,00 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Tabel 5.4.16
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)			
Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Bagi Hasil - LO	56.732.376.624,00	59.335.609.254,37	(2.603.232.630,37)
JUMLAH	56.732.376.624,00	59.335.609.254,37	(2.603.232.630,37)

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	56.732.376.624,00	59.335.609.254,37

Pendapatan Bagi Hasil – LO merupakan realisasi pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.4.17
Pendapatan Bagi Hasil – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	7.786.120.856,00	7.947.112.402,59	(160.991.546,59)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	14.868.642.320,00	10.654.464.727,07	4.214.177.592,93
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	24.063.785.160,00	31.242.432.293,94	(7.178.647.133,94)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan - LO	151.605.084,00	124.976.649,77	26.628.434,23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	9.862.223.204,00	9.366.623.181,00	495.600.023,00
JUMLAH	56.732.376.624,00	59.335.609.254,37	(2.603.232.630,37)

Pendapatan Bagi Hasil – LO mengalami penurunan sebesar Rp2.603.232.630,37 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.335.609.254,37. Pendapatan Bagi Hasil – LO terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Bagi Hasil dalam LRA TA 2024 sebesar Rp4.565.490.492,00. Penyebab selisih Pendapatan Bagi Hasil LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Pendapatan Bagi Hasil – LO	56.732.376.624,00
Pendapatan Bagi Hasil – LRA	52.166.886.132,00
Selisih LO – LRA	4.565.490.492,00
Penjelasan Selisih:	
Pendapatan atas Piutang Bagi Hasil Tahun 2023	(7.840.424.712,00)
Pengakuan atas Piutang Bagi Hasil Tahun 2024	12.405.915.204,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.565.490.492,00

5.4.1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		28.803.057.638,86	3.852.156.379,62

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah – LO, Pendapatan Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.4.18
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam daerah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Hibah - LO	21.119.408.328,86	3.852.156.379,62	17.267.251.949,24
Dana Darurat - LO	0	0	0,00
Lain-Lain Pendapatan - LO	7.683.649.310,00	0	7.683.649.310,00
Jumlah	28.803.057.638,86	3.852.156.379,62	24.950.901.259,24



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp24.950.901.259,24 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	21.119.408.328,86	3.852.156.379,62

Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, adapun pendapatan hibah – LO Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2024 sebesar Rp21.119.408.328,86 mengalami kenaikan sebesar Rp17.267.251.949,24 dibandingkan dengan pendapatan hibah TA 2023 sebesar Rp3.852.156.379,62. Adapun Pendapatan Hibah - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.19
Pendapatan Hibah - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	0,00	51.106.570,00	(51.106.570,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	3.682.129.095,86	3.299.786.269,62	382.342.826,24
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	17.437.279.233,00	501.263.540,00	16.936.015.693,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO	0	0	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0	0	0,00
Jumlah	21.119.408.328,86	3.852.156.379,62	17.267.251.949,24

Pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun 2024 ada mencatat penerimaan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp0,00, penerimaan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebesar Rp3.682.129.095,86 dan penerimaan hibah dari badan/Lembaga/organisasi swasta dalam negeri sebesar Rp17.437.279.233,00.

Tabel 5.4.20
Pendapatan Hibah – LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	378.281.230,00	501.263.540,00	(122.982.310,00)
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.350.892.839,62	(3.350.892.839,62)
3	Dinas Kesehatan	3.475.065.095,86	0,00	3.475.065.095,86
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	207.064.000	0,00	207.064.000
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.058.998.003	0,00	17.058.998.003,00
	Jumlah	21.119.408.328,86	3.852.156.379,62	17.267.251.949,24

Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp20.741.127.098,86. Penyebab



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Pendapatan Bagi Hasil – LO		21.119.408.328,86
Pendapatan Bagi Hasil – LRA		378.281.230,00
Selisih LO – LRA		20.741.127.098,86
Penjelasan Selisih:		
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap - Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.546.096.200,00	
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap - Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.512.901.803,00	
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Persediaan - Bahan Komputer pada Disdukcapil	207.064.000,00	
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Persediaan (persediaan dari hibah pada Dinkes dan BLUD-RSUD)	3.475.065.095,86	
Jumlah Penjelasan Selisih		20.741.127.098,86

5.4.2 Beban - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.244.534.278.291,03	1.139.892.436.622,37

Beban-LO merupakan belanja atau beban yang telah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.244.534.278.291,03 dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.139.892.436.622,37.

Tabel 5.4.21
Beban - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Operasi	943.706.300.892,21	871.073.900.175,65	72.632.400.716,56
Beban Penyusutan dan Amortisasi	191.625.025.498,52	181.960.353.879,72	9.664.671.618,80
Beban Transfer	107.597.541.937,30	86.215.628.896,93	21.381.913.040,37
Beban Tidak Terduga	1.605.409.963,00	1.062.262.800,00	543.147.163,00
Jumlah	1.244.534.278.291,03	1.139.892.436.622,37	104.641.841.668,66

Tabel 5.4.22
Beban - LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	337.468.436.635,60	301.217.362.040,47	36.251.074.595,13
2	Dinas Kesehatan	235.967.209.560,38	215.235.959.955,62	20.731.249.604,76
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.452.590.930,75	104.079.889.216,40	-5.627.298.285,65
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	27.566.682.782,01	27.638.906.185,71	-72.223.403,70



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	24.051.384.300,60	22.630.696.294,31	1.420.688.006,29
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.210.637.626,06	9.665.716.358,21	-455.078.732,15
7	Dinas Sosial	7.350.452.713,24	7.832.327.865,38	-481.875.152,14
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	14.886.250.620,36	13.502.353.328,34	1.383.897.292,02
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.923.604.614,79	11.609.086.280,24	314.518.334,55
10	Dinas Lingkungan Hidup	16.963.540.987,25	15.863.394.811,20	1.100.146.176,05
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.335.248.769,01	5.781.136.831,54	554.111.937,47
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.421.624.392,09	8.517.870.577,63	-1.096.246.185,54
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	14.479.950.884,15	15.784.759.133,28	-1.304.808.249,13
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.910.060.170,81	9.898.500.432,47	2.011.559.738,34
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	7.634.525.775,16	7.245.230.370,17	389.295.404,99
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.611.385.803,84	6.802.055.555,26	809.330.248,58
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	12.989.115.001,22	17.036.673.140,29	-4.047.558.139,07
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.373.432.857,41	13.687.290.617,63	1.686.142.239,78
19	Sekretariat Daerah	58.832.589.518,29	57.323.567.938,20	1.509.021.580,09
20	Inspektorat Daerah	11.867.916.249,04	10.862.328.160,29	1.005.588.088,75
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	10.688.979.519,01	10.513.252.987,57	175.726.531,44
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	144.548.775.750,28	115.072.664.561,05	29.476.111.189,23
23	Badan Pendapatan Daerah	11.181.642.149,41	11.438.690.799,47	-257.048.650,06
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.718.264.807,40	10.391.515.182,64	-673.250.375,24
25	Sekretariat DPRD	46.461.712.458,08	44.307.892.961,69	2.153.819.496,39
26	Kecamatan Katingan Kuala	4.140.016.841,38	3.593.849.148,75	546.167.692,63
27	Kecamatan Mendawai	2.738.728.795,68	3.019.355.969,03	-280.627.173,35
28	Kecamatan Kamipang	3.521.218.005,37	3.280.474.495,03	240.743.510,34
29	Kecamatan Tasik Payawan	3.075.916.451,27	2.828.584.635,71	247.331.815,56



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
30	Kecamatan Katingan Hilir	6.191.485.557,24	5.267.134.762,93	924.350.794,31
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	4.553.519.415,01	4.433.244.515,31	120.274.899,70
32	Kecamatan Pulau Malan	3.545.002.459,76	3.475.244.674,74	69.757.785,02
33	Kecamatan Katingan Tengah	4.869.097.039,41	4.454.610.023,53	414.487.015,88
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	3.174.078.015,28	2.457.883.422,00	716.194.593,28
35	Kecamatan Marikit	2.654.091.535,00	2.439.698.995,14	214.392.539,86
36	Kecamatan Katingan Hulu	4.078.460.596,48	3.553.000.970,66	525.459.625,82
37	Kecamatan Petak Malai	2.452.948.285,22	2.248.634.421,61	204.313.863,61
38	Kecamatan Bukit Raya	2.462.821.908,91	2.092.509.928,86	370.311.980,05
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.153.672.000,78	22.883.944.187,15	11.269.727.813,63
	Jumlah	1.242.507.071.783,03	924.731.331.779,89	102.539.780.047,52

5.4.2.1 Beban Operasi - LO

31 Desember 2024

943.706.300.892,21

31 Desember 2023

871.073.900.175,65

Beban operasi terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, dan Beban Penyisihan Piutang. Realisasi Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp871.073.900.175,65 dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp943.706.300.892,21.

Tabel 5.4.23
Beban Operasi - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Pegawai	506.026.335.266,22	444.795.206.922,97	61.231.128.343,25
Beban Persediaan	92.660.992.310,38	80.833.859.787,24	11.827.132.523,14
Beban Jasa	129.817.088.548,20	141.681.624.421,77	-11.864.535.873,57
Beban Pemeliharaan	21.604.124.775,46	23.828.989.489,19	-2.224.864.713,73
Beban Perjalanan Dinas	104.648.189.326,00	95.957.795.045,00	8.690.394.281,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.857.820.219,00	2.547.705.000,00	310.115.219,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	108.395.818,00	0	108.395.818,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	2.366.327.363,10	2.126.250.657,48	240.076.705,62
Beban Bunga	0	0	0,00
Beban Subsidi	2.536.412.800,00	1.668.543.000,00	867.869.800,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Beban Hibah	78.042.667.295,06	75.085.151.604,75	2.957.515.690,31
Beban Bantuan Sosial	2.440.000.000,00	977.360.000,00	1.462.640.000,00
Beban Penyisihan Piutang	597.947.170,79	1.151.705.117,32	-553.757.946,53
Jumlah	943.706.300.892,21	870.654.191.045,72	73.052.109.846,49

Tabel 5.4.24
Beban Operasi – LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	317.686.271.834,36	281.916.923.261,95	35.769.348.572,41
2	Dinas Kesehatan	200.746.887.156,66	192.029.763.034,56	8.717.124.122,10
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.035.365.337,04	17.831.929.543,00	-796.564.205,96
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	11.960.357.715,17	11.095.106.996,18	865.250.718,99
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21.529.930.860,00	20.517.938.425,00	1.011.992.435,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.105.042.983,00	7.163.744.693,00	-58.701.710,00
7	Dinas Sosial	6.905.650.026,00	7.308.454.966,00	-402.804.940,00
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9.710.723.962,00	8.351.503.498,00	1.359.220.464,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.340.222.282,00	11.017.832.514,00	322.389.768,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	14.355.215.793,00	13.678.636.348,00	676.579.445,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.057.742.233,00	5.562.610.700,00	495.131.533,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.119.536.399,00	8.244.913.817,00	-1.125.377.418,00
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	11.649.538.314,00	13.058.757.493,00	-1.409.219.179,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.394.633.654,00	9.336.988.780,00	2.057.644.874,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	6.562.749.589,00	6.191.881.353,00	370.868.236,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.956.875.454,00	5.921.450.671,99	1.035.424.782,01
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	11.366.923.096,00	15.394.390.048,00	-4.027.466.952,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.105.966.082,00	12.466.827.455,00	1.639.138.627,00
19	Sekretariat Daerah	54.956.798.873,35	53.205.284.624,76	1.751.514.248,59
20	Inspektorat	11.330.637.618,00	10.453.118.426,00	877.519.192,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.912.245.231,00	9.835.338.777,00	76.906.454,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	31.594.826.254,02	24.314.025.091,42	7.280.801.162,60
23	Badan Pendapatan Daerah	10.198.066.296,61	10.228.298.343,86	-30.232.047,25
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.880.660.294,00	9.690.632.890,00	-809.972.596,00
25	Sekretariat DPRD	44.696.523.256,00	42.618.992.387,00	2.077.530.869,00
26	Kecamatan Katingan Kuala	3.732.500.469,00	3.193.116.796,00	539.383.673,00
27	Kecamatan Mendawai	2.662.733.318,00	2.922.440.610,00	-259.707.292,00
28	Kecamatan Kamipang	3.328.791.836,00	3.078.690.600,00	250.101.236,00
29	Kecamatan Tasik Payawan	3.016.583.627,00	2.771.414.455,00	245.169.172,00
30	Kecamatan Katingan Hilir	5.731.399.330,00	4.831.424.315,00	899.975.015,00
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	4.161.824.868,00	4.144.043.505,00	17.781.363,00
32	Kecamatan Pulau Malan	3.453.569.345,00	3.401.501.193,00	52.068.152,00
33	Kecamatan Katingan Tengah	4.542.786.181,00	4.136.731.804,00	406.054.377,00
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	3.025.689.171,00	2.407.189.282,00	618.499.889,00
35	Kecamatan Marikit	2.577.924.321,00	2.376.023.424,00	201.900.897,00
36	Kecamatan Katingan Hulu	3.741.181.364,00	3.216.011.275,00	525.170.089,00
37	Kecamatan Petak Malai	2.307.292.777,00	2.100.721.757,00	206.571.020,00
38	Kecamatan Bukit Raya	2.372.540.273,00	1.996.086.116,00	376.454.157,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.892.093.419,00	22.643.451.776,00	11.248.641.643,00
Jumlah		943.706.300.892,21	870.654.191.045,72	73.052.109.846,49

5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

31 Desember 2024

506.026.335.266,22

31 Desember 2023

444.795.206.922,97

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai – LO merupakan bagian dari realisasi Beban dalam TA 2024, beban pegawai pada TA 2024 sebesar Rp506.026.335.266,22 mengalami kenaikan sebesar Rp61.231.128.343,25 dibandingkan dengan realisasi beban pegawai pada TA 2023 yakni sebesar Rp444.795.206.922,97.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.4.25
Beban Pegawai-LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	304.228.869.824,00	258.340.503.119,00	45.888.366.705,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	105.190.234.411,00	92.949.495.529,00	12.240.738.882,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	74.446.577.157,00	68.217.292.500,00	6.229.284.657,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.841.294.027,00	12.079.056.756,00	(237.762.729,00)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	131.927.065,00	(131.927.065,00)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	530.200.000,00	601.600.000,00	(71.400.000,00)
Beban Belanja Pegawai BLUD	9.789.159.847,22	12.475.331.953,97	(2.686.172.106,75)
Jumlah	506.026.335.266,22	444.795.206.922,97	61.231.128.343,25

Tabel 5.4.26
Beban Pegawai- LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	263.389.872.132,00	230.838.284.843,00	32.551.587.289,00
2	Dinas Kesehatan	96.521.733.642,22	78.051.044.305,97	18.470.689.336,25
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.821.626.899,00	4.232.898.828,00	588.728.071,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	3.084.039.816,00	3.021.169.188,00	62.870.628,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.096.966.493,00	4.799.601.035,00	297.365.458,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.604.071.870,00	2.758.118.803,00	(154.046.933,00)
7	Dinas Sosial	2.568.956.958,00	2.674.636.461,00	(105.679.503,00)
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.329.881.135,00	3.302.490.327,00	27.390.808,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.664.331.702,00	4.018.498.605,00	645.833.097,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.897.250.071,00	3.801.502.587,00	95.747.484,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.587.293.664,00	2.548.175.638,00	39.118.026,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.171.573.666,00	2.764.141.538,00	407.432.128,00
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	3.556.686.334,00	3.378.680.603,00	178.005.731,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.937.926.709,00	3.024.262.587,00	913.664.122,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.012.499.067,00	2.653.024.199,00	359.474.868,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.923.686.534,00	2.845.102.492,00	78.584.042,00
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	3.099.860.996,00	3.439.627.618,00	(339.766.622,00)
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.548.340.594,00	6.792.240.851,00	756.099.743,00
19	Sekretariat Daerah	13.718.508.759,00	12.489.168.981,00	1.229.339.778,00
20	Inspektorat Daerah	5.864.079.893,00	5.735.043.195,00	129.036.698,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	3.727.816.545,00	3.551.664.012,00	176.152.533,00
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.844.721.783,00	10.519.706.789,00	3.325.014.994,00
23	Badan Pendapatan Daerah	3.774.292.541,00	3.100.981.416,00	673.311.125,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.791.916.122,00	2.754.891.659,00	37.024.463,00
25	Sekretariat DPRD	14.934.136.864,00	14.703.115.346,00	231.021.518,00
26	Kecamatan Katingan Kuala	2.190.925.469,00	2.224.171.796,00	(33.246.327,00)
27	Kecamatan Mendawai	1.543.115.768,00	1.569.087.216,00	(25.971.448,00)
28	Kecamatan Kamipang	1.835.680.456,00	1.768.372.200,00	67.308.256,00
29	Kecamatan Tasik Payawan	1.949.244.314,00	1.861.851.545,00	87.392.769,00
30	Kecamatan Katingan Hilir	3.261.608.925,00	3.120.846.302,00	140.762.623,00
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	2.905.361.688,00	2.887.637.244,00	17.724.444,00
32	Kecamatan Pulau Malan	2.417.284.776,00	2.513.799.593,00	(96.514.817,00)
33	Kecamatan Katingan Tengah	2.589.652.127,00	2.454.026.733,00	135.625.394,00
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.706.278.137,00	1.561.498.181,00	144.779.956,00
35	Kecamatan Marikit	1.374.154.048,00	1.369.563.634,00	4.590.414,00
36	Kecamatan Katingan Hulu	2.099.890.836,00	1.920.084.588,00	179.806.248,00
37	Kecamatan Petak Malai	765.038.262,00	848.830.043,00	(83.791.781,00)
38	Kecamatan Bukit Raya	949.143.973,00	914.247.816,00	34.896.157,00
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.966.885.698,00	1.983.118.125,00	(16.232.427,00)
Jumlah		506.026.335.266,22	444.795.206.922,97	61.231.128.343,25

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp206.610.509,36. Penyebab selisih Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Beban Pegawai – LO	506.026.335.266,22
Belanja Pegawai – LRA	506.232.945.775,58
Selisih LO – LRA	(206.610.509,36)
Penjelasan Selisih:	
Pengurangan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Tahun 2023	(5.891.619.951,76)
Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Tahun 2024	5.685.009.442,40
Jumlah Penjelasan Selisih	(206.610.509,36)

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

31 Desember 2024
92.660.992.310,38

31 Desember 2023
80.833.859.787,24

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp92.660.992.310,38 mengalami kenaikan sebesar Rp11.827.132.523,14 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp80.833.859.787,24.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.4.27
Beban Persediaan – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bahan Pakai Habis	92.660.992.310,38	80.833.859.787,24	11.827.132.523,14
	Jumlah	92.660.992.310,38	80.833.859.787,24	11.827.132.523,14

Tabel 5.4.28
Beban Persediaan- LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	5.219.474.323,00	3.093.783.928,00	2.125.690.395,00
2	Dinas Kesehatan	33.876.695.788,21	28.955.655.268,30	4.921.040.519,91
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.650.663.723,00	1.933.636.012,00	717.027.711,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	1.411.136.632,82	681.464.821,18	729.671.811,64
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.043.402.007,00	1.393.486.070,00	-350.084.063,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.114.556.550,00	1.168.956.546,00	-54.399.996,00
7	Dinas Sosial	1.023.159.011,00	1.238.151.309,00	-214.992.298,00
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.241.406.780,00	1.486.965.742,00	-245.558.962,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.576.408.757,00	1.697.356.049,00	-120.947.292,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.922.891.769,00	2.925.407.176,00	-2.515.407,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.463.303.844,00	842.033.110,00	621.270.734,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.039.699.975,00	1.468.284.699,00	-428.584.724,00
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	4.568.323.112,00	6.091.059.014,00	-1.522.735.902,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	986.661.012,00	889.994.066,00	96.666.946,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	319.111.072,00	920.998.350,00	-601.887.278,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.136.150.967,00	676.137.448,00	460.013.519,00
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.146.798.128,00	793.051.337,00	353.746.791,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.912.836.963,00	1.473.288.756,00	1.439.548.207,00
19	Sekretariat Daerah	7.992.864.129,35	6.889.823.270,76	1.103.040.858,59
20	Inspektorat Daerah	591.222.700,00	643.629.481,00	-52.406.781,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.304.573.416,00	946.598.912,00	357.974.504,00
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.272.926.684,00	2.099.278.109,00	173.648.575,00
23	Badan Pendapatan Daerah	1.613.536.947,00	966.058.772,00	647.478.175,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.584.534.023,00	1.934.486.644,00	-349.952.621,00
25	Sekretariat DPRD	4.515.059.551,00	4.303.270.127,00	211.789.424,00
26	Kecamatan Katingan Kuala	456.976.260,00	216.006.300,00	240.969.960,00
27	Kecamatan Mendawai	292.901.850,00	205.467.600,00	87.434.250,00
28	Kecamatan Kamipang	474.197.838,00	384.641.861,00	89.555.977,00
29	Kecamatan Tasik Payawan	305.725.400,00	218.908.700,00	86.816.700,00
30	Kecamatan Katingan Hilir	1.248.630.136,00	766.117.200,00	482.512.936,00
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	328.429.900,00	352.198.800,00	-23.768.900,00
32	Kecamatan Pulau Malan	321.272.400,00	281.600.600,00	39.671.800,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
33	Kecamatan Katingan Tengah	670.924.750,00	532.741.100,00	138.183.650,00
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	438.731.842,00	302.996.097,00	135.735.745,00
35	Kecamatan Marikit	335.071.894,00	306.240.300,00	28.831.594,00
36	Kecamatan Katingan Hulu	501.271.625,00	372.723.334,00	128.548.291,00
37	Kecamatan Petak Malai	554.762.862,00	491.343.554,00	63.419.308,00
38	Kecamatan Bukit Raya	323.227.000,00	255.192.500,00	68.034.500,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	881.470.689,00	634.826.824,00	246.643.865,00
Jumlah		92.660.992.310,38	80.833.859.787,24	11.827.132.523,14

Terdapat selisih antara Beban Bahan Pakai Habis LO dan LRA sebesar Rp23.657.776.542,99 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Beban Bahan Pakai Habis – LO		92.660.992.310,38
Belanja Bahan Pakai Habis – LRA		69.003.215.767,39
Selisih LO – LRA		23.657.776.542,99
Penjelasan Selisih:		
Penyesuaian Penerimaan bahan kimia BLUD sebesar Rp941.098.376,26	941.098.376,26	
Penyesuaian Penyaluran Bahan Kimia Dinkes sebesar Rp6.834.350,-	-6.834.350,00	
Penyesuaian penerimaan bahan bakar dan pelumas BLUD sebesar Rp139.999.900	139.999.900,00	
Koreksi kec Petak malai sebesar Rp1.500.000,-	1.500.000,00	
Penyesuaian Dispersikintan sebesar Rp-1.395.000,-	-1.395.000,00	
Penyesuaian BKAD sebesar Rp-16.466.850,-	-16.466.850,00	
Penyesuaian BLUD sebesar Rp8.791.200,-	8.791.200,00	
Penyesuaian dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp-3.191.000,-	-3.191.000,00	
Penyesuaian BLUD sebesar Rp455.421.900,-	455.421.900,00	
Penyesuaian Persediaan Dinkes sebesar Rp7.963.600,-	7.963.600,00	
Penyesuaian Reklas beban komponen rambu-rambu DisPUPR sebesar Rp35.000.000,-	35.000.000,00	
Penyesuaian beban pipa-pipa lainnya Dishubkan sebesar Rp4.000.000,-	4.000.000,00	
Penyesuaian beban komponen rambu-rambu Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp78.650.000,-	78.650.000,00	
Penyesuaian peralatan studio, video dan film Dinkes sebesar Rp-4.000.000,-	-4.000.000,00	
Penyesuaian ATK BLUD sebesar Rp547.048.636,-	547.048.636,00	
Penyesuaian ATK Setda sebesar Rp-120.414.716,-	-120.414.716,00	
Penyesuaian ATK BKAD sebesar Rp-14.119.650,-	-14.119.650,00	
Penyesuaian ATK Dinkes sebesar Rp-3.490.000,-	-3.490.000,00	
Penyesuaian kertas dan cover Setda sebesar Rp-103.615.142,-	-103.615.142,00	
Penyesuaian kertas dan cover BKAD sebesar Rp-27.651.600,-	-27.651.600,00	
Penyesuaian bahan cetak Setda sebesar Rp-38.327.125,-	-38.327.125,00	
Penyesuaian bahan cetak BKAD sebesar Rp-3.024.000,-	-3.024.000,00	
Penyesuaian benda pos BLUD sebesar Rp23.480.000,-	23.480.000,00	
Penyesuaian benda pos Dinkes sebesar Rp-1.890.000,-	-1.890.000,00	
Penyesuaian Peralatan personal komputer Dinkes sebesar Rp-1.260.000,-	-1.260.000,00	
Penyesuaian bahan komputer Setda sebesar Rp-40.661.568,45	-40.661.568,45	
Penyesuaian bahan komputer BKAD sebesar Rp-10.505.500,-	-10.505.500,00	
Penyesuaian bahan komputer Dinkes sebesar Rp-5.260.000,-	-5.260.000,00	



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Penyesuaian bahan komputer Disdukcapil sebesar Rp207.064.000,-	207.064.000,00	
Penyesuaian beban persediaan Dinkes sebesar Rp-190.500,-	-190.500,00	
Penyesuaian alat rumah tangga lainnya Dinkes sebesar Rp-10.136.124,-	-10.136.124,00	
Penyesuaian alat pengukur waktu Dinkes sebesar Rp-405.000,-	-405.000,00	
Penyesuaian meubelair Dinkes sebesar Rp-269.729.730,-	-269.729.730,00	
Penyesuaian sisa saldo persediaan perabot kantor Setda sebesar Rp55.000,-	55.000,00	
Penyesuaian perabot kantor BKAd senilai Rp-68.176.500,-	-68.176.500,00	
Penyesuaian perabot kantor Dinkes sebesar Rp-336.282.304,-	-336.282.304,00	
Penyesuaian alat kesehatan umum lainnya BLUD sebesar Rp71.634.375,-	71.634.375,00	
Penyesuaian sisa saldo persediaan alat listrik Disperkintan sebesar Rp764.533.928,82	764.533.928,82	
Penyesuaian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Dinkes sebesar Rp-1.600.000,-	-1.600.000,00	
Penyesuaian persediaan Dinkes sebesar Rp-2.000.000,-	-2.000.000,00	
Penyesuaian perlengkapan pendukung olga DPMPSTP sebesar Rp-4.756.000,-	-4.756.000,00	
Penyesuaian alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	193.301.958,01	
Penyesuaian persediaan Dinkes sebesar Rp-2.620.396.886,02	-2.620.396.886,02	
Penyesuaian persediaan Dinkes sebesar Rp5.582.301.345,-	5.582.301.345,00	
Penyesuaian obat BLUD sebesar Rp10.613.825.933,50	10.613.825.933,50	
Penyesuaian obat Dinkes sebesar Rp3.068.034.460,98	3.068.034.460,98	
Penyesuaian persediaan Dinkes Rp-3.871.744.500,78	-3.871.744.500,78	
Penyesuaian persediaan Dinkes Rp2.779.627.833,87	2.779.627.833,87	
Penyesuaian Reklas Dis PUPR sebesar Rp-299.000.000,-	-299.000.000,00	
Penyesuaian beban hibah Setda sebesar Rp101.418.000,-	101.418.000,00	
Penyesuaian Reklas beban hibah DisKPP sebesar Rp148.400.000,-	148.400.000,00	
Penyesuaian Reklas beban hibah DisKPP sebesar Rp451.040.000,-	451.040.000,00	
Penyesuaian beban jasa konsultasi pengawas DKPP sebesar Rp7.900.000,-	7.900.000,00	
Penyesuaian persediaan Dinsos sebesar Rp42.315.000,-	42.315.000,00	
Penyesuaian DKPP sebesar Rp9.900.000,-	9.900.000,00	
Penyesuaian beban hibah Disperintransnaker sebesar Rp671.797.000,-	671.797.000,00	
Penyesuaian beban hibah Dishubkan sebesar Rp2.998.522.100,-	2.998.522.100,00	
Penyesuaian beban hibah DP3AP2KB sebesar Rp53.175.000,-	53.175.000,00	
Penyesuaian reklas beban barang DisPUPR sebesar Rp-94.600.000,-	-94.600.000,00	
Penyesuaian beban hibah BKAD sebesar Rp73.920.000,-	73.920.000,00	
Penyesuaian beban hibahDP3AP2KB sebesar Rp298.080.000-	298.080.000,00	
Penyesuaian persediaan Dinkes sebesar Rp1.990.000,-	1.990.000,00	
Penyesuaian utk tujuan stratefis/berjaga-jaga Dinkes sebesar Rp418.481.169,-	418.481.169,00	



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Penyesuaian beban bansos DKPP sebesar Rp67.849.689,-	67.849.689,00	
Penyesuaian persediaan Dinsos sebesar Rp65.055.000,-	68.055.000,00	
Penyesuaian persediaan Dinkes sebesar Rp-14.415.500,-	-14.415.500,00	
Penyesuaian persediaan Dinkes sebesar Rp180.244.500,-	180.244.500,00	
Penyesuaian makan minum rapat	19.268.849.100,00	
Penyesuaian beban makan minum rapat	-9.102.982.076,00	
Penyesuaian beban makan minum jamuan tamu	-3.828.078.850,00	
Penyesuaian beban penambah daya tahan tubuh	-3.698.103.140,00	
Penyesuaian beban makan minum aktivitas lapangan	-1.870.389.850,00	
Penyesuaian reklas beban komponen rambu-rambu DisPUPR sebesar Rp-5.000.000,-	-35.000.000,00	
Penyesuaian beban komponen rambu-rambu DKPP sebesar Rp-78.650.000,-	-78.650.000,00	
Penyesuaian beban pipa lainnya Dispora	2.800.000,00	
Penyesuaian beban pipa lainnya Dishubkan sebesar Rp-4.000.000,-	-4.000.000,00	
Penyesuaian beban pipa lainnya Dispora sebesar Rp-2.800.000,-	-2.800.000,00	
Penyesuaian alat apung tak bermotor Dinkes	-17.500.000,00	
Penyesuaian akat rumah tangga lainnya Dinkes	-8.000.000,00	
Penyesuaian Kapitalisasi beban peralatan dan mesin-alat komunikasi telephone menjadi aset tetap alat sandi Satpol PP	-22.725.000,00	
Penyesuaian kapitalisasi beban peralatan dan mesin peralatan komputer menjadi peraltan komputer lainnya Set DPRD	-59.851.200,00	
Koreksi penambahan barang diserahkan kepada masyarakat dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.925.000,00	
Koreksi atas Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 atas cek fisik karcis retribusi pada Disbudparpora yang belum tercatat di Persediaan yaitu karcis retribusi yang masih berlaku	-11.597.800,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		23.657.776.542,99

5.4.2.1.3 Beban Jasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
129.817.088.548,20	141.681.624.421,77

Realisasi Beban Jasa TA 2024 sebesar Rp129.817.088.548,20 mengalami penurunan sebesar Rp11.864.535.873,57 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp141.681.624.421,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.29
Beban Jasa - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Jasa Kantor	90.146.079.054,00	99.473.655.199,00	(9.327.576.145,00)
2	Beban Premi Asuransi	26.982.540.980,83	21.929.446.010,77	5.053.094.970,06
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.417.038.129,00	3.097.680.000,00	(680.641.871,00)
4	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.014.374.710,00	1.331.203.766,00	683.170.944,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	62.950.000,00	10.600.000,00	52.350.000,00
6	Beban Jasa Konsultasi Kontruksi	388.661.907,37	1.573.463.343,00	(1.184.801.435,63)
7	Beban Jasa Konsultasi dan Non Kontruksi	379.750.000,00	5.784.331.091,00	(5.404.581.091,00)
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.350.697.767,00	8.431.292.012,00	(1.080.594.245,00)
9	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	74.996.000,00	49.953.000,00	25.043.000,00
Jumlah		129.817.088.548,20	141.681.624.421,77	(11.864.535.873,57)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.4. 30
Beban Jasa – LO berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	7.750.854.624,36	9.879.818.471,00	(2.128.963.846,64)
2	Dinas Kesehatan	41.665.535.223,95	50.647.152.086,77	(8.981.616.862,82)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.729.407.216,00	3.865.693.126,00	(1.136.285.910,00)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	3.898.460.604,01	5.058.753.268,00	(1.160.292.663,99)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.677.217.768,00	11.444.578.900,00	232.638.868,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.733.767.564,00	1.685.237.509,00	48.530.055,00
7	Dinas Sosial	813.567.842,00	952.305.513,00	(138.737.671,00)
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.969.787.025,00	1.638.183.167,00	1.331.603.858,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.730.931.644,00	3.303.163.455,00	(572.231.811,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	5.100.560.854,00	4.710.749.554,00	389.811.300,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	981.422.409,00	1.028.059.205,00	(46.636.796,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.139.885.022,00	2.081.780.256,00	(941.895.234,00)
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.812.144.568,00	1.860.653.130,00	(48.508.562,00)
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.783.007.650,00	3.707.693.504,00	75.314.146,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	847.127.300,00	1.102.608.263,00	(255.480.963,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.229.321.594,00	1.087.243.803,00	142.077.791,00
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	2.191.905.423,00	3.750.129.900,00	(1.558.224.477,00)
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.713.018.396,00	1.746.332.171,00	(33.313.775,00)
19	Sekretariat Daerah	8.160.503.779,00	7.019.993.655,00	1.140.510.124,00
20	Inspektorat Daerah	886.795.078,00	648.479.807,00	238.315.271,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.050.066.346,00	2.624.740.265,00	(574.673.919,00)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.231.636.605,88	5.210.040.558,00	3.021.596.047,88
23	Badan Pendapatan Daerah	1.857.592.149,00	2.588.216.649,00	(730.624.500,00)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.728.133.272,00	2.265.056.717,00	(536.923.445,00)
25	Sekretariat DPRD	6.517.745.056,00	6.184.859.489,00	332.885.567,00
26	Kecamatan Katingan Kuala	364.779.500,00	328.612.500,00	36.167.000,00
27	Kecamatan Mendawai	372.579.390,00	368.356.400,00	4.222.990,00
28	Kecamatan Kamipang	428.295.400,00	405.362.900,00	22.932.500,00
29	Kecamatan Tasik Payawan	322.675.903,00	308.317.241,00	14.358.662,00
30	Kecamatan Katingan Hilir	648.161.709,00	490.302.413,00	157.859.296,00
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	361.502.312,00	392.214.048,00	(30.711.736,00)
32	Kecamatan Pulau Malan	324.170.269,00	306.482.500,00	17.687.769,00
33	Kecamatan Katingan Tengah	578.988.604,00	616.386.395,00	(37.397.791,00)
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	353.653.292,00	252.564.840,00	101.088.452,00
35	Kecamatan Marikit	323.997.550,00	267.559.000,00	56.438.550,00
36	Kecamatan Katingan Hulu	190.288.124,00	174.083.329,00	16.204.795,00
37	Kecamatan Petak Malai	250.100.050,00	206.128.600,00	43.971.450,00
38	Kecamatan Bukit Raya	294.760.000,00	259.400.000,00	35.360.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	802.741.432,00	1.214.331.834,00	(411.590.402,00)
Jumlah		129.817.088.548,20	141.681.624.421,77	(11.864.535.873,57)

Terdapat selisih antara Beban Jasa LO dan Belanja Jasa LRA sebesar Rp23.757.144.746,63 dengan rincian dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Beban Jasa – LO		129.817.088.548,20
Belanja Jasa – LRA		153.574.233.294,83
Selisih LO – LRA		(23.757.144.746,63)
Penjelasan Selisih:		
Reklas dari Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	(22.675.344.746,63)	
Reklas dari Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	(1.081.800.000,00)	
Jumlah Penjelasan Selisih		(23.757.144.746,63)

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	21.604.124.775,46	23.828.989.489,19

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.604.124.775,46 mengalami penurunan sebesar Rp2.224.864.713,73 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp23.828.989.489,19 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.31
Beban Pemeliharaan – LO
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Pemeliharaan	21.604.124.775,46	23.828.989.489,19	(2.224.864.713,73)
Jumlah		21.604.124.775,46	23.828.989.489,19	(2.224.864.713,73)

Tabel 5.4.32
Beban Pemeliharaan - LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	1.748.592.078,56	524.105.390,20	1.224.486.688,36
2	Dinas Kesehatan	4.636.098.828,00	7.379.245.862,00	(2.743.147.034,00)
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	0,00	611.980.725,00	(611.980.725,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.830.772.131,90	3.751.149.515,00	(1.920.377.383,10)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	299.320.000,00	630.739.000,00	(331.419.000,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	379.408.998,00	375.950.942,00	3.458.056,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	309.778.000,00	312.713.875,00	(2.935.875,00)
8	Dinas Sosial	221.791.100,00	250.117.000,00	(28.325.900,00)
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	258.896.823,00	258.576.000,00	320.823,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian	238.359.768,00	135.936.606,00	102.423.162,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
	Penduduk dan Keluarga Berencana			
11	Dinas Lingkungan Hidup	523.787.350,00	585.712.441,00	(61.925.091,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.020.000,00	108.375.500,00	31.644.500,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	127.533.568,00	145.129.630,00	(17.596.062,00)
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	493.017.001,00	446.725.338,00	46.291.663,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	244.695.255,00	251.154.972,00	(6.459.717,00)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	95.831.000,00	108.980.000,00	(13.149.000,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	379.920.470,00	296.802.549,99	83.117.920,01
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	196.269.175,00	146.789.856,00	49.479.319,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	132.316.851,00	256.066.177,00	(123.749.326,00)
20	Sekretariat Daerah	3.083.587.200,00	2.150.588.616,00	932.998.584,00
21	Inspektorat Daerah	472.892.118,00	482.517.840,00	(9.625.722,00)
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	467.820.468,00	510.040.172,00	(42.219.704,00)
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	874.937.700,00	837.601.194,00	37.336.506,00
24	Badan Pendapatan Daerah	607.100.600,00	430.006.145,00	177.094.455,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	596.525.100,00	427.791.000,00	168.734.100,00
26	Sekretariat DPRD	1.448.377.100,00	1.208.648.190,00	239.728.910,00
27	Kecamatan Katingan Kuala	65.150.000,00	8.300.000,00	56.850.000,00
28	Kecamatan Mendawai	130.460.000,00	93.846.000,00	36.614.000,00
29	Kecamatan Kamipang	169.059.700,00	111.956.000,00	57.103.700,00
30	Kecamatan Tasik Payawan	76.948.900,00	70.341.250,00	6.607.650,00
31	Kecamatan Katingan Hilir	90.387.000,00	72.951.000,00	17.436.000,00
32	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	151.893.818,00	81.200.703,00	70.693.115,00
33	Kecamatan Pulau Malan	56.017.000,00	47.878.000,00	8.139.000,00
34	Kecamatan Katingan Tengah	153.510.000,00	164.790.000,00	(11.280.000,00)
35	Kecamatan Sanaman Mantikei	72.690.000,00	41.790.000,00	30.900.000,00
36	Kecamatan Marikit	97.050.000,00	86.089.000,00	10.961.000,00
37	Kecamatan Katingan Hulu	191.919.500,00	141.550.000,00	50.369.500,00
38	Kecamatan Petak Malai	211.406.500,00	77.969.000,00	133.437.500,00
39	Kecamatan Bukit Raya	142.325.000,00	82.425.000,00	59.900.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	187.658.674,00	124.459.000,00	63.199.674,00
Jumlah		21.604.124.775,46	23.828.989.489,19	(2.224.864.713,73)

Terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp1.604.799.254,44 dengan rincian dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Beban Pemeliharaan – LO		21.604.124.775,46
Belanja Pemeliharaan – LRA		23.208.924.029,90
Selisih LO – LRA		(1.604.799.254,44)
Penjelasan Selisih:		
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(1.368.187.800,00)	
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.796.008.000,00)	
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(39.375.000,00)	



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Penyesuaian Belanja Pemeliharaan menjadi persediaan	(299.244.000,00)	
Ekstrakomptabel dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.689.671.545,56	
Ekstrakomptabel dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	208.344.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		(1.604.799.254,44)

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	104.648.189.326,00	95.957.795.045,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp104.648.189.326,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.690.394.281,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp95.957.795.045,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.33
Beban Perjalanan Dinas - LO
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Perjalanan Dinas	104.648.189.326,00	95.957.795.045,00	8.690.394.281,00
Jumlah	104.648.189.326,00	95.957.795.045,00	8.690.394.281,00

Tabel 5.4.34
Beban Perjalanan Dinas - LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	9.726.327.542,00	6.671.782.654,00	3.054.544.888,00
2	Dinas Kesehatan	21.043.150.861,00	23.719.837.010,00	(2.676.686.149,00)
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	0,00	0	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.351.895.241,00	4.048.552.062,00	303.343.179,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	1.876.408.429,00	1.702.980.719,00	173.427.710,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.332.935.594,00	2.504.321.478,00	828.614.116,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.342.868.999,00	1.238.717.960,00	104.151.039,00
8	Dinas Sosial	1.698.175.115,00	1.545.244.683,00	152.930.432,00
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.910.752.199,00	1.665.288.262,00	245.463.937,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.946.583.949,00	1.860.377.799,00	86.206.150,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.870.210.749,00	1.604.264.590,00	265.946.159,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	885.702.316,00	1.035.967.247,00	(150.264.931,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.500.654.168,00	1.671.172.694,00	(170.518.526,00)
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.219.367.299,00	1.281.639.408,00	(62.272.109,00)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.896.777.548,00	1.313.883.651,00	582.893.897,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.036.431.150,00	1.086.373.791,00	(49.942.641,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.287.795.889,00	1.016.164.379,00	271.631.510,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	724.374.702,00	863.986.660,00	(139.611.958,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.799.453.278,00	1.492.783.048,00	306.670.230,00
20	Sekretariat Daerah	7.835.641.787,00	5.913.522.102,00	1.922.119.685,00
21	Inspektorat Daerah	3.515.647.829,00	2.943.448.103,00	572.199.726,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2.361.968.456,00	2.170.295.416,00	191.673.040,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.493.849.574,00	2.122.462.365,00	371.387.209,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.712.369.641,00	2.024.217.190,00	(311.847.549,00)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.179.551.777,00	2.296.406.870,00	(116.855.093,00)
26	Sekretariat DPRD	17.281.204.685,00	16.219.099.235,00	1.062.105.450,00
27	Kecamatan Katingan Kuala	654.669.240,00	416.026.200,00	238.643.040,00
28	Kecamatan Mendawai	323.676.310,00	279.515.394,00	44.160.916,00
29	Kecamatan Kamipang	415.558.442,00	408.357.639,00	7.200.803,00
30	Kecamatan Tasik Payawan	361.989.110,00	311.995.719,00	49.993.391,00
31	Kecamatan Katingan Hilir	465.611.560,00	372.207.400,00	93.404.160,00
32	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	414.637.150,00	430.792.710,00	(16.155.560,00)
33	Kecamatan Pulau Malan	334.824.900,00	251.740.500,00	83.084.400,00
34	Kecamatan Katingan Tengah	549.710.700,00	368.787.576,00	180.923.124,00
35	Kecamatan Sanaman Mantikei	454.335.900,00	248.340.164,00	205.995.736,00
36	Kecamatan Marikit	447.650.829,00	346.571.490,00	101.079.339,00
37	Kecamatan Katingan Hulu	757.811.279,00	607.570.024,00	150.241.255,00
38	Kecamatan Petak Malai	525.985.103,00	476.450.560,00	49.534.543,00
39	Kecamatan Bukit Raya	663.084.300,00	484.820.800,00	178.263.500,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.448.545.726,00	941.829.493,00	506.716.233,00
Jumlah		104.648.189.326,00	95.957.795.045,00	8.690.394.281,00

5.4.2.1.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat

31 Desember 2024 31 Desember 2023

2.857.820.219,00 2.547.705.000,00

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.857.820.219,00 mengalami kenaikan sebesar Rp310.115.219,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.547.705.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.35
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	462.485.000,00	282.205.000,00	180.280.000,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00
3	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.585.500.000,00	0,00	1.585.500.000,00
4	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	552.000.000,00	546.000.000,00	6.000.000,00
5	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
6	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	312.000.000,00	(312.000.000,00)
7	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	143.835.219,00	1.293.500.000,00	(1.149.664.781,00)
Jumlah		2.857.820.219,00	2.547.705.000,00	310.115.219,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.4.36
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	70.500.000,00	46.100.000,00	24.400.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	140.190.000,00	114.405.000,00	25.785.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	40.515.000,00	51.000.000,00	(10.485.000,00)
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.251.500.000,00	2.218.500.000,00	33.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	32.000.000,00	(32.000.000,00)
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.000.000,00	2.500.000,00	51.500.000,00
9	Dinas Pendidikan	161.780.000,00	45.700.000,00	116.080.000,00
10	Dinas Kesehatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	93.835.219,00	0,00	93.835.219,00
13	Kecamatan Katingan Hilir	17.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00
14	Kecamatan Kamipang	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Jumlah		2.857.820.219,00	2.547.705.000,00	310.115.219,00

5.4.2.1.7 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

31 Desember 2024

31 Desember 2023

108.395.818,00

0,00

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp108.395.818,00 mengalami kenaikan sebesar Rp108.395.818,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp0,00 dikarenakan Tahun 2024 merupakan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOK Akreditasi Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. 37
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Barang dan Jasa BOK	108.395.818,00	0,00	108.395.818,00
Jumlah		108.395.818,00	0,00	108.395.818,00

Tabel 5.4.38
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas - Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Kesehatan	108.395.818,00	0,00	108.395.818,00
Jumlah		108.395.818,00	0,00	108.395.818,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.4.2.1.8	Beban Barang dan Jasa BLUD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		2.366.327.363,10	2.126.250.657,48

Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.366.327.363,10 mengalami kenaikan sebesar Rp240.076.705,62 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.126.250.657,48 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. 39
Beban Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	2.366.327.363,10	2.126.250.657,48	240.076.705,62
	Jumlah	2.366.327.363,10	2.126.250.657,48	240.076.705,62

Tabel 5.4.40
**Beban Barang dan Jasa BLUD - Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	BLUD RSUD Mas Amsyar	2.366.327.363,10	2.126.250.657,48	240.076.705,62
	Jumlah	2.366.327.363,10	2.126.250.657,48	240.076.705,62

5.4.2.1.9	Beban Bunga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda, adapun realisasi beban bunga Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah Rp0,00.

5.4.2.1.10	Beban Subsidi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		2.536.412.800,00	1.668.543.000,00

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp2.536.412.800,00 mengalami kenaikan besar Rp867.869.800,00 dari realisasi subsidi tahun sebelumnya sebesar Rp1.668.543.000,00.

Adapun rincian Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2023 merupakan realisasi atas Beban Subsidi ke Perusahaan Daerah Air Minum



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Kabupaten Katingan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.286.412.800,00 dan Badan Usaha Milik Swasta dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp1.250.000.000,00, dapat tergambar sebagai berikut.

Tabel 5.4.41
Beban Subsidi
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Subsidi	2.536.412.800,00	1.668.543.000,00	867.869.800,00
	JUMLAH	2.536.412.800,00	1.668.543.000,00	867.869.800,00

5.4.2.1.11 Beban Hibah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	78.042.667.295,06	75.085.151.604,75

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) negeri, BOS sekolah swasta, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Realisasi Beban Hibah tahun 2024 sebesar Rp78.042.667.295,06 mengalami kenaikan sebesar Rp2.957.515.690,31 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp75.085.151.604,75. Dengan peningkatan terbesar pada Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp22.332.145.341,14 dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.42
Beban Hibah
Tahun Anggaran 2024

<i>(dalam rupiah)</i>				
No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	28.598.557.839,48	4.400.000.000,00	24.198.557.839,48
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah daerah lainnya	54.284.880,00	406.168.000,00	-351.883.120,00
3	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	22.332.145.341,14	43.267.963.579,00	-20.935.818.237,86
4	Beban Hibah Dana BOS	25.852.859.234,44	25.886.125.025,75	-33.265.791,31
5	Beban Bantuan Keuangan kepada Parpol	1.204.820.000,00	1.124.895.000,00	79.925.000,00
	Jumlah	78.042.667.295,06	75.085.151.604,75	2.957.515.690,31

Tabel 5.4.43
Beban Hibah berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

<i>(dalam rupiah)</i>				
No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	29.689.371.134,44	30.863.447.975,75	(1.174.076.841,31)
2	Dinas Kesehatan	552.426.880,00	450.000.000,00	102.426.880,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.210.992.233,34	0	1.210.992.233,34
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0	0,00
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	3.937.214.672,00	6.354.704.677,00	(2.417.490.005,00)
6	Sekretariat Daerah	12.391.858.000,00	18.494.688.000,00	(6.102.830.000,00)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	338.841.107,14	0	338.841.107,14
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.604.791.200,00	17.744.886.500,00	10.859.904.700,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	536.565.480,00	150.000.000,00	386.565.480,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	621.256.452,00	(621.256.452,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	651.000.126,14	0,00	651.000.126,14
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.606.462,00	0,00	129.606.462,00
13	Kecamatan Mendawai	0,00	406.168.000,00	(406.168.000,00)
Jumlah		78.042.667.295,06	75.085.151.604,75	2.957.515.690,31

Terdapat selisih antara Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA sebesar Rp25.255.289.164,38 dengan rincian dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai	
Beban Hibah – LO		78.042.667.295,06
Belanja Hibah – LRA		103.297.956.459,44
Selisih LO – LRA		(25.255.289.164,38)
Penjelasan Selisih:		
Reklas dari Belanja Hibah menjadi Persediaan yang Diserahkan kepada Masyarakat	(18.461.516.448,00)	
Reklas dari Belanja Hibah menjadi Beban Persediaan	(4.796.352.100,00)	
Kapitalisasi Belanja Hibah BOS menjadi Aset Tetap	(4.918.710.905,00)	
Hibah kepada Pihak Ketiga	2.921.290.288,62	
Jumlah Penjelasan Selisih		(25.255.289.164,38)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.2.1.12 Beban Bantuan Sosial	2.440.000.000,00	977.360.000,00

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, adapun realisasi beban bantuan sosial pada tahun 2024 sebesar Rp2.440.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.462.640.000,00 dibandingkan dengan realisasi beban bantuan sosial pada tahun 2023 sebesar Rp977.360.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.44
Beban Bantuan Sosial - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

(No)	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Individu	1.680.000.000,00	247.500.000,00	1.432.500.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Keluarga	532.000.000,00	681.860.000,00	(149.860.000,00)
3	Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
4	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	Jumlah	2.440.000.000,00	977.360.000,00	1.462.640.000,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.4.45
Beban Bantuan Sosial – LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Kesehatan	00,0	00,0	00,0
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	180.000.000,00	00,0	180.000.000,00
3	Dinas Sosial	580.000.000,00	648.000.000,00	(68.000.000,00)
4	Sekretariat Daerah	1.680.000.000,00	247.500.000,00	1.432.500.000,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	00,0	00,0	00,0
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	81.860.000,00	(81.860.000,00)
	Jumlah	2.440.000.000,00	977.360.000,00	1.462.640.000,00

Terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA sebesar Rp67.849.689,00 dengan rincian dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Beban Bantuan Sosial – LO	2.440.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial – LRA	2.507.849.689,00
Selisih LO – LRA	(67.849.689,00)
Penjelasan Selisih:	
Reklas Beban Bansos menjadi persediaan/barang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(67.849.689,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(67.849.689,00)

5.4.2.1.13 Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	597.947.170,79	1.151.705.117,32

Beban Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain, adapun beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp597.947.170,79 untuk gambaran terkait beban penyisihan piutang adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.46
Beban Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	597.947.170,79	1.151.705.117,32	(553.757.946,53)
Jumlah	597.947.170,79	1.151.705.117,32	(553.757.946,53)

Tabel 5.4.47
Beban Penyisihan Piutang Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	BLUD RSUD Mas Amsyar	(36.977.247,82)	75.097.119,04	(112.074.366,86)
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.750.000,00	(103.250,00)	1.853.250,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	(42.106.923,58)	42.106.923,58
4	Badan Pendapatan Daerah	633.174.418,61	1.118.818.171,86	(485.643.753,25)
	Jumlah	597.947.170,79	1.151.705.117,32	(553.757.946,53)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.4.2.1.14 Beban Lain Lain

31 Desember 2024

31 Desember 2023

0,00

419.709.129,93

Beban Lain-lain adalah beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi dan beban transfer. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Beban lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.48
Realisasi Beban Lain-Lain
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	419.709.129,93	(419.709.129,93)
Beban Extracomptable	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	419.709.129,93	(419.709.129,93)

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2024

31 Desember 2023

191.625.025.498,52

181.960.353.879,72 47

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan penyusutan selama satu periode tahun anggaran terhadap Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud yang masih memiliki masa manfaat dan dalam kondisi baik yang terdiri atas Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, Beban Penyusutan Aset Lainnya, dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp191.625.025.498,52 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.664.671.618,80 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp181.960.353.879,72 47, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.49
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	62.727.303.485,53	50.662.919.238,64	12.064.384.246,89
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.368.750.988,27	24.294.542.953,93	3.074.208.034,34
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	101.072.557.942,22	106.089.140.424,65	-5.016.582.482,43
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	456.413.082,50	913.751.262,50	-457.338.180,00
Jumlah	191.625.025.498,52	181.960.353.879,72	9.664.671.618,80



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.4.50
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	19.782.164.801,24	19.300.438.778,52	481.726.022,72
2	Dinas Kesehatan	35.635.322.403,72	23.230.869.921,06	12.404.452.482,66
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.417.225.593,71	86.397.782.609,15	-4.980.557.015,44
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	15.606.325.066,84	15.978.865.260,71	-372.540.193,87
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.521.453.440,60	2.112.757.869,31	408.695.571,29
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.105.594.643,06	2.501.971.665,21	-396.377.022,15
7	Dinas Sosial	444.802.687,24	413.502.899,38	31.299.787,86
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.175.526.658,36	5.150.849.830,34	24.676.828,02
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	583.382.332,79	591.253.766,24	-7.871.433,45
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.608.325.194,25	2.184.758.463,20	423.566.731,05
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	277.506.536,01	218.526.131,54	58.980.404,47
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	302.087.993,09	272.956.760,63	29.131.232,46
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	2.830.412.570,15	2.726.001.640,28	104.410.929,87
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	515.426.516,81	561.511.652,47	-46.085.135,66
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.071.776.186,16	1.053.349.017,17	18.427.168,99
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	920.810.349,84	880.604.883,27	40.205.466,57
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	1.622.191.905,22	1.648.526.842,29	-26.334.937,07
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.267.466.775,41	1.220.463.162,63	47.003.612,78
19	Sekretariat Daerah	4.188.575.644,94	4.118.283.313,44	70.292.331,50
20	Inspektorat Daerah	537.278.631,04	409.209.734,29	128.068.896,75
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	776.734.288,01	677.914.210,57	98.820.077,44
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.502.919.103,96	3.900.456.902,63	602.462.201,33
23	Badan Pendapatan Daerah	1.264.775.852,80	1.210.392.455,61	54.383.397,19
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	837.604.513,40	700.882.292,64	136.722.220,76
25	Sekretariat DPRD	1.765.189.202,08	1.688.900.574,69	76.288.627,39
26	Kecamatan Katingan Kuala	407.516.372,38	400.732.352,75	6.784.019,63
27	Kecamatan Mendawai	75.995.477,68	96.915.359,03	-20.919.881,35
28	Kecamatan Kamipang	192.426.169,37	201.783.895,03	-9.357.725,66
29	Kecamatan Tasik Payawan	59.332.824,27	57.170.180,71	2.162.643,56
30	Kecamatan Katingan Hilir	460.086.227,24	435.710.447,93	24.375.779,31
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	391.694.547,01	289.201.010,31	102.493.536,70
32	Kecamatan Pulau Malan	91.433.114,76	73.743.481,74	17.689.633,02
33	Kecamatan Katingan Tengah	326.310.858,41	317.878.219,53	8.432.638,88
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	148.388.844,28	50.694.140,00	97.694.704,28
35	Kecamatan Marikit	76.167.214,00	63.675.571,14	12.491.642,86
36	Kecamatan Katingan Hulu	337.279.232,48	336.989.695,66	289.536,82
37	Kecamatan Petak Malai	145.655.508,22	147.912.664,61	-2.257.156,39
38	Kecamatan Bukit Raya	90.281.635,91	96.423.812,86	-6.142.176,95



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	261.578.581,78	240.492.411,15	21.086.170,63
	Jumlah	191.625.025.498,52	181.960.353.879,72	9.664.671.618,80

5.4.2.2.1	Beban Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Peralatan dan Mesin	62.727.303.485,53	50.662.919.238,64

Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp62.732.826.285,53 mengalami Kenaikan sebesar Rp 12.064.384.246,89 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp50.662.919.238,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.51
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	996.189.877,99	801.517.644,25	194.672.233,74
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	11.076.852.031,87	9.414.195.969,90	1.662.656.061,97
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	903.015.030,71	965.016.652,95	(62.001.622,24)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	472.627.660,50	461.010.200,33	17.140.260,17
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.274.790.652,53	9.792.828.257,72	481.962.394,81
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.701.453.038,97	2.024.690.593,40	676.762.445,57
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	20.282.738.800,10	11.216.632.732,17	9.066.106.067,93
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.775.469.887,41	2.589.424.367,77	186.045.519,64
9	Beban Penyusutan	183.517.997,82	79.187.164,00	104.330.833,82
10	Beban Penyusutan Komputer	12.061.442.295,89	12.405.163.090,46	(343.720.794,57)
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	1.200.000,00	1.154.800,00	45.200,00
12	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	67.522.566,67	14.270.900,00	53.251.666,67
13	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	241.740.416,61	259.932.550,01	(18.192.133,40)
14	Beban Penyusutan Alat Peraga	28.368.037,00	28.724.755,00	(356.718,00)
15	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.670.625,00	1.733.125,00	(62.500,00)
16	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	514.775.983,23	527.018.268,97	(12.242.285,74)
17	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	143.928.583,23	80.418.166,71	63.510.416,52
	Jumlah	62.727.303.485,53	50.662.919.238,64	12.064.384.246,89

Tabel 5.4.52
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	11.257.180.103,12	11.743.783.370,17	(486.603.267,05)
2	Dinas Kesehatan	16.400.954.145,47	12.067.410.852,09	4.333.543.293,38



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	12.646.724.226,23	6.432.985.572,46	6.213.738.653,77
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.037.925.327,08	1.000.773.148,84	37.152.178,24
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	566.950.316,79	702.808.155,51	(135.857.838,72)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.146.327.257,09	1.889.891.047,15	256.436.209,94
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.016.962.042,66	2.421.312.807,01	(404.350.764,35)
8	Dinas Sosial	239.475.227,70	233.412.179,10	6.063.048,60
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	444.728.893,57	452.700.714,61	(7.971.821,04)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	396.496.219,28	414.065.975,87	(17.569.756,59)
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.751.231.176,80	1.204.397.416,80	546.833.760,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	186.689.438,17	147.305.433,42	39.384.004,75
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	197.818.648,11	183.960.071,41	13.858.576,70
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.537.042.552,84	1.520.708.050,61	16.334.502,23
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	369.532.062,03	370.707.993,39	(1.175.931,36)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	260.074.674,99	297.153.675,01	(37.079.000,02)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	664.839.769,40	539.500.049,44	125.339.719,96
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	434.669.297,39	331.134.717,01	103.534.580,38
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	343.705.398,06	273.010.318,24	70.695.079,82
20	Sekretariat Daerah	1.965.595.668,68	1.976.259.392,79	(10.663.724,11)
21	Inspektorat Daerah	279.068.395,21	208.276.745,22	70.791.649,99
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	500.821.698,57	417.970.708,43	82.850.990,14
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.174.148.140,28	2.349.850.766,48	824.297.373,80
24	Badan Pendapatan Daerah	763.591.621,23	730.168.462,36	33.423.158,87
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	562.343.567,26	438.262.559,39	124.081.007,87
26	Sekretariat DPRD	1.090.456.742,82	1.019.343.684,46	71.113.058,36
27	Kecamatan Katingan Kuala	53.656.499,98	84.507.464,30	(30.850.964,32)
28	Kecamatan Mendawai	41.336.571,00	58.626.214,29	(17.289.643,29)
29	Kecamatan Kamipang	123.743.029,14	131.902.032,85	(8.159.003,71)
30	Kecamatan Tasik Payawan	38.236.324,27	36.073.680,71	2.162.643,56
31	Kecamatan Katingan Hilir	226.702.863,49	230.179.108,49	(3.476.245,00)
32	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	160.691.255,10	86.014.438,00	74.676.817,10
33	Kecamatan Pulau Malan	68.938.857,14	49.317.642,87	19.621.214,27
34	Kecamatan Katingan Tengah	139.980.533,81	137.453.819,53	2.526.714,28
35	Kecamatan Sanaman Mantikei	128.655.026,28	30.960.322,00	97.694.704,28



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
36	Kecamatan Marikit	61.600.250,00	49.108.607,14	12.491.642,86
37	Kecamatan Katingan Hulu	104.170.652,36	110.182.068,46	(6.011.416,10)
38	Kecamatan Petak Malai	70.521.744,29	69.852.440,71	669.303,58
39	Kecamatan Bukit Raya	70.778.428,58	78.225.571,42	(7.447.142,84)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	202.938.838,79	143.361.960,59	59.576.878,20
	Jumlah	62.727.303.485,53	50.662.919.238,63	12.064.384.246,89

5.4.2.2.2	Beban Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Gedung dan Bangunan	27.368.750.988,27	24.294.542.953,93

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.368.750.988,27 mengalami kenaikan sebesar Rp3.074.208.034,34 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp24.294.542.953,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.53
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	26.915.603.576,13	23.157.449.721,11	3.758.153.855,02
2	Beban Penyusutan Monumen	58.589.365,85	796.388.876,44	(737.799.510,59)
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	74.212.864,01	59.357.163,00	14.855.701,01
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	320.345.182,28	281.347.193,38	38.997.988,90
	Jumlah	27.368.750.988,27	24.294.542.953,93	3.074.208.034,34

Tabel 5.4.54
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	8.416.045.408,38	7.193.674.366,23	1.222.371.042,15
2	Dinas Kesehatan	5.335.882.653,83	3.819.376.400,49	1.516.506.253,34
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	623.789.632,59	514.175.902,44	109.613.730,15
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.436.476,32	355.721.543,79	24.714.932,53
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	2.381.966.673,55	2.686.266.061,64	(304.299.388,09)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	344.691.806,27	167.640.451,41	177.051.354,86
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.264.625,40	74.290.883,20	7.973.742,20
8	Dinas Sosial	178.130.794,43	152.596.635,56	25.534.158,87
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	787.077.329,77	752.114.974,80	34.962.354,97



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	168.213.533,51	158.515.210,37	9.698.323,14
11	Dinas Lingkungan Hidup	521.533.035,65	494.632.262,81	26.900.772,84
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.155.898,24	58.059.498,52	23.096.399,72
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	104.269.344,98	80.226.489,22	24.042.855,76
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	1.076.060.052,00	1.053.815.725,41	22.244.326,59
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	122.832.282,83	136.872.687,13	(14.040.404,30)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	805.263.466,88	749.713.351,56	55.550.115,32
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	157.406.470,19	146.193.064,87	11.213.405,32
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	949.560.547,76	1.136.363.213,91	(186.802.666,15)
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	557.085.081,38	537.042.149,90	20.042.931,48
20	Sekretariat Daerah	1.995.538.092,46	1.859.350.937,65	136.187.154,81
21	Inspektorat Daerah	143.011.402,00	140.349.624,00	2.661.778,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	259.923.341,79	239.379.254,48	20.544.087,31
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	270.873.484,74	222.286.395,22	48.587.089,52
24	Badan Pendapatan Daerah	345.971.748,93	325.407.758,88	20.563.990,05
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	139.151.315,08	131.352.602,21	7.798.712,87
26	Sekretariat DPRD	479.467.298,03	460.235.878,99	19.231.419,04
27	Kecamatan Katingan Kuala	107.987.677,40	108.236.693,45	(249.016,05)
28	Kecamatan Mendawai	34.138.906,25	37.769.144,74	(3.630.238,49)
29	Kecamatan Kamipang	67.860.643,32	69.126.054,21	(1.265.410,89)
30	Kecamatan Tasik Payawan	21.096.500,00	21.096.500,00	0,00
31	Kecamatan Katingan Hilir	100.456.575,29	90.289.550,98	10.167.024,31
32	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	55.346.481,17	48.486.742,31	6.859.738,86
33	Kecamatan Pulau Malan	22.494.257,62	24.425.838,87	(1.931.581,25)
34	Kecamatan Katingan Tengah	47.864.910,00	47.864.910,00	0,00
35	Kecamatan Sanaman Mantikei	19.733.818,00	19.733.818,00	0,00
36	Kecamatan Marikit	14.441.964,00	14.441.964,00	0,00
37	Kecamatan Katingan Hulu	20.585.175,23	20.261.957,20	323.218,03
38	Kecamatan Petak Malai	73.427.163,93	76.353.623,90	(2.926.459,97)
39	Kecamatan Bukit Raya	18.503.207,33	18.198.241,44	304.965,89
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.211.911,74	52.604.590,14	4.607.321,60
Jumlah		27.368.750.988,27	24.294.542.953,93	3.074.208.034,34



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.4.2.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		101.072.557.942,22	106.089.140.424,65

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp101.072.557.942,22 mengalami penurunan sebesar Rp5.016.582.482,43 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp106.089.140.424,65 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.55
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	90.740.198.375,39	95.715.458.168,09	(4.975.259.792,70)
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	5.705.395.048,97	6.074.838.023,47	(369.442.974,50)
3	Beban Penyusutan Instalasi	2.190.334.415,33	1.835.078.866,58	355.255.548,75
4	Beban Penyusutan Jaringan	2.436.630.102,53	2.463.765.366,51	(27.135.263,98)
	Jumlah	101.072.557.942,22	106.089.140.424,65	(5.016.582.482,43)

Tabel 5.4.56
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	108.662.789,74	108.321.162,13	341.627,61
2	Dinas Kesehatan	627.971.745,60	209.379.693,58	418.592.052,02
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79.976.451.290,31	84.861.737.480,77	-4.885.286.190,46
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	12.646.183.076,50	12.780.976.529,29	-134.793.452,79
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	30.434.377,24	55.226.370,75	-24.791.993,51
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.367.975,00	6.367.975,00	0,00
7	Dinas Sosial	27.196.665,11	27.494.084,72	-297.419,61
8	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.943.720.435,02	3.942.477.140,93	1.243.294,09
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.672.580,00	18.672.580,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	310.635.981,80	457.811.783,59	-147.175.801,79
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.661.199,60	9.661.199,60	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	5.270.200,00	-5.270.200,00
13	Dinas Perhubungan dan Perikanan	141.222.465,31	137.640.364,26	3.582.101,05
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	23.062.171,95	48.140.971,95	-25.078.800,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	6.438.044,29	5.581.990,60	856.053,69
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.564.110,25	164.956.268,96	-66.392.158,71
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	177.982.060,07	174.785.161,37	3.196.898,70
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	366.676.295,97	410.410.694,49	-43.734.398,52



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
19	Sekretariat Daerah	221.191.883,80	267.852.983,00	-46.661.099,20
20	Inspektorat Daerah	115.198.833,83	60.583.365,07	54.615.468,76
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	15.989.247,65	15.989.247,66	-0,01
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.002.953.728,94	1.168.545.990,93	-165.592.261,99
23	Badan Pendapatan Daerah	3.962.482,64	3.566.234,37	396.248,27
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90.793.048,56	90.793.048,54	0,02
25	Sekretariat DPRD	191.518.911,23	205.574.761,24	-14.055.850,01
26	Kecamatan Katingan Kuala	245.872.195,00	204.072.195,00	41.800.000,00
27	Kecamatan Mendawai	520.000,00	520.000,00	0,00
28	Kecamatan Kamipang	822.496,91	755.807,97	66.688,94
29	Kecamatan Tasik Payawan	0	0	0,00
30	Kecamatan Katingan Hilir	132.926.788,46	115.241.788,46	17.685.000,00
31	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	175.656.810,70	154.699.830,00	20.956.980,70
32	Kecamatan Pulau Malan	-	-	0,00
33	Kecamatan Katingan Tengah	138.465.414,60	132.559.490,00	5.905.924,60
34	Kecamatan Sanaman Mantikei	-	-	0,00
35	Kecamatan Marikit	125.000,00	125.000,00	0,00
36	Kecamatan Katingan Hulu	212.523.404,89	206.545.670,00	5.977.734,89
37	Kecamatan Petak Malai	1.706.600,00	1.706.600,00	0,00
38	Kecamatan Bukit Raya	1.000.000,00	0	1.000.000,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.427.831,25	35.096.760,42	-33.668.929,17
Jumlah		101.072.557.942,22	106.089.140.424,65	-5.016.582.482,43

5.4.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00

5.4.2.2.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Realisasi Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.2.2.6 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		456.413.082,50	913.751.262,50

Realisasi Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp456.413.082,50 mengalami penurunan sebesar Rp457.338.180,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp913.751.262,50 dengan rincian sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.4.57
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	276.500,00	59.824.080,00	(59.547.580,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00	7.463.500,00	(7.463.500,00)
3	BLUD RSUD Mas Amsyar	0,00	155.405.000,00	(155.405.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	22.412.500,00	29.727.500,00	(7.315.000,00)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	11.225.000,00	185.190.000,00	(173.965.000,00)
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	3.557.000,00	(3.557.000,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup	24.925.000,00	27.917.000,00	(2.992.000,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)
11	Dinas Perhubungan dan Perikanan	76.087.500,00	13.837.500,00	62.250.000,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0,00	5.790.000,00	(5.790.000,00)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	900.000,00	(900.000,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	29.155.500,00	(29.155.500,00)
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	59.980.000,00	0,00	59.980.000,00
16	Sekretariat Daerah	6.250.000,00	14.820.000,00	(8.570.000,00)
17	Sekretariat DPRD	3.746.250,00	3.746.250,00	0,00
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	54.943.750,00	159.773.750,00	(104.830.000,00)
19	Badan Pendapatan Daerah	151.250.000,00	151.250.000,00	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	4.575.000,00	(4.575.000,00)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.316.582,50	40.474.082,50	4.842.500,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	9.429.100,00	(3.916.000,00)
23	Kecamatan Katingan Kuala	0,00	3.916.000,00	(9.429.100,00)
JUMLAH		456.413.082,50	913.751.262,50	(457.338.180,00)

5.4.2.3	Beban Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		107.597.541.937,30	86.215.628.896,93

Beban Transfer TA 2024 sebesar Rp107.735.215.429,30 mengalami kenaikan sebesar Rp 21.381.913.040,37 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp86.215.628.896,93 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.58
Beban Transfer - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Bagi Hasil	6.446.126.714,70	4.474.309.567,00	1.971.817.147,70
Beban Bantuan Keuangan	101.151.415.222,60	81.321.610.200,00	19.829.805.022,60
Jumlah	107.597.541.937,30	85.795.919.767,00	21.801.622.170,30



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil

31 Desember 2024	31 Desember 2023
6.446.126.714,70	4.474.309.567,00

Beban transfer tahun 2024 sebesar Rp6.446.126.714,70 merupakan beban transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, mengalami kenaikan sebesar Rp1.971.817.147,70 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.446.126.714,70 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.59
Beban Bagi Hasil - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	4.973.382.942,25	2.984.877.705,00	1.988.505.237,25
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.472.743.772,45	1.489.431.862,00	(16.688.089,55)
Jumlah	6.446.126.714,70	4.474.309.567,00	1.971.817.147,70

5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
101.151.415.222,60	81.321.610.200,00

Beban Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp101.151.415.222,60 mengalami kenaikan sebesar Rp19.829.805.022,60 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp81.321.610.200,00. Beban Transfer bantuan Keuangan terdiri atas Beban Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi, Bantuan Keuangan ke Daerah Kabupaten/Kota Lainnya, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.60
Beban Bantuan Keuangan - LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	100.906.415.222,60	81.076.610.200,00	19.829.805.022,60
JUMLAH	101.151.415.222,60	81.321.610.200,00	19.829.805.022,60

Terdapat selisih antara Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA sebesar Rp119.564.120.577,40 dengan rincian dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Beban Bantuan Keuangan – LO	101.151.415.222,60
Belanja Bantuan Keuangan – LRA	220.715.535.800,00
Selisih LO – LRA	(119.564.120.577,40)
Penjelasan Selisih:	
Transfer Dana Desa yang tidak diakui dalam LO	(133.014.020.000,00)
Koreksi atas pengakuan Utang atas Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	13.449.899.422,60
Jumlah Penjelasan Selisih	(119.564.120.577,40)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

5.4.2.4 Beban Tidak Terduga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	1.605.409.963,00	1.062.262.800,00

Beban Tidak Terduga pada tahun 2024 menjadi bagian pos luar biasa terdapat pada Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. Beban Tidak Terduga pada tahun 2024 sebesar Rp1.605.409.963,00 mengalami kenaikan sebesar Rp543.147.163,0 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.062.262.800,00. Beban Tidak Terduga menjadi bagian pos luar biasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.61
Beban Tidak Terduga – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Tidak Terduga	1.605.409.963,00	1.062.262.800,00	543.147.163,00
Jumlah	1.605.409.963,00	1.062.262.800,00	543.147.163,00

5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	81.863.193.672,29	271.012.269.781,61

Dari perhitungan pendapatan dan beban operasi diperoleh surplus perhitungan sebesar Rp81.863.193.672,29 dimana selisih dari Pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp189.149.076.109,32 dan Beban Operasi Laporan Operasional tahun 2023 sebesar Rp271.012.269.781,61.

5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(114.359.311,59)	(Rp219.696.190,43)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional yang disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 adalah defisit sebesar Rp114.359.311,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.62
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	993.722.633,94	487.448.381,00	506.274.252,94
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	(1.108.081.945,53)	(707.144.571,43)	(400.937.374,10)
JUMLAH	(114.359.311,59)	(219.696.190,43)	105.336.878,84

5.4.4.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	993.722.633,94	487.448.381,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Surplus Penjualan Aset Non Lancar yang disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp993.722.633,94 berasal dari keuntungan penjualan kendaraan bermotor.

5.4.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang yang disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 adalah Nihil.

5.4.4.3	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar – LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.108.081.945,53	707.144.571,43

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.108.081.945,53 dimana terdapat Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO sebesar Rp970.408.453,53 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO (defisit atas investasi pada PDAM berdasarkan Laporan Keuangan PDAM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik) sebesar Rp137.673.492,00.

5.4.4.4	Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar yang disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 adalah Nihil.

5.4.4.5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		81.748.834.360,70	270.792.573.591,18

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa yang disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 adalah Rp81.748.834.360,70. Dimana selisih dari Surplus/Defisit Dari Operasi sebesar Rp81.863.193.672,29 dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp114.359.311,59).

5.4.5	Pos Luar Biasa	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Pos Luar Biasa terdiri atas Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa yang disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 adalah nihil.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.4.6	Surplus/Defisit – LO	81.748.834.360,70	270.792.573.591,18

Perhitungan akhir Laporan Operasional tahun 2024 mengalami Surplus sebesar Rp81.748.834.360,70.

Pendapatan	1.326.397.471.963,32
Beban	1.244.534.278.291,03
Surplus/Defisit Dari Operasi – LO	81.863.193.672,29
Kegiatan Non Operasional	
Surplus non Operasional	993.722.633,94
Defisit non Operasional	1.108.081.945,53
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-114.359.311,59
Pos Luar biasa	0
Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	0
Surplus/Defisit- LO	81.748.834.360,70

5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklassifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama Tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada PD. Sisa kas di Bendahara PD baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara PD merupakan bagian dari Kas Daerah, yang sampai dengan akhir Tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2024 dan TA 2023 terdiri atas:

Tabel 5.5.1
Laporan Arus Kas
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)		
Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	371.162.217.627,23	292.346.312.161,89
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	(373.107.440.225,24)	(347.160.654.684,99)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/ Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan **Audited**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	371.117.644.293,69	292.346.312.161,89

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp371.117.644.293,69 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp371.117.644.293,69 yang diperoleh dari selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.1.1 Arus Kas Masuk	1.584.111.042.311,46	1.405.523.283.381,68

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.584.058.306.811,46 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Katingan TA 2024.

Tabel 5.5.2
Arus Kas Masuk
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	22.060.219.369,80	56.319.360.172,05
Penerimaan Retribusi Daerah	8.184.315.989,00	6.998.837.446,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.579.510.360,83	27.049.142,65
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	32.256.551.451,83	33.966.595.109,98
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	332.285.338.000,00	188.876.497.355,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	672.273.960.026,00	649.641.846.105,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	186.604.733.257,00	138.035.682.119,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	126.733.032.185,00	126.400.729.347,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	0	6.264.924.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.890.545.000,00	0
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	52.166.886.132,00	63.385.453.045,00
Penerimaan Hibah	378.281.230,00	501.263.540,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.683.649.310,00	0
Penerimaan Dana Desa	133.014.020.000,00	135.105.046.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.584.111.042.311,46	1.405.523.283.381,68

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.5.1.2 Arus Kas Keluar	1.212.948.824.684,23	1.113.421.971.219,79

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.212.940.662.517,77 merupakan pembayaran Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp984.173.590.040,07 ditambah Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.605.409.963,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp227.161.662.514,70.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.5.3
Arus Kas Keluar
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	506.232.945.775,58	441.447.210.765,96
Belanja Barang	369.606.587.482,51	360.870.851.259,08
Belanja Subsidi	2.536.412.800,00	1.668.543.000,00
Belanja Hibah	103.297.956.459,44	85.914.892.627,75
Belanja Bantuan Sosial	2.507.849.689,00	1.312.245.000,00
Belanja Tak Terduga	1.605.409.963,00	1.062.262.800,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	6.446.126.714,70	4.474.309.567,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	220.470.535.800,00	216.426.656.200,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.212.948.824.684,23	1.113.421.971.219,79

5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Investasi/Investasi Non	(373.107.440.225,24)	(347.160.654.684,99)
	Keuangan		

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp373.107.440.225,24. Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 defisit sebesar Rp373.107.440.225,24 yang merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

5.5.2.1	Arus Kas Masuk	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.088.070.000,00	633.498.381,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 adalah Rp1.088.070.000,00 yang diperoleh dari pelepasan/penjualan aset lain-lain.

5.5.2.2	Arus Kas Keluar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		374.195.510.225,24	347.794.153.065,99

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp374.195.510.225,24 merupakan pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel 5.5.4
Arus Kas Keluar
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Arus Kas Keluar	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Modal Tanah	1.478.500.000,00	85.029.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.614.740.833,80	46.249.873.882,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.277.154.014,83	153.018.617.584,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.242.194.176,61	132.461.127.644,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	235.131.200,00	1.100.504.955,00
Belanja Modal Aset Lainnya	347.790.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	14.879.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	374.195.510.225,24	347.794.153.065,99

5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran yang disajikan dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 adalah Nihil.

5.5.3.1	Arus Kas Masuk	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		104.690.378.022,00	0,00

Arus Kas masuk pada Tahun 2024 sebesar Rp.104.690.378.022,00 dari penerimaan perhitungan pihak ketiga

5.5.3.2	Arus Kas Keluar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		104.690.378.022,00	0,00

Arus Kas keluar pada Tahun 2024 sebesar Rp.104.690.378.022,00 dari penyetoran perhitungan pihak ketiga.

5.5.4	Kenaikan/Penurunan Kas	31 Desember 2023	31 Desember 2023
		(1.945.222.598,01)	(54.814.342.523,10)

Dari perhitungan arus kas masuk dan keluar semua aktivitas diketahui terjadi penurunan kas sebesar Rp1.945.222.598,01.

5.5.5	Saldo Awal Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		56.595.994.999,98	111.394.517.123,08

Saldo Awal Kas sebesar Rp56.595.994.999,98 terdiri dari :

Tabel 5.5.5
Saldo Awal Kas
Tahun Anggaran 2024

Uraian		(dalam rupiah)
		Saldo Awal di BUD Tahun 2024
a	Saldo Kas di Kasda	43.672.033.158,46
b	Saldo Kas di BLUD	7.988.268.537,60
c	Saldo Kas di Bendahara BOS	1.014.184.541,66
d	Saldo Kas di Bendahara FKTP	774.505.455,26
e	Saldo Kas Lainnya	3.092.307.307,00
f	Kas Dana BOK Puskesmas	0,00
g	Kas dibendahara pengeluaran	0,00
h	Kas dibendahara penerimaan	54.696.000,00
Jumlah		56.595.994.999,98

5.5.6	Saldo Akhir Kas	31 Desember 2023	31 Desember 2023
		54.678.265.555,97	56.595.994.999,98



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Saldo akhir kas sebesar Rp54.631.629.068,43 terdiri atas :

Tabel 5.5.6
Saldo Akhir Kas
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kenaikan/Penurunan Kas	-1.945.222.598,01	-54.814.342.523,10
Saldo Awal Kas	56.595.994.999,98	111.394.517.123,08
Koreksi Penambahan/ Pengurangan Saldo Kas	27.493.154,00	15.820.400,00
Koreksi Reklasifikasi Saldo	0	0
Saldo Akhir Kas di BUD	54.678.265.555,97	56.595.994.999,98

5.5.7	Saldo Akhir Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		54.678.265.555,97	56.595.994.999,98

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.678.265.555,97 terdiri atas:

Tabel 5.5.7
Saldo Akhir Kas
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Akhir Kas di Kasda	47.601.787.155,20	43.672.033.158,46
Saldo Akhir Kas BLUD	3.168.405.006,63	7.988.268.537,60
Saldo Kas di Bendahara BOS	1.113.359.385,22	1.014.184.541,66
Saldo Kas di Bendahara FKTP	75.557.741,92	774.505.455,26
Saldo Kas Lainnya	0	3.092.307.307,00
Saldo Akhir Kas BOK PUSKESMAS	2.666.419.867,00	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	900	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	52.735.500,00	54.696.000,00
Saldo Akhir Kas	54.678.265.555,97	56.595.994.999,98

5.6 Penjelasan Akun – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1	Ekuitas Awal	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		3.324.939.944.212,69	3.010.346.552.468,41

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp3.324.939.944.212,69 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2024.

Tabel 5.6.1
Ekuitas Awal
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	406.459.108.617,46	369.227.544.964,26	37.231.563.653,20
2	Dinas Kesehatan	301.577.659.334,93	242.531.791.170,05	59.045.868.164,88
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	936.757.068.268,48	861.709.399.554,09	75.047.668.714,39



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Perangkat Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	258.840.097.100,15	229.569.680.742,90	29.270.416.357,25
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.009.253.350,91	4.980.292.745,46	28.960.605,45
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16.338.867.871,68	11.979.447.192,78	4.359.420.678,90
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.398.034.133,23	9.720.897.198,64	-1.322.863.065,41
8	Dinas Sosial	11.417.934.891,43	11.242.004.965,61	175.929.925,82
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	69.268.760.820,15	58.543.397.103,81	10.725.363.716,34
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.157.969.113,37	8.670.825.552,75	-512.856.439,38
11	Dinas Lingkungan Hidup	34.485.853.064,62	34.187.732.780,71	298.120.283,91
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.467.842.146,86	5.267.237.226,69	200.604.920,17
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.206.411.009,43	3.826.254.157,85	1.380.156.851,58
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	65.361.368.406,69	65.793.811.200,83	-432.442.794,14
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.628.150.416,53	10.541.701.492,05	86.448.924,48
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	38.902.148.090,54	51.051.815.242,42	-12.149.667.151,88
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	59.211.128.144,01	52.534.729.129,77	6.676.399.014,24
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	52.586.865.353,40	53.079.511.524,83	-492.646.171,43
19	Sekretariat Daerah	534.306.581.624,74	536.128.260.495,89	-1.821.678.871,15
20	Sekretariat DPRD	28.441.978.796,60	28.847.005.764,33	-405.026.967,73
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.869.623.886,44	6.425.054.304,67	3.444.569.581,77
22	Kecamatan Katingan Kuala	9.142.398.106,95	7.550.222.300,78	1.592.175.806,17
23	Kecamatan Kamipang	3.197.461.797,71	3.089.930.600,33	107.531.197,38
24	Kecamatan Tasik Payawan	948.105.141,43	1.562.241.322,14	-614.136.180,71
25	Kecamatan Katingan Hilir	6.215.944.600,45	5.737.089.376,83	478.855.223,62
26	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	4.674.878.833,69	3.646.383.364,34	1.028.495.469,35
27	Kecamatan Pulau Malan	1.803.098.256,60	1.472.621.014,23	330.477.242,37
28	Kecamatan Katingan Tengah	3.765.896.764,02	2.354.645.723,55	1.411.251.040,47
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	1.256.514.346,00	1.286.195.876,00	-29.681.530,00
30	Kecamatan Marikit	1.276.685.127,14	1.284.027.212,57	-7.342.085,43
31	Kecamatan Katingan Hulu	2.763.282.431,68	2.367.944.960,37	395.337.471,31
32	Kecamatan Mendawai	1.824.864.268,98	1.737.436.880,96	87.427.388,02
33	Kecamatan Bukit Raya	984.464.709,59	1.077.308.488,34	-92.843.778,75
34	Kecamatan Petak Malai	3.574.388.184,87	3.651.306.614,51	-76.918.429,64
35	Inspektorat Daerah	7.385.291.906,15	6.471.132.926,90	914.158.979,25
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	14.354.555.584,16	14.601.398.279,52	-246.842.695,36
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	366.255.315.443,28	267.576.640.526,25	98.678.674.917,03
38	Badan Pendapatan Daerah	20.778.636.423,66	20.633.143.640,21	145.492.783,45
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.045.457.844,68	8.388.488.850,19	-343.031.005,51
JUMLAH		3.324.939.944.212,69	3.324.939.944.212,69	3.010.346.552.468,41

5.6.2 Surplus/Defisit dari	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Laporan Operasional(LO)	81.748.834.360,70	270.792.573.591,18

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp81.748.834.360,70.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Tabel 5.6.2
Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dinas Pendidikan	(337.361.840.635,60)	(300.979.526.240,48)	(36.382.314.395,12)
2	Dinas Kesehatan	(198.638.941.062,52)	(189.505.521.295,87)	(9.133.419.766,65)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(79.881.635.994,81)	(103.715.951.216,40)	23.834.315.221,59
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	(27.566.682.782,01)	(26.916.041.418,63)	(650.641.363,38)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(34.153.672.000,78)	(22.883.944.187,15)	(11.269.727.813,63)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(24.051.384.300,60)	(22.630.696.294,31)	(1.420.688.006,29)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(9.210.637.626,06)	(9.665.716.358,21)	455.078.732,15
8	Dinas Sosial	(7.350.452.713,24)	(7.721.957.865,38)	371.505.152,14
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(14.718.800.620,36)	(13.446.953.328,34)	(1.271.847.292,02)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(11.923.604.614,79)	(11.609.086.280,24)	(314.518.334,55)
11	Dinas Lingkungan Hidup	(16.450.128.987,25)	(15.422.389.311,20)	(1.027.739.676,05)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.511.482.769,01)	(5.781.136.831,54)	(730.345.937,47)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(7.421.624.392,09)	(8.517.870.577,63)	1.096.246.185,54
14	Dinas Perhubungan dan Perikanan	(13.873.933.043,15)	(15.140.737.269,21)	1.266.804.226,06
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(11.902.360.170,81)	(9.531.380.432,47)	(2.370.979.738,34)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	(7.053.000.775,16)	(6.513.820.370,17)	(539.180.404,99)
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	(12.551.959.001,22)	(16.613.879.140,29)	4.061.920.139,07
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(14.873.526.627,41)	(13.090.027.077,63)	(1.783.499.549,78)
19	Sekretariat Daerah	(50.207.414.357,29)	(52.304.051.294,35)	2.096.636.937,06
20	Sekretariat DPRD	(46.433.862.458,08)	(44.281.192.961,69)	(2.152.669.496,39)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(7.877.685.803,84)	(6.801.255.555,26)	(1.076.430.248,58)
22	Kecamatan Katingan Kuala	(4.119.216.841,38)	(3.573.749.148,75)	(545.467.692,63)
23	Kecamatan Kamipang	(3.501.048.005,37)	(3.263.104.495,03)	(237.943.510,34)
24	Kecamatan Tasik Payawan	(3.053.216.451,27)	(3.365.550.635,71)	312.334.184,44
25	Kecamatan Katingan Hilir	(6.170.485.557,24)	(5.246.884.762,93)	(923.600.794,31)
26	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	(4.585.549.415,01)	(4.408.904.515,31)	(176.644.899,70)
27	Kecamatan Pulau Malan	(3.534.502.459,76)	(3.463.844.674,74)	(70.657.785,02)
28	Kecamatan Katingan Tengah	(5.003.809.111,53)	(4.427.420.023,53)	(576.389.088,00)
29	Kecamatan Sanaman Mantikei	(3.150.978.015,28)	(2.436.783.422,00)	(714.194.593,28)
30	Kecamatan Marikit	(2.631.869.535,00)	(2.419.596.995,14)	(212.272.539,86)
31	Kecamatan Katingan Hulu	(4.057.960.596,48)	(3.525.500.970,66)	(532.459.625,82)
32	Kecamatan Mendawai	(2.713.322.395,68)	(2.996.867.969,03)	283.545.573,35
33	Kecamatan Bukit Raya	(2.442.714.408,91)	(2.072.384.928,86)	(370.329.480,05)



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

34	Kecamatan Petak Malai	(2.443.016.395,22)	(2.240.936.521,61)	(202.079.873,61)
35	Inspektorat Daerah	(11.987.175.396,88)	(10.862.328.160,29)	(1.124.847.236,59)
36	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(10.570.729.519,01)	(10.422.902.987,57)	(147.826.531,44)
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.083.945.070.308,15	1.199.162.038.381,07	(115.216.968.072,92)
38	Badan Pendapatan Daerah	17.485.153.700,05	49.806.745.910,36	(32.321.592.210,31)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(9.701.164.807,40)	(10.376.315.182,64)	675.150.375,24
Jumlah		81.748.834.360,70	270.792.573.591,18	(189.043.739.230,48)

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2024 adalah Rp0,00.

5.6.3.2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		0,00	0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp0,00 karena tidak ada dilakukan revaluasi atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Katingan.

5.6.3.3	Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		1.571.418.555,84	43.800.818.153,10

Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp1.569.355.401,84 yang disebabkan oleh:

- Koreksi Kas Dana BOS **Rp27.493.154,00**
Koreksi saldo akhir BOS Tahun 2023 sebesar Rp27.493.154,00 disebabkan adanya kas pada bendahara BOP PAUD tahun 2023 sebesar Rp25.430.000,00 dan BOS SMP Reguler sebesar Rp2.063.154,00
- Koreksi Piutang Pendapatan BLUD **(Rp 429.491,75)**
Koreksi pengurangan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan tahun 2023 sebesar Rp429.491,75 yang disebabkan klaim dari BLUD yang tidak dapat diakui oleh BPJS atas hasil verifikasi
- Koreksi Aset Tetap Tanah **Rp2.744.934.706,50**
Koreksi pengakuan Aset Tetap Tanah yang diperoleh dari hibah sebelum tahun 2024 yang terdiri dari Tanah Bangunan Rp2.725.016.030,00, Tanah Kering Rp424.320,00 dan Tanah Non Persil Lainnya Rp19.494.356,50.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

- d. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap **(Rp645.733.913,92)**
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disebabkan perubahan kebijakan yang berlaku surut sejak tahun 2022 sebesar (Rp645.733.913,92)
- e. Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud **(Rp941.270.880,00)**
Koreksi yang disebabkan perubahan kebijakan yang berlaku surut sejak tahun 2022
- f. Koreksi Utang Pegawai BLUD **Rp386.424.980,53**
Koreksi pengurangan Saldo Awal Utang BLUD atas jasa medik covid tahun 2021 dan 2022.
- g. Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD **Rp0,48**
Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BUD

5.6.4	Ekuitas Akhir	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		3.408.260.197.129,23	3.324.939.944.212,69

Ekuitas akhir TA 2024 adalah sebesar Rp3.408.260.197.129,23.



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kegiatan Majelis TP/TGR Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024

6.1.1 Aktivitas Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam pelaksanaan tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memproses kerugian daerah.

Atas dasar Peraturan Bupati Katingan tersebut Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi melakukan beberapa kali pemanggilan dan persidangan terhadap beberapa orang terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Dari proses pemanggilan dan pelaksanaan sidang yang telah dilakukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan dapat dihasilkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan terdapat pula beberapa kasus yang telah diselesaikan dengan melakukan pembayaran atas kerugian Daerah tersebut kemudian akan dilakukan penghapusan beberapa item kerugian daerah dari daftar piutang daerah, telah dilaksanakan pula rekonsiliasi atas beberapa kasus Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi pada Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya didukung dengan menyajikan bukti pendukung.

Adapun aktivitas Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Katingan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 6.1.1
Daftar Aktivitas TP/TGR
Kabupaten Katingan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama	Jumlah Kewajiban	Jumlah Pengembalian	Sisa Lebih/(Kurang)	Keterangan
1	YTK S MDS	64.115.000,00	37.057.500,00	(27.057.500,00)	Proses Angsuran
2	SY	129.118.151,00	0,00	(129.118.151,00)	Proses Lelang Jaminan
3	Rt (istri alm Dana)	31.547.677,00	0,00	0,00	Usul Penghapusan
4	Ys	1.415.694.683,00	0,00	0,00	Proses
5	ABD	609.473.003,00	0,00	(609.473.003,00)	Proses Sidang
6	IKL-M3/GB	237.000.000,00	(13.000.000,00)	224.000.000,00	Proses Angsuran
7	KG	800,00	800,00	00,00	Proses Angsuran
8	Rsnd	30.114.128,57	9.163.000,00	(20.951.128,57)	Proses Angsuran



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

Untuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang diterbitkan selama Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan sampai Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.1.2
Daftar Terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama	Saldo Awal/ Pengembalian di Tahun 2021	Jumlah Pengembalian s/d di Tahun 2021	Saldo	Keterangan
1	P	73.556.768,00	73.556.768,00	0,00	Usulan Proses Penghapusan
Jumlah		73.556.768,00	73.556.768,00	0,00	

6.2 Barang Ekstrakomptabel (*Extracomptable*)

Penerapan dari Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Katingan, maka pencatatan barang-barang (selain barang persediaan) yang nilai satuannya berada di bawah batasan nilai kapitalisasi dilakukan terpisah dengan pencatatan barang yang menjadi aset tetap daerah.

Pada tahun 2023 ini, barang-barang yang nilai satuannya berada di bawah batasan nilai kapitalisasi, baik itu yang bersumber dari realisasi belanja tahun berkenaan maupun sumber-sumber lain dikeluarkan dari pencatatan/pembukuan aset tetap daerah dan dibukukan dalam daftar barang ekstrakomptabel (*Extracomptable*).

6.3 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

6.3.1 Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02

Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran (TA) 2021 disajikan bahwa, pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Pendapatan yang diterima oleh satker/PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan *Audited*

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;

5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Biaya Non Personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain, namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.



PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 yang disusun menjadi laporan Keuangan Tahunan, setelah melalui perhitungan yang terperinci dan *cross check* silang antara instansi-instansi terkait semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini.

Kita maklumi bahwa perhitungan anggaran ini merupakan realita dari kebijakan dan Peraturan yang sudah ditentukan melalui penetapan/pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang juga merupakan suatu kewajiban Pemerintah Daerah kepada rakyat melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk diaudit, sehingga dengan demikian rakyat di daerah ini dapat mengetahui sampai sejauh mana dana yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan anggaran tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diwujudkan, walaupun untuk itu Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.

Atas landasan berpikir tersebut, harapan bersama kiranya Perhitungan Anggaran ini dapat memperoleh penilaian lebih baik dari tahun kemarin dimana Laporan tersebut dapat kami susun menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 pada saatnya.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 beserta Laporan Keuangan diajukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dimana sebelum Laporan Keuangan ini disusun, kami memperoleh saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak.

Permasalahan-permasalahan yang kemungkinan memerlukan penjelasan lebih lanjut dan atau belum cukup jelas dapat diberikan penjelasan sepenuhnya dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada saatnya nanti.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapkan banyak terimakasih. Sekian.





PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%) Realisasi terhadap Anggaran	REALISASI 2023
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	49.876.586.982,00	22.060.219.369,80	44,23	56.319.360.172
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	6.556.973.058,00	8.184.315.989,00	124,82	6.998.837.446
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	20.192.215.980,00	4.579.510.360,83	22,68	27.049.143
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	41.333.719.514,00	33.344.621.451,83	80,67	34.600.093.491
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	117.959.495.534,00	68.168.667.171,46	57,79	97.945.340.251,68
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.1.1.2.1				
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	1.350.006.016.000,00	1.317.897.063.468,00	97,62	1.102.954.754.926,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	0,00	0,00	-	6.264.924.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.3	133.014.020.000,00	133.014.020.000,00	100,00	135.105.046.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.4	5.890.545.000,00	5.890.545.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.488.910.581.000,00	1.456.801.628.468,00	97,84	1.244.324.724.926,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.2				
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	63.204.000.000,00	52.166.886.132,00	82,54	63.385.453.045,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	63.204.000.000,00	52.166.886.132,00	82,54	63.385.453.045,00
Jumlah Pendapatan Transfer	5.1.1.2	1.552.114.581.000,00	1.508.968.514.600,00	97,22	1.307.710.177.971,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	50.000.000,00	378.281.230,00	756,56	501.263.540,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	0,00	7.683.649.310,00	-	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.1.1.3	50.000.000,00	8.061.930.540,00	16.123,86	501.263.540,00
JUMLAH PENDAPATAN	5.1.1	1.670.124.076.534,00	1.585.199.112.311,46	94,92	1.406.156.781.762,68
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	579.390.704.751,00	506.232.945.775,58	87,37	441.447.210.765,96
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	412.475.281.252,78	369.606.587.482,51	89,61	360.870.851.259,08
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	2.680.150.000,00	2.536.412.800,00	94,64	1.668.543.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	105.685.085.505,40	103.297.956.459,44	97,74	85.914.892.627,75
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	3.278.349.698,00	2.507.849.689,00	76,50	1.312.245.000,00
Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.1	1.103.509.571.207,18	984.181.762.206,53	89,19	891.213.742.652,79
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	1.500.000.000,00	1.478.500.000,00	98,57	85.029.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	112.913.340.540,54	106.614.740.833,80	94,42	46.249.673.882,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	162.045.369.748,00	160.277.154.014,83	98,91	153.018.617.584,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	110.735.899.202,28	105.242.194.176,61	95,04	132.461.127.644,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	236.331.000,00	235.131.200,00	99,49	1.100.504.955,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	350.790.000,00	347.790.000,00	99,14	0,00
Jumlah Belanja Modal	5.1.2.2	387.781.730.490,82	374.195.510.225,24	96,50	332.915.153.065,99
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	8.232.227.250,00	1.605.409.963,00	19,50	1.062.262.800,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	8.232.227.250,00	1.605.409.963,00	19,50	1.062.262.800,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
Transfer Bagi Hasil	5.1.2.4.1	6.481.006.786,00	6.446.126.714,70	99,46	4.474.309.567,00
Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	220.715.535.800,00	220.715.535.800,00	100,00	216.426.656.200,00
Jumlah Belanja Transfer	5.1.2.4	227.196.542.586,00	227.161.662.514,70	99,98	220.900.965.767,00
JUMLAH BELANJA	5.1.2	1.726.720.071.534,00	1.587.144.334.909,47	91,92	1.446.092.124.285,78
SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(56.595.995.000,00)	(1.945.222.598,01)	3,44	(39.935.342.523,10)

URAIAN	REF.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%) Realisasi terhadap Anggaran	REALISASI 2023
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		56.595.995.000,00	56.623.488.153,98	100,05	111.410.337.523,08
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.1.4.1	56.595.995.000,00	56.623.488.153,98	100,05	111.410.337.523,08
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
Penyertaan Modal		0,00	0,00	-	14.879.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.1.4.2	0,00	0,00	-	14.879.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4	56.595.995.000,00	56.623.488.153,98	100,05	96.531.337.523,08
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.5	0,00	54.878.265.555,97	100,00	56.595.994.999,98





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024
DI KASONGAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKA RAYA**

Nomor : 45.A/LHP/XIX.PAL/07/2025

Tanggal : 16 Juli 2025

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PI7EA1D2.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Katingan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Katingan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 3.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan menyajikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran (TA) 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tanggal 1 November 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024. Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan perubahan/pergeseran APBD Kabupaten Katingan TA 2024 melalui pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Katingan, namun tidak didukung dengan persetujuan DPRD dan penetapan melalui Perda Perubahan APBD.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 45.B/LHP/XIX.PAL/07/2025 tanggal 16 Juli 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palangka Raya, 16 Juli 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Register Negara Akuntan No. 12707